

# SKRIPSI

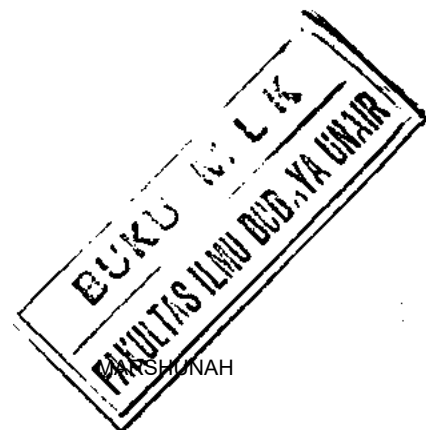
## PARODI ATAS REALITAS POLITIK INDONESIA PADA ERA REFORMASI DALAM MATINYA TOEKANG KRITIK KARYA AGUS NOOR



Oleh :

**MAHSHUNAH**  
NIM 120210432

**DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2008**



**PARODI ATAS REALITAS POLITIK INDONESIA PADA ERA  
REFORMASI DALAM MATINYA TOEKANG KRITIK  
KARYA AGUS NOOR**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Departemen Sastra Indonesia  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga**

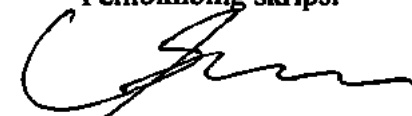
Oleh :

**MAHSHUNAH  
NIM 120210432**

**DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2008**


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN**  
**Surabaya, 27 Juni 2008**

Oleh  
Pembimbing skripsi



Puji Karyanto, S.S., M. Hum.  
NIP 132086388

Mengetahui,  
Ketua Departemen Sastra Indonesia



Moch. Jalal, S.S., M. Hum.  
NIP 132161180

**SKRIPSI**  
**PARODI ATAS REALITAS POLITIK INDONESIA**  
**PADA ERA REFORMASI DALAM *MATINYA TOEKANG KRITIK***  
**KARYA AGUS NOOR**

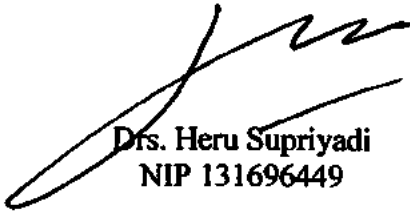
Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Juli 2008


**Tim Penguji**

**Ketua**



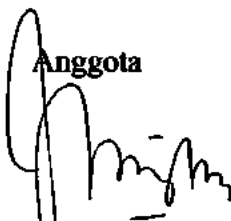
**Drs. Heru Supriyadi**  
**NIP 131696449**

**Sekretaris**



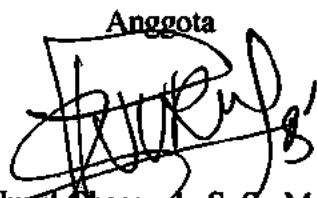
**Puji Karyanto, S. S., M. Hum.**  
**NIP 132086388**

**Anggota**



**Dra. Adi Setijowati, M. Hum.**  
**NIP 131458544**

**Anggota**



**Ida Nurul Chasanah, S. S., M. Hum.**  
**NIP 132086390**

***Untuk cinta dan doa tak terbatas  
-Aba dan Ibu***

### **Pernyataan**

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi mana pun, dan dalam bagian-bagian naskah skripsi yang saya buat tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali memang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surabaya, 27 Juni 2008



Marshunah

## Kata Pengantar

*Alhamdulillah.* Terima kasih, Ya Allah. Atas segala kasih yang tak pernah berhenti Kau limpahkan untukku. Skripsi ini telah “selesai”. Setidaknya, satu “dosa” termaafkan.

Penulisan skripsi berjudul *Parodi atas Realitas Politik Indonesia pada Era Reformasi dalam Matinya Toekang Kritik karya Agus Noor* ini pada dasarnya hendak mengungkapkan realitas politik dalam sebuah karya sastra. Berbagai cara digunakan pengarang untuk menghadirkan realitas dalam karyanya, dan Agus Noor memilih parodi. Pemilihan parodi inilah yang hendak dikupas maknanya.

Bagi penulis, skripsi ini bukan semata salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan, melainkan penebusan atas segala kesempatan untuk meraih apa yang ada kini. Sebagai makhluk tuhan yang paling lemah, alangkah tidak-tahudirinya penulis jika tidak berterima kasih untuk semua pihak yang telah berperan dalam segala langkah penulis untuk mencapai ini. Untuk itu, penulis berterima kasih kepada:

1. Pusakaku: Aba dan Ibu, atas cinta dan doa tak terhenti, juga tekad dan semangat tak tertandingi, Semoga Allah mencintai;
2. Puji Karyanto, S.S., M. Hum. Bapak, terima kasih, waktu dan kesabarannya, senyumnya, segalanya, terima kasih.. terima kasih...;
3. Dra. Adi Setijowati, M.Hum. Saya bangga dan bahagia memiliki kesempatan menjadi *anak* Ibu, terima kasih...;
4. Moch. Jalal, S.S., M.Hum. selaku Ketua Departemen Sastra Indonesia;

5. Bapak dan Ibu dosen penguji: Pak Heru, Pak Puji, Bu Adi, dan Bu Ida, yang bahkan pada detik-detik terakhir saya sebagai mahasiswa, Bapak dan Ibu masih ikhlas memberikan bimbingan dan ilmunya;
6. Bapak dan Ibu dosen Sastra Indonesia: Pak Listiyono, atas inspirasi semangat yang tak pernah lekang, Pak Putre, atas diskusi-diskusinya, Pak Lutfi, Bu Handa, Bu Bea, Pak Ali, Bu Ndari, Pak Putre, Pak Luita, Bu Pur, Bu Wayan, Bu Ratna, Bu Suci, Pak Eddy S., Bu Trisna, Pak Edi J., atas segala yang telah terberi;
7. Kebahagiaanku: Neng dan Mas (bahagialah), Ana“sahabat” terbaikku (aku kehabisan kata), Taufik (jadilah pemenang!), Noeng (semoga), Ombie (jangan pernah berhenti!), Muharrom (engkaulah..), Fida (selamat pagi, manis, matahari sudah tinggi), Faya, keponakan mungil mama, yang tanpa disadarinya telah banyak berjasa, (tersenyumlah!).
8. Shofwan, terima kasih telah menjadi salah satu bagian terbaik kisahku. Sahabat-sahabatku, tim terbaik sepanjang masa, Emil dan Rosita (kita tak pernah berpisah), Ika (suporter terbaik), Gema (pasti bisa!), Jenk-Q (apalagi yang mesti dicari? itu kamu!), Gudel (untuk segenap kisah), Arif (tak adakah yang tersisa?) Om Sur (kita punya sayembara warung kopi untukmu, tapi saatnya belum tiba), Ridho (mari ber-NU;), Frido (inilah dunia!), Kaji (monggo..), Adi, Paimo, Nanin, Diana, Inul, Laras, Bang Roma, Caesar (kita akan berjumpa lagi), Aisyah, Oni, Ana, Rohadi;
9. Segenap keluarga Gapus yang tercinta: Pak Huri (salam hormat, terima kasih, terima kasih..), Mas Acong, Pak Ribut, Mas Aziz, Pak Bandeng



(terima kasih), Pak Ndog, Mas Kadir, Pak Jek-Bu Den+Ninis, Mbak Anik, Pak Bos, Pak Pitik, Pak Yus, Asep, Nunung, Galih, Rayi, Ndon (bangun, hari sudah berganti), Maman, Kharis, Wildan, Katok, Joko, Ganjar, Trisna, Po, Shondi, Ma2d;

10. Keluarga kecilku 44 A yang bahagia, “kebersamaan tak berakhir”: Noeng (terima kasih untuk penjajahan atas notebook yang tak berperikemanusiaan), Emil, Mommy (di antah berantah, pulanglah..), Hence-Anton + Afin (terima kasih semangatnya);

11. Sahabat-sahabat di Xmudah '01: Mamie, Aan, Mas Atik, Faizin, Aam, Qomari, Mahrus, Emon, Cak Aji, Jeffry, dan semua yang tak bisa disebut satu per satu, terima kasih doa dan dukungannya, semoga kebersamaan itu tak pernah berubah;

12. Mbak Siti, untuk membuat saya tak pernah merasa sendiri di ruang baca, Mbak Aci, untuk berbagai kesempatan, Pak Sis, untuk kesabarannya;

13. Segenap keluarga besar Sastra Indonesia dari masa ke masa;

14. Semua pihak yang mungkin tanpa sengaja terlewat, maaf dan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga bermanfaat.

Surabaya, 27 Juni 2008

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Parodi atas Realitas Politik Indonesia pada Era Reformasi Matinya Toekang Kritik* (MTK) karya Agus Noor. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan parodi yang tampak dalam struktur *Matinya Toekang Kritik*, parodi atas realitas politik Indonesia pada era reformasi yang ditampilkan dalam *Matinya Toekang Kritik*, serta makna yang dapat diperoleh dalam *Matinya Toekang Kritik* di balik bentuk parodi yang dipilih sebagai gaya penyampaiannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang menekankan pada wilayah analisis isi.

Teori yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah teori semiotika yang dikembangkan oleh Riffaterre dan pemahaman tentang konsep parodi. Teori intertekstualitas digunakan untuk mengidentifikasi parodi dalam teks dengan cara menyejajarkan teks dengan konteks. Hasil identifikasi parodi dalam struktur MTK menunjukkan bahwa naskah-naskah tersebut adalah parodi atas realitas politik. Realitas politik yang diparodikan dalam naskah MTK adalah berbagai permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia, terutama sejak era reformasi.

Model dalam MTK adalah kritik atas kondisi kesehatan, kritik atas kebijakan pemerintah yang tidak memihak kaum lemah, intropeksi atas praktik-praktik perselingkuhan yang terjadi, kritik atas masalah korupsi yang semakin berkembang, kritik atas ketidakpedulian pemerintah terhadap kritik, kritik atas ketidakwaspadaan terhadap bahaya Orde Baru, dan kritik atas sikap represif pemerintah terhadap kritik. Dengan demikian, matriks dalam MTK adalah introspeksi dan kritik atas realitas politik yang kacau.

Parodi yang digunakan dalam MTK tersebut bermakna sebagai ekspresi yang estetis, kritis, dan reflektif. Estetis dalam arti ada bentuk-bentuk yang mengacu pada keindahan teks sehingga teks MTK tidak bersifat seperti ceramah, tetapi bisa membawa semua orang untuk bersama-sama terlibat di dalamnya. Kritis mengandung pengertian bahwa naskah ini bukan semata-mata bacaan yang hanya akan berhenti di meja atau di tempat tidur setelah dibaca, naskah ini merupakan suara-suara yang harus didengarkan. Reflektif berarti suara yang ada dalam teks tidak hanya untuk didengarkan saja, tetapi juga untuk menjadi bahan perenungan semua pihak untuk selanjutnya diharapkan dapat membawa perubahan seperti yang diharapkan.

**Kata kunci:** teks, konteks, parodi, realitas politik, estetis, kritis, reflektif.

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka.....	6
1.6. Landasan Teori.....	9
1.6.1 Semiotika.....	9
1.6.2 Konsep Parodi.....	15
1.7. Metode Penelitian.....	16
1.8. Sistematik Penyajian.....	19
<b>BAB II Identifikasi Parodi Dalam Struktur <i>Matinya Toekang Kritik</i>.....</b>	<b>20</b>
2.1 Amanat Calon Menteri Kesehatan RI (ACMKRI).....	24
2.2 Pelajaran Bahasa Untuk Pemimpin Bangsa (PBUPB).....	33
2.3 Negeri Para Peselingkuh (NPP).....	41
2.4 Koruptor Kita Tercinta (KKT).....	48
2.5 <i>Matinya Toekang Kritik</i> .....	57
2.6 Tuan Politikus Sowan Raja Jin (TPSRJ).....	72
2.7 Buket Hitam (BH).....	81
<b>BAB III Parodi atas Realitas Politik dalam <i>Matinya Toekang Kritik</i>.....</b>	<b>91</b>
3.1 Parodi atas Realitas Politik dalam <i>Matinya Toekang Kritik</i> .....	91
3.1.1 Parodi atas Praktik Korupsi.....	92
3.1.2 Parodi atas Praktik Kolusi.....	101
3.1.3 Parodi atas Kebijakan Pemerintah.....	107
3.1.4 Parodi atas Respon Pemerintah Terhadap Kritik.....	109
3.1.5 Parodi atas Perilaku Politikus.....	111
3.2 Model dan Matriks dalam <i>Matinya Toekang Kritik</i> .....	113
3.3 Parodi Sebagai Ekspresi Estetis, Kritis, dan Reflektif.....	113
<b>BAB IV Simpulan.....</b>	<b>118</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>122</b>
<b>Lampiran-lampiran.....</b>	<b>124</b>

**Daftar Tabel**

<b>Tabel 1. Relasi Antara ACMKRI-Masalah Kesehatan di Indonesia.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 2. Relasi Antara Yus Badudui dan J.S. Badudu.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 3. Relasi Perselingkuhan dalam PP dan Perselingkuhan di Indonesia.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4. Relasi Sang Koruptor dan Soeharto .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 5. Relasi Raja Jin dan Soeharto.....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 6. Relasi Munir dalam naskah BH dan Munir S.H. ....</b>	<b>87</b>

**Daftar Lampiran**

Lampiran 1 .....	124
Lampiran 2 .....	126
Lampiran 3 .....	132
Lampiran 4 .....	134

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## BAB I

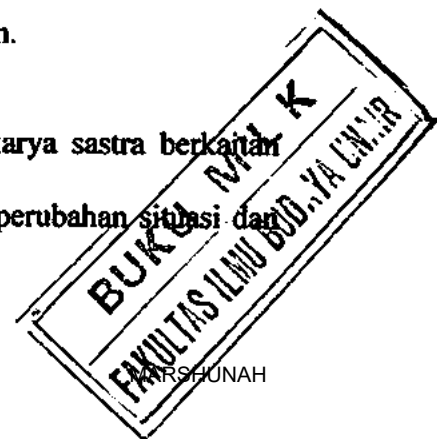
### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu karya sastra lahir sebagai hasil kreativitas pengarang. Pengarang adalah anggota dari suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa suatu karya sastra merupakan cermin dari keadaan sosial suatu masyarakat tertentu, yaitu suatu masyarakat yang pengarang tersebut termasuk sebagai bagiannya.

Kreativitas pengarang yang ditampilkan melalui karya sastra bersifat imajinatif, akan tetapi konsep imajinatif yang dimaksud tidak dipahami sebagai khayalan yang melulu hadir sebagai hasil imajinasi tanpa didasari oleh kenyataan atau realitas tertentu. Sebaliknya, imajinasi dalam karya sastra adalah imajinasi yang didasarkan atas kenyataan. Karya sastra merupakan pengalaman pengarang. Pengalaman adalah jawaban atau respon dari jiwa seorang pengarang ketika kesadarannya bersentuhan dengan realitas. Realitas yang dimaksud ialah sesuatu yang dapat merangsang atau menyentuh kesadaran manusia, baik yang berada di dalam dirinya maupun yang berada di luar dirinya. Realitas itu dapat berupa peristiwa yang dialami sendiri ataupun yang disaksikan, dapat pula berupa gagasan-gagasan. Semua itu menyentuh kesadaran pengarang yang kemudian direspon atau ditanggapi melalui karya sastra yang dihasilkan.

Realitas yang paling banyak diungkapkan dalam karya sastra berkaitan dengan realitas sosial dan politik. Dalam sastra Indonesia, perubahan situasi dan



kondisi politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan karya sastra. Misalnya perubahan situasi politik dari era Orde Baru ke era reformasi. Euforia reformasi rupanya berpengaruh pada dunia kesusastraan Indonesia. Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke BJ Habibie lalu KH Abdurahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri, muncul wacana tentang Sastrawan Angkatan Reformasi. Pada masa ini, muncul karya-karya sastra, puisi, cerpen, novel, maupun drama yang bertema sosial-politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra Harian Republika, misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial-politik.

Karya sastra pada masa tersebut banyak merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatâr belakangi kelahiran karya-karya sastra—puisi, cerpen, novel, dan drama—pada saat itu. Bahkan, penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik, seperti Sutardji Calzoum Bachri, Ahmadun Yosi Herfanda dan Acep Zamzam Noer, juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial-politik mereka.

Selain nama-nama di atas, salah satu sastrawan yang dikenal dengan tema-tema sosial dan politik di dalam karya-karyanya pada masa tersebut adalah Agus Noor. Dalam cerpen-cerpennya, Agus Noor dikenal sebagai peramu tema-tema sosial, politik, dan kemanusiaan melalui bahasa-bahasa “gelap” dan sarat simbol.



Eksistensi Agus Noor dalam menulis cerpen dapat dilihat melalui karya-karyanya yang cukup menarik perhatian peminat dan pemerhati sastra Indonesia. Setelah sebelumnya dikenal sebagai cerpenis, pada tahun 2006, Agus Noor meluncurkan karya berupa drama yang berjudul *Matinya Toekang Kritik*.

Dibandingkan dengan prosa dan puisi, naskah drama memang sangat jarang diterbitkan. Hal itu terjadi karena seringkali naskah drama yang pada dasarnya memang dibuat untuk dipentaskan berhenti sampai di panggung saja, dalam arti tidak ada pendokumentasian naskah-naskah yang sudah dipentaskan tersebut dalam bentuk buku. Dalam situasi demikian, *Matinya Toekang Kritik* seakan menjawab kebutuhan ranah kesusastraan Indonesia atas dokumentasi naskah drama. Seluruh naskah drama dalam buku ini sebelumnya sudah pernah dipentaskan sehingga pengarang menyebutnya sebagai dokumentasi. Walaupun demikian, ia berharap naskah-naskah monolog ini dapat tetap dinikmati sebagai sebuah karya yang mandiri, yang menyediakan ruang interpretasi bagi pembaca.<sup>1</sup>

Apabila dibandingkan dengan cerpen-cerpen karya Agus Noor tersebut, naskah drama ini terasa sedikit lebih “terang” walaupun tetap sarat dengan simbol-simbol. Tema yang dominan dalam drama ini masih berkuat pada masalah politik. Satu hal mencolok yang membedakan antara drama dan cerpen-cerpen Agus Noor adalah gaya penyajian atau gaya bahasa yang dipakai. Apabila dalam cerpen-cerpennya Agus Noor cenderung menggunakan bahasa “serius” untuk mengungkapkan hal yang serius, dalam drama hal-hal serius tersebut disampaikan melalui humor yang ia ciptakan dari permainan-permainan

---

<sup>1</sup> Seperti dikemukakan oleh Agus Noor dalam pengantar *Matinya Toekang Kritik*.

bahasa. Ignas Kleden menyebut gaya bahasa yang digunakan sebagai parodi.<sup>2</sup> Parodi adalah peniruan tingkah laku dan ucapan orang lain secara dilebih-lebihkan, semacam karikatur dalam diksi dan gestikulasi, sehingga peniruan itu memberikan efek yang lebih bersifat lucu dan sinis daripada usaha yang dilakukan dengan maksud yang sungguh-sungguh. Parodi merupakan suatu peralatan berbahasa dalam seni panggung. Pada dasarnya, parodi tidak dapat dilepaskan dari teks sebelumnya, baik teks dalam arti yang sesungguhnya maupun teks yang berupa konteks, karena parodi adalah respon atas teks yang sudah ada.

Parodi yang digunakan dalam *Matinya Toekang Kritik* merupakan salah satu hal yang menarik dalam naskah tersebut. Apabila dirumuskan, beberapa hal yang menarik dalam *Matinya Toekang Kritik* dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, bentuk yang unik. *Matinya Toekang Kritik* menggunakan bentuk monolog dan *monoplay*. Dalam perkembangan sastra Indonesia beberapa tahun terakhir, naskah monolog dapat dikatakan belum ada yang diterbitkan. Keunikan bentuk ini juga tampak pada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dalam *Matinya Toekang Kritik* sebagian besar bukan tokoh individu, melainkan tokoh yang mewakili karakter-karakter tertentu. *Kedua*, naskah-naskah dalam *Matinya Toekang Kritik* sangat fleksibel dalam hal kemungkinan pementasan. Bentuknya yang sederhana tidak menuntut konsep megah dalam pementasannya, artinya pertunjukan tidak selalu harus ditampilkan secara utuh, lengkap, dan kolosal. Bahkan beberapa naskah disebutkan pernah dimainkan secara garingan. *Ketiga*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penggunaan parodi dalam

---

<sup>2</sup> Diungkapkan oleh Ignas Kleden dalam sebuah ulasan panjang tentang *Matinya Toekang Kritik* yang sekaligus menjadi kata pengantar dalam buku tersebut.

mengungkapkan realitas politik. Penggunaan parodi ini membuat realitas politik yang sebenarnya berat dan (mungkin) tabu untuk dibicarakan menjadi bahan lelucon. Selain itu, lelucon yang digunakan sangat kontekstual dan terikat waktu sehingga pengarang merasa perlu memberi pengarahannya untuk melakukan perubahan lelucon yang digunakan ketika konteks dan waktu berubah.<sup>3</sup>

Beberapa hal yang telah disebutkan di atas membuat *Matinya Toekang Kritik* layak untuk diteliti. Pada dasarnya, penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan makna di balik keunikan-keunikan *Matinya Toekang Kritik* yang telah diungkapkan tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana parodi yang tampak dalam struktur *Matinya Toekang Kritik*?
2. Bagaimana parodi atas realitas politik Indonesia pada era reformasi yang ditampilkan dalam *Matinya Toekang Kritik*?

---

<sup>3</sup> Hal ini diungkapkan oleh pengarang dalam sebuah wawancara singkat dengan penulis.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan parodi yang tampak dalam struktur *Matinya Toekang Kritik*, parodi atas realitas politik Indonesia pada era reformasi yang ditampilkan dalam *Matinya Toekang Kritik*, serta makna yang dapat diperoleh dalam *Matinya Toekang Kritik* di balik bentuk parodi yang dipilih sebagai gaya penyampaiannya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alternatif bagi pembaca dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi, terutama persoalan yang berkaitan dengan masalah sosial politik.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

*Matinya Toekang Kritik* (selanjutnya disebut MTK) karya Agus Noor ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Lamalera pada bulan Februari tahun 2006. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti, buku ini belum pernah dibahas dalam penelitian ilmiah. Tanggapan-tanggapan yang muncul terhadap MTK lebih banyak berupa hasil wawancara, artikel, dan esai di media massa. Itu pun tidak mengarah pada teks tetapi lebih mengarah pada pembahasan pentas MTK yang telah dilakukan di beberapa kota.

Menurut Achiar M. Permana ([www.korantempo.com](http://www.korantempo.com)) *Matinya Toekang Kritik* berkisah tentang Raden Mas Suhikayatno, seorang tukang kritik nomor wahid yang bermartabat. Ia selalu konsisten mengkritik berbagai hal.

Bagi Raden Mas Suhikayatno, segala hal di dunia ini tidak ada yang benar sehingga harus dikritik. Walaupun demikian, kadang-kadang ia merasa lelah dan ingin berhenti mengkritik. Akan tetapi, satu menit saja tidak mengkritik, mulutnya langsung langsung terasa pegal. Satu hari tidak mengkritik, tubuhnya langsung dipenuhi bisul. Kegalauan semacam itulah yang sering mengusik Raden Mas Suhikayatno. Apalagi ketika ia menyadari bahwa perannya sebagai tukang kritik, perlahan-lahan seperti hendak dihapus dari ingatan zaman. Ia merasa orang-orang mencibir sinis kepadanya dan ia merasa orang-orang menganggapnya tidak lebih hanya sebagai kutu pengganggu.

Dalam naskah MTK diceritakan bahwa pada awalnya Raden Mas Suhikayatno merupakan tukang kritik yang eksis karena tersedia begitu banyak persoalan yang dapat dijadikannya sebagai objek kritik. Akan tetapi menjelang akhir cerita, dia menemukan kesulitan untuk bertahan hidup. Perputaran waktu yang meloncat ke tahun 3035 membuat Suhikayatno "mati". Sebab, kehidupan pada masa itu telah berjalan sesuai dengan "aturan" dan serbamekanis. Tidak ada celah untuk dikritik.

Zaman yang telah berjalan sesuai dengan aturan adalah musuh besar seorang "toekang kritik". Sebab, pada situasi semacam itu tidak ada lagi persoalan yang dapat dijadikan sasaran kritik. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar para pengkritik akan kehilangan peran dan akhirnya "mati".

Lephen Purwaraharja juga memberikan tanggapan terhadap isi MTK. Menurutnya, MTK mengisahkan kehidupan kritikus RM Suhikayatno. Ia hidup dari zaman mitologi pewayangan sampai tahun 3000-an. Tokoh rekaan itu

bermakna sesuai akar kata pada namanya: “su” dalam bahasa Jawa Kuna berarti *sangat, baik, bagus, cantik, besar*; “hika” dalam bahasa Jawa Kuna sama dengan “hiku” yang berarti *itu*; “yatna” dalam bahasa Jawa Kuna memiliki arti *hati-hati, seksama, teliti, ingat-ingat, awas dan waspada*. Atau dari kata “hikayat” yang berarti karya sastra yang berisi kisah, baik berupa sejarah maupun fiksi untuk membangkitkan patriotisme, dan renungan bersama. *Matinya Toekang Kritik* berani mengkritisi berbagai fenomena kebudayaan; dari soal sejarah, politik, ekonomi, sampai sosial budaya. Ulah kritikus tersebut dapat melahirkan satir dan kritik baru dari hal-hal yang sifatnya nakal sampai yang konyol. Dibandingkan dengan teks monolog lain, *Matinya Toekang Kritik* tampak lebih berbobot pada aspek rangkaian peristiwa, pengaluran, penokohan, karakter tokoh, dan kemungkinan perkakas semiotika dalam teater seluruhnya meneguh dalam keutuhan (*unity*). Kejutan atau *surprise* berulang kali muncul sehingga menjadikan penonton (apresiator) tetap terjaga dalam menikmati pementasan. Selain itu, teks juga membuka ruang pada sutradara dan tim lainnya untuk menafsirkan secara lebih leluasa antara ‘teater serius’, ‘kritik satir’, dan ‘komedi kontemplatif’ ([www.kuaetnika.com](http://www.kuaetnika.com)).

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, diketahui bahwa tanggapan-tanggapan terhadap MTK lebih banyak ditujukan pada pementasan, tidak pada naskah atau teks. Tanggapan-tanggapan terhadap MTK tersebut semuanya berupa artikel di media massa, bukan penelitian ilmiah. Selain itu, tanggapan-tanggapan tersebut tertuju pada satu teks saja, yaitu teks MTK. Sementara teks-teks lain—yang juga sudah pernah dipentaskan—belum pernah mendapat tanggapan. Oleh

karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah pertama kali yang dilakukan terhadap teks MTK sebagai sebuah kumpulan yang memuat banyak naskah di dalamnya.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Semiotika**

Penelitian ini memanfaatkan teori semiotika yang dikembangkan oleh Michael Riffaterre dan telah diaplikasikannya secara langsung dalam puisi. Teori ini kemudian dikemukakan dalam karyanya yang berjudul *Semiotics of Poetry*. Secara garis besar menurut Riffaterre (1978:4), proses pemahaman terhadap sebuah karya sastra adalah sebuah manifestasi semiosis. Manifestasi segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda-tanda dari tingkat mimesis hingga ke tingkat signifikansi (penandaan) yang lebih tinggi. Fenomena sastra adalah dialektika antara teks dan pembaca. Sastra tidak pernah terlepas dari konsep teks sebagai wacana terbuka.

Apabila dirumuskan, teori semiotika Riffaterre secara umum memuat empat pokok pemikiran berkaitan dengan pemaknaan karya sastra.

*Pertama*, ketidaklangsungan ekspresi. Sastra merupakan salah satu aktivitas berbahasa. Bahasa sastra berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari bersifat mimetik, sedangkan bahasa sastra bersifat semiotik. Karya sastra mengekspresikan konsep-konsep dan hal-hal melalui ketidaklangsungan. Dengan kata lain, karya sastra menyatakan sesuatu dengan mengandung arti lain (Riffaterre, 1978:1). Ada tiga kemungkinan yang menjadi penyebab

ketidaklangsungan ekspresi, yaitu *displacing of meaning* (penggantian arti), *distorting of meaning* (penyimpangan dan perusakan arti), dan *creating of meaning* (penciptaan arti). Dikatakan penggantian arti apabila suatu tanda mengalami perubahan dari satu arti ke arti yang lain, ketika suatu kata mewakili kata yang lain. Dikatakan sebagai penyimpangan atau perusakan arti apabila terdapat ambiguitas, kontradiksi, atau nonsense. Dikatakan penciptaan arti apabila suatu tanda “keluar” dari tataran linguistik, bahkan tidak terlihat mempunyai arti. Di antara ketiga ketidaklangsungan tersebut, ada satu faktor yang senantiasa ada, yaitu semuanya tidak dapat begitu saja dianggap sebagai representasi realitas. Menurut Riffaterre (1978:2), representasi realitas hanya dapat diubah dengan jelas dan tegas dalam suatu cara yang bertentangan dengan kemungkinan atau konteks yang diharapkan pembaca atau bisa dibelokkan oleh tata bahasa atau leksikon yang menyimpang yang disebut *ungrammaticality* (ketidakgramatikaln). Dalam ruang lingkup sempit, ketidakgramatikaln berkaitan dengan bahasa yang dipakai di dalam karya sastra, misalnya pemakaian majas. Sebaliknya, dalam ruang lingkup luas, ketidakgramatikaln berkaitan dengan segala sesuatu yang “aneh” yang terdapat di dalam karya sastra.

*Kedua*, pembacaan heuristik dan hermeneutik. Manifestasi semiotik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda-tanda dari tingkat mimetik ke tingkat pemaknaan yang lebih tinggi (Riffaterre, 1978:4). Proses semiotik pada dasarnya terjadi di dalam pikiran pembaca sebagai hasil dari pembacaan tahap kedua. Sebelum mencapai tahap pemaknaan, pembaca harus menghadapi rintangan pada tataran mimetik. Proses dekoding karya sastra diawali dengan



pembacaan tahap pertama yang dilakukan dari awal hingga akhir teks. Pembacaan tahap pertama ini disebut sebagai pembacaan heuristik dan pada tahap inilah terjadi interpretasi tahap pertama. Pada tahap ini, kompetensi kesastraan dan kebahasaan berperan penting. Melalui kedua kompetensi tersebut, pembaca dapat mengenali adanya keanehan-keanehan dalam sebuah karya sastra, baik dalam hal kebahasaan maupun yang berkaitan dengan struktur karya sastra secara keseluruhan (Riffaterre, 1978:5).

Setelah melalui pembacaan tahap pertama, pembaca sampai pada pembacaan tahap kedua, yang disebut sebagai pembacaan retroaktif atau pembacaan hermeneutik. Pada tahap ini terjadi proses interpretasi tahap kedua, interpretasi yang sesungguhnya. Pembaca berusaha melihat kembali dan melakukan perbandingan berkaitan dengan apa yang telah dibaca pada proses pembacaan tahap pertama. Pembaca berada di dalam sebuah efek dekoding. Artinya, pembaca mulai dapat memahami bahwa segala sesuatu yang pada awalnya terlihat sebagai ketidakgramatikalitas ternyata merupakan fakta-fakta yang ekuivalen (Riffaterre, 1978:5-6).

Berkaitan dengan pembacaan heuristik dan hermeneutik, perlu dibedakan pengertian arti dan makna. Yang dimaksud dengan arti adalah semua informasi dalam tataran mimetik yang disajikan oleh teks kepada pembaca, sedangkan makna adalah kesatuan antara aspek bentuk dan semantik (Riffaterre, 1978:2-3). Secara sederhana, dapat dinyatakan bahwa "arti" sepenuhnya bersifat referensial sesuai dengan bahasa dan bersifat tekstual, sedangkan makna bisa saja "keluar" dari referensi kebahasaan dan mengacu kepada hal-hal di luar teks. Pada

pembacaan heuristik, pembaca hanya mendapatkan arti sebuah teks, sedangkan makna diperoleh ketika pembaca telah melampaui pembacaan retroaktif atau hermeneutik. Pergantian dari “arti” menjadi “makna” pada akhirnya memunculkan konsep interpretan, yaitu sebuah tanda yang “menerjemahkan” tanda-permukaan teks dan menjelaskan hal lain yang disajikan oleh teks (Riffaterre, 1978:81).

*Ketiga*, matriks, model, dan varian. Pada proses pembacaan tahap kedua dikenali adanya matriks, model, dan varian-varian. Karya sastra merupakan hasil transformasi matriks, yaitu sebuah kalimat minimal yang harafiah, menjadi bentuk yang lebih panjang, kompleks, dan tidak harafiah. Matriks bersifat hipotesis dan di dalam struktur teks hanya terlihat sebagai aktualisasi kata-kata. Matriks bisa saja berupa sebuah kata dan dalam hal ini tidak pernah muncul di dalam teks. Matriks selalu diaktualisasikan ke dalam varian-varian. Bentuk varian tersebut diatur oleh aktualisasi primer atau pertama, yang disebut model. Matriks, model, dan teks merupakan varian-varian dari struktur yang sama (Riffaterre, 1978:19). Kompleksitas teks pada dasarnya tidak lebih sebagai pengembangan matriks. Dengan demikian, matriks merupakan motor atau generator sebuah teks, sedangkan model menentukan tata cara pemerolehannya dan pengembangannya (Riffaterre, 1978:21).

*Keempat*, intertekstualitas. Interpretasi secara menyeluruh terhadap karya sastra hanya dilakukan oleh pembaca melalui interteks. karya sastra mengandung arti hanya dengan mengacu kepada teks-teks lain, baik teks secara harafiah maupun teks dalam pengertian universal. Pemaknaan karya sastra bersandar

sepenuhnya pada intertekstualitas dan untuk mengenalinya bergantung sepenuhnya pada kemampuan pembaca (Riffaterre, 1978:124).

Fenomena intertekstual tidak dapat dikenali tanpa membandingkan teks dengan generatormya, yaitu hipogram. Secara khusus, ada teks tertentu yang menjadi latar penciptaan sebuah karya sastra, yaitu hipogram. Sedangkan teks yang menyerap dan mentransformasi hipogram disebut teks transformasi. Hipogram merupakan sebuah sistem tanda yang berisi setidaknya sebuah pernyataan yang bisa saja sebesar sebuah teks, bisa hanya berupa potensi sehingga terlihat dalam tataran kebahasaan, atau bisa juga aktual sehingga terlihat dalam teks sebelumnya (Riffaterre, 1978:23). Kalimat inti hipogram bisa saja aktual atau tidak sama sekali (Riffaterre, 1978:25). Apabila hipogram merupakan teks yang aktual, dalam hal ini adalah karya sastra yang lain, kompetensi kebahasaan pembaca mungkin tidak cukup. Ketika pembaca mengenali hipogram dan menguraikan teks berdasarkan hipogramnya, interpretasinya tidak hanya berisi penguraian, tetapi juga kesadaran terhadap tradisi. Kesadaran ini mengarahkan pembaca kepada evaluasi estetikanya. Hipogram dapat dihasilkan dari ungkapan-ungkapan klise, kutipan dari teks-teks lain, atau sebuah sistem deskriptif (Riffaterre, 1978:63). Hipogram mengacu kepada realitas yang lain dan keberadaannya harus ditentukan sendiri oleh pembaca.

Beberapa hal yang menjadi titik penting dalam intertekstualitas tidak hanya membandingkan teks, tetapi mensejajarkan, kemudian mengontraskan teks transformasi dan hipogramnya. Proses tersebut menjadi jalan dalam menentukan

makna dan memahami karya sastra sehingga segala bentuk ketidakmengertian pembaca akan terungkap bila dilakukan intertekstualitas.

Hal terpenting dalam interteks adalah asosiasi pikiran ketika seorang membaca. Intertekstualitas sendiri merupakan suatu fenomena yang mengarahkan pembacaan teks baris per baris (yang mungkin menentukan interpretasi) untuk mendapatkan makna unsurnya. Atau pun pembacaan secara kebalikan baris per baris untuk mendapatkan makna wacana. Kedua cara pandang ini menyadarkan pembaca bahwa suatu karya sastra mengacu pada jalinan berupa teks-teks yang telah dikenal atau bagian-bagian teks yang muncul setelah terlepas dari konteksnya dan dapat dikenal atau bagian-bagian teks yang muncul setelah terlepas dari konteksnya dan dapat dikenali dalam konteksnya yang baru sehingga pembaca tahu bahwa teks tersebut telah ada sebelumnya, sebelum ia muncul dalam konteksnya yang baru tersebut. Akhirnya, makna hakiki dari teks didapatkan melalui penemuan intertekstualitas dalam temuan-temuan hipogram itu.

Sebuah karya sastra pada akhirnya merupakan bentuk respons terhadap karya-karya sebelumnya. Karya sebelumnya bisa diterima dan diadopsi lagi (repetisi) dalam transformasinya sebagai bentuk penerimaan atau afirmasi terhadap teks hipogram. Akan tetapi, juga bisa mengingkari (negasi) terhadap teks hipogram tersebut.

### 1.6.2 Konsep Parodi

Parodi merupakan salah satu idiom estetik yang merupakan sebagian dari kemungkinan penjelajahan estetik dalam diskursus seni posmodernisme. Dengan mengutip pernyataan Richard Poirier, Yasraf Amir Piliang (2003:190) menyimpulkan parodi sebagai suatu bentuk dialog yaitu satu teks bertemu dan berdialog dengan teks lainnya dengan tujuan mengekspresikan perasaan tidak puas, tidak senang, tidak nyaman berkenaan dengan intensitas gaya atau karya masa lalu yang dirujuk. Dalam kaitan ini, parodi menjadi semacam bentuk oposisi atau kontras di antara berbagai teks, karya, atau gaya lainnya dengan maksud menyindir atau membuat lelucon darinya. Sedangkan dalam *The Oxford English Dictionary* (Baldick, 1990:162), parodi didefinisikan sebagai sebuah komposisi dalam prosa atau puisi yang di dalamnya kecenderungan-kecenderungan pemikiran dan ungkapan karakteristik dalam diri seorang pengarang atau kelompok pengarang diimitasi sedemikian rupa untuk membuatnya tampak absurd, khususnya dengan melibatkan subjek-subjek lucu dan janggal, imitasi dari sebuah karya yang dibuat modelnya kurang lebih mendekati aslinya, akan tetapi disimpangkan arahnya, sehingga menghasilkan efek-efek kelucuan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa parodi merupakan salah satu bentuk imitasi. Menurut Linda Hutcheon (dalam Piliang, 2003:191), parodi memang satu bentuk imitasi, akan tetapi bukan imitasi murni. Ia mendefinisikan parodi sebagai satu bentuk imitasi, akan tetapi imitasi yang dicirikan oleh kecenderungan ironik. Parodi adalah pengulangan yang dilengkapi

dengan ruang kritik, yang lebih mengungkapkan perbedaan ketimbang persamaan.

Parodi sangat bergantung pada teks, karya, atau gaya masa lalu sebagai rujukan atau titik berangkatnya. Parodi menjadikannya sebagai titik berangkat dari kritik, sindiran, kecaman—sebagai ungkapan dari ketidakpuasan atau sekedar ungkapan rasa humor sehingga menghasilkan teks baru. Teks baru tersebut dihasilkan sebagai hasil dari sebuah sindiran, plesetan, atau unsur lelucon dari bentuk, format, atau struktur dari teks rujukan. Sebuah teks atau karya parodi biasanya menekankan aspek penyimpangan atau *plesetan* dari teks atau karya rujukan yang biasanya bersifat serius. Oleh sebab itulah, Mikhail Bakhtin (dalam Piliang, 2003:192) menyatakan parodi sebagai satu bentuk representasi, akan tetapi representasi yang lebih ditandai oleh pelencengan, penyimpangan, dan *plesetan* makna-representasi palsu (*false representation*). Sifat dan metode dalam menghasilkan pelencengan makna dan lelucon tersebut sangat kaya dan beraneka ragam. Parodi adalah satu bentuk dialogisme tekstual (*textual dialogism*), yaitu dua teks atau lebih bertemu dan berinteraksi satu sama lain dalam bentuk dialog. Dialog ini menurut Hutcheon, bisa berupa kritik serius, polemik, sindiran atau hanya sekedar permainan atau lelucon dari bentuk-bentuk yang ada.

### **1.7 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis isi. Dasar pelaksanaan dalam metode penelitian ini adalah penafsiran (Ratna, 2004:49). Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antarkonsep yang sedang dikaji secara empiris. Penelitian sastra lebih sesuai dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena karya sastra merupakan karya kreatif yang bentuknya senantiasa berubah dan tidak tetap yang harus diberi interpretasi (Semi, 1993:27).

Jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis isi pada prinsipnya menitikberatkan pada objektivitas dan realitas, melakukan klasifikasi pada teks agar dapat mengidentifikasi unsur-unsur di dalam teks secara substansial dengan menggunakan data dan teori yang ada. Adapun langkah-langkah penelitian terhadap naskah drama *Matinya Toekang Kritik* karya Agus Noor adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan teks yang dipakai sebagai objek penelitian, yaitu kumpulan naskah drama *Matinya Toekang Kritik* karya Agus Noor. Buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan oleh penerbit Lamalera pada bulan Februari tahun 2006.
- b. Menentukan korpus penelitian, yaitu tujuh naskah dari sembilan naskah yang terdapat dalam MTK. Ketujuh naskah tersebut dipilih berdasarkan keunikan bentuk, yaitu monolog dan *monoplay*, serta ciri khas masing-masing naskah dalam menghadirkan parodi, terutama melalui tokoh-tokohnya. Tujuh naskah tersebut adalah *Amanat Calon Menteri Kesehatan RI, Pelajaran Bahasa untuk Pemimpin Bangsa, Negeri Para Peselingkuh, Koruptor Kita Tercinta, Matinya Toekang Kritik, Tuan Politikus Sowan Raja Jin, dan Buket Hitam*.

- c. Mengumpulkan dan memahami data-data penelitian. Penelitian ini memiliki dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari kumpulan naskah drama *Matinya Toekang Kritik* karya Agus Noor, yaitu tujuh naskah yang telah ditentukan sebagai korpus penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data-data penunjang, baik berupa artikel maupun penelitian ilmiah yang diperoleh dari media massa, internet, dan perpustakaan.
- d. Melakukan analisis data, yaitu mengungkapkan bentuk parodi dalam struktur drama *Matinya Toekang Kritik* karya Agus Noor. Karena parodi berkaitan dengan teks sebelumnya, identifikasi dilakukan melalui proses penyejajaran yang merupakan langkah kerja dalam intertekstualitas. Setelah dilakukan penyejajaran, parodi dalam teks dapat ditemukan. Hasil penemuan parodi ini digunakan untuk mengungkapkan parodi atas realitas politik Indonesia pada era reformasi di dalam teks. Hasil pengungkapan tersebut digunakan untuk menemukan makna yang ada di balik parodi atas realitas politik yang disampaikan oleh pengarang.
- e. Merumuskan simpulan berdasarkan hasil pembahasan masalah.



### **1.8 Sistematis Penyajian**

Laporan penelitian ini terdiri atas empat bab dan secara garis besar disusun sebagai berikut:

- a. Bab I, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematis penyajian.
- b. Bab II, berisi analisis struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi parodi yang tampak dalam struktur teks drama *Matinya Toekang Kritik*.
- c. Bab III, berisi parodi atas realitas politik Indonesia pada era reformasi dalam drama *Matinya Toekang Kritik*.
- d. Bab IV, berisi simpulan penelitian.
- e. Daftar pustaka

## **BAB II**

# **IDENTIFIKASI PARODI DALAM STRUKTUR *MATINYA TOEKANG KRITIK***

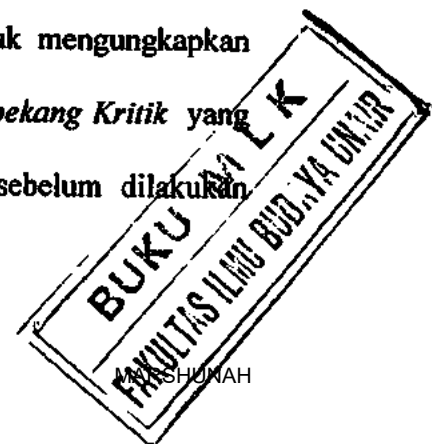
**BAB II**

**IDENTIFIKASI PARODI DALAM STRUKTUR**

***MATINYA TOEKANG KRITIK***

Struktur dalam karya sastra merupakan suatu susunan dari karya sastra, yakni aspek yang menyangkut keseluruhan karya tersebut yang juga meliputi peranan masing-masing bagian dalam keseluruhannya. Pemahaman terhadap struktur ini merupakan langkah kerja yang tidak dapat dihilangkan dan juga tidak harus dimutlakkan ada. Akan tetapi dalam penelitian yang mendasarkan pada karya sastra sebagai objeknya, pemahaman terhadap struktur teks diperlukan untuk memahami karya sastra secara lebih mendalam.

Sebagai parodi yang menjadi semacam bentuk oposisi atau kontras di antara berbagai teks, karya, atau gaya lainnya dengan maksud menyindir atau membuat lelucon, kumpulan naskah MTK tidak dapat dilepaskan dari teks-teks lain yang saling terkait. Keterkaitan tersebut dapat diketahui melalui identifikasi struktur teks yang memiliki relevansi dengan aspek di luar teks. Identifikasi dilakukan melalui proses penyejajaran yang akan dititikberatkan pada pandangan persamaan, perbedaan, dan relasi antara struktur teks transformasi dan struktur teks hipogram sebagaimana prinsip intertekstualitas. Selanjutnya, melalui penyejajaran inilah dapat ditemukan teks yang menjadi parodi dan teks yang “diparodikan”. Hasil penyejajaran kemudian digunakan untuk mengungkapkan parodi atas realitas politik dalam kumpulan drama *Matinya Toekang Kritik* yang merupakan tujuan utama penelitian ini. Oleh karena itu, sebelum dilakukan



analisis terhadap parodi atas realitas politik, terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi parodi yang tampak pada struktur teks.

Adapun struktur yang akan dibahas meliputi tokoh dan penokohan, latar, dan dialog. Ketiga unsur tersebut dipilih untuk dianalisis berdasarkan efektivitas dan kesesuaian dengan kebutuhan identifikasi parodi.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, objek dalam penelitian ini adalah tujuh judul naskah yang terkumpul dalam MTK. Ketujuh naskah tersebut terbagi dalam dua bentuk, yaitu monolog dan *monoplay*. Perbedaan kedua bentuk tersebut terletak pada tokoh. Dalam bentuk monolog terdapat satu orang tokoh, sedangkan bentuk *monoplay* memungkinkan adanya tokoh lebih dari satu. Akan tetapi, tokoh-tokoh tersebut harus diperankan oleh aktor yang sama.<sup>4</sup> Di sinilah tampak perbedaan antara tokoh di dalam drama dengan tokoh pada genre sastra yang lain. Dalam drama, tokoh mengandung pengertian tokoh sebagai pemeran dan tokoh sebagai karakter. Sebagai pemeran, tokoh merujuk pada individu yang memerankan suatu karakter tertentu, sedangkan tokoh sebagai karakter merujuk pada tokoh yang diperankan oleh individu tersebut.

Pada bab terdahulu telah disebutkan bahwa MTK merupakan dokumentasi naskah-naskah yang sudah pernah dipentaskan. Kumpulan naskah sebagai dokumentasi ini tampak pada penyebutan tokoh dalam tiap-tiap naskah. Sedianya, naskah-naskah ini sebagian besar ditulis untuk dipentaskan oleh Butet Kartaradjasa sebagai pemeran tunggal (Noor, 2006:xv). Oleh karena itu, tokoh dalam naskah-naskah tersebut sebagian ditulis dengan BK yang merupakan

---

<sup>4</sup> Berdasarkan wawancara peneliti dengan Joko Bibit, aktor dan sutradara Teater Ruang, Solo.

singkatan dari nama Butet Kartaradjasa. Oleh peneliti, BK tersebut dipahami sebagai individu pemeran. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap tokoh sebagai karakter, bukan terhadap tokoh sebagai pemeran sehingga pada analisis tokoh tidak disebutkan nama BK, tetapi disebutkan tokoh yang diperankan oleh BK.

Pemahaman terhadap tokoh dan penokohan dalam naskah drama dapat diperoleh melalui dialog-dialog dan teks samping sebagai narasi. Menurut Luxemburg (1992:203), pelukisan tokoh dan penokohan dapat dilakukan secara eksplisit dan implisit. Disebut secara eksplisit apabila seorang tokoh dilukiskan oleh komentator seorang pelaku lain. Ucapan-ucapan dari seorang tokoh mengenai seorang tokoh lain tidak selalu dapat dipercaya begitu saja. Tetapi sekurang-kurangnya ucapan-ucapan yang demikian mengandung sebuah penafsiran. Seorang tokoh juga dapat melukiskan dirinya sendiri, misalnya dalam sebuah monolog atau dalam sebuah ucapan samping. Sedangkan pelukisan tokoh secara implisit terjadi melalui perbuatan dan ucapan.

Latar atau *setting* dalam naskah drama adalah penggambaran konstruksi ruang yang harus dibangun saat pementasan. Hal ini bukan berarti latar dalam naskah drama adalah suatu hal yang dinafikan adanya karena konstruksi ruang tetap merupakan wujud dari konstruksi latar sebagaimana umumnya. Ada dua kemungkinan yang mengindikasikan ruang dalam naskah drama, yakni ungkapan-ungkapan para tokoh dalam teks atau dipaparkan secara naratif yang menunjukkan bahwa ruang itu ada (Luxemburg, 1992:172). Perwujudan naratif mengenai ruang ini dideskripsikan melalui teks samping.

Hal paling mendasar yang membedakan drama dengan genre sastra lainnya adalah dialog. Menurut Soemanto (2002:42), karena teks lakon tidak memiliki narasi, jalan dan peristiwa dalam naskah drama hanya dapat diteliti melalui dialog-dialog. Oleh karena itu, dialog dalam drama merupakan sumber utama untuk menggali segala informasi tekstual. Senada dengan Soemanto, Luxemburg (1992:160) menyebut dialog dalam sebuah drama sebagai situasi bahasa utama. Dialog-dialog merupakan bagian terpenting dalam sebuah drama, dan sampai taraf tertentu ini juga berlaku bagi monolog-monolog. Pada pokoknya sebuah drama terdiri atas teks-teks para aktor.

Pembahasan mengenai dialog juga berkaitan dengan gaya. Gaya mengandung beragam pengertian, tapi semua pengertian tentang gaya dibahas sebagai suatu bagian retorika. Hal ini berarti bahwa gaya dianggap sebagai salah satu sarana yang didapat dan dipergunakan oleh pengarang untuk mencapai tujuannya sehingga setiap pengarang dalam membentuk teks selalu mempunyai gaya tersendiri.

Pendapat yang paling umum adalah yang mendefinisikan gaya sebagai variasi. Gaya ialah segala sesuatu yang memberikan ciri khas kepada sebuah teks, menjadikan teks itu semacam individu bila dibandingkan dengan teks-teks lainnya. Ciri khas tersebut salah satunya tampak pada bahasa yang digunakan.

Di dalam bahasa yang diperhatikan adalah gaya yang dipakai penulisan, terikat atau tidak pada kaidah-kaidah bahasa. Ada beberapa jenis gaya yang memungkinkan ada dalam bahasa sebuah naskah drama, antara lain bentuk dialek dan idiolek, bentuk puisi, bentuk lirik musik, dan lain-lain (Tambajong, 1981:28).

Selain dialog, naskah drama juga tidak dapat dilepaskan dari teks samping atau teks tambahan. Teks samping merupakan petunjuk pelaksanaan pementasan. Bagi pembaca, teks samping memungkinkan pembaca dapat membayangkan bentuk pementasan secara utuh.

Soemanto (2002:43), dengan mengutip pendapat Roman Ingarden mengemukakan bahwa pada teks drama, pada umumnya, dapat dilihat adanya dua unsur pokok. Yang pertama disebut *haupttext*, yakni *primary text* atau teks utama yang berwujud dialog tokoh-tokoh, sedangkan yang kedua disebut *nebentext*, yakni *ancillary text* atau teks tambahan yang sering juga disebut teks pembantu atau teks samping.

Berbagai unsur dalam teks yang telah disebutkan di atas akan dianalisis dengan cara disejajarkan dengan teks hipogram (konteks) yang data tertulisnya diperoleh melalui media massa. Unsur-unsur di atas tidak akan dianalisis secara parsial, tetapi dilakukan secara keseluruhan. Pembahasan pada bab ini akan dilakukan secara langsung per judul naskah.

## 2.1 Amanat Calon Menteri Kesehatan RI (ACMKRI)

Dalam naskah berjudul *Amanat Calon Menteri Kesehatan RI (ACMKRI)* dihadirkan tokoh Tukang Obat Keliling. Ia seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Walaupun begitu, dia masih tampak sehat, kuat, dan tidak berpenyakit sehingga ia sanggup lama-lama “berpidato” menawarkan dagangannya.

BK:

Lihat saja hasilnya... Tubuh saya sehat. Kuat. Nggak ada penyakit. Paling panu dan sedikit kutil (Noor, 2006:7).

Tukang obat berasal dari golongan ekonomi bawah, berpendidikan terakhir STM bidang permesinan. Walaupun berasal dari kalangan ekonomi bawah dan tingkat pendidikan menengah, ia memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu menjadi Menteri Kesehatan RI. Cita-cita itu didasari oleh rasa keprihatinan terhadap kondisi kesehatan di Indonesia.

Tukang Obat memiliki pengetahuan yang luas dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan kesehatan. Hal itu dapat dilihat dari cara dia berbicara. Selain itu, ia adalah seorang yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan memiliki keberanian mengkritisi hal-hal yang dirasa tidak benar. Tukang Obat kritis terhadap berbagai permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia, terutama masalah kesehatan. Beberapa permasalahan tersebut diungkapkan Tukang Obat dalam ACMKRI seperti tampak dalam kutipan berikut:

BK:

...

Dulu, yang datang ke dokter itu kan biasanya orang yang lagi sakit. Sekarang ini, orang yang sehat juga banyak kok yang datang ke dokter, dan malah ingin dinyatakan sakit! Mereka datang ke dokter bukan supaya sembuh, tapi supaya dinyatakan sakit. *Gendheng* (gila) kan? Orang sehat kok pingin dinyatakan sakit. Yaa, tapi ini cuma terjadi pada beberapa orang sih, terutama mereka-mereka yang lagi kesandung kasus korupsi. Biasanya mereka langsung ingin dinyatakan sakit oleh dokter, biar dapat mangkir di persidangan dan mendapatkan “status penangguhan penahanan” (Noor, 2006:3-4).

BK:

...

Makanya, Anda lebih baik jangan sakit, ya. Apalagi kalau Anda itu termasuk dalam kategori “orang yang kurang beruntung secara finansial”; atau termasuk “warga yang belum memiliki kesempatan hidup makmur”. Alias *kere* (miskin)! Mau ngatain *kere* saja kok pakai istilah-istilah yang keren dan mentereng!



Terus terang, ya Bapak Ibu..., di negeri ini, mau menjadi *kere* saja susah kok. Bener! Kalau Anda tak punya pekerjaan, tinggal di gubug reyot di kampung kumuh, sehari hanya berpenghasilan lima ribu perak sementara anak Anda lima belas—itu belum merupakan bukti kalau Anda miskin. Anda baru sah disebut miskin, kalau Anda sudah punya surat keterangan dari RT/RW sampai kelurahan. Mau dapat status *kere* saja mesti ngurus surat kayak sepeda motor. Namanya SKTM: Surat Keterangan Tidak Mampu. Tanpa SKTM, kalau Anda atau anak Anda sakit, dan ngaku-ngaku miskin datang ke rumah sakit, sudah pasti tidak akan diterima. Paling-paling Anda mendapat fasilitas gratis: menginap di koridor Rumah Sakit (Noor, 2006: 4-5).

BK:

...

Barangkali ini yang disebut *men sana* tapi tidak *in copore sano*. Di dalam badan yang kuat, belum tentu terdapat jiwa yang sehat. Ada kesenjangan antara badan dan jiwa. Ada kesenjangan antara bangsa dan negara. Ada kesenjangan antara pejabat dan rakyatnya. Dalam soal makanan dan pendapatan, misalnya. Soal makanan, bagi rakyat kita cukup: “empat sehat, lima sempurna”. Itu sudah nikmat. Tetapi bagi para pejabat, yang dinamakan nikmat itu: “empat sehat, lima kali lipat jumlah komisinya”.

Akibat dari semua itu sudah jelas: kesenjangan di bidang sosial dan bidang kesehatan yang merata di mana-mana. Meski sebenarnya oleh WHO, kita ini sudah cukup memperoleh pujian. Kita dipuji cukup lamban menekan angka kematian ibu dan bayi. Kita dipuji berhasil meningkatkan gejala kekurangan gizi pada balita, hingga kini banyak yang menderita lumpuh layuh dan busung lapar. Belum lagi demam berdarah, virus HIV/AIDS, serta epidemi korupsi yang makin meningkat prosentasenya. Anda tahu, di negeri ini, korupsi sudah seperti penyakit panu: membuat kita malu, tetapi kita hanya menutupinya dengan memakai baju baru (Noor, 2006:14).

Masalah kesehatan yang diungkapkan dalam naskah tersebut bermacam-macam. Di antaranya, surat sakit yang tidak “tepat sasaran” dan disalahgunakan, birokrasi yang berbelit-belit bagi rakyat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, “kerjasama” dalam bisnis obat-obatan antara dokter dan penjual obat, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, gizi buruk

pada balita, demam berdarah, dan HIV/AIDS. Seperti diketahui, masalah-masalah kesehatan tersebut sedang dihadapi Indonesia. Hal itu bisa dilihat pada beberapa kutipan berita di bawah ini.

...

Aspek prosedural lainnya yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku korupsi adalah surat sakit bagi tersangka dan saksi, izin atasan dalam memeriksa kasus korupsi, dan tidak adanya pembatasan upaya hukum. Surat sakit yang seringkali dengan mudah diterbitkan oleh dokter (terlepas benar-benar sakit atau tidak) perlu ditertibkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan menerbitkan Pedoman Penerbitan Surat Sakit (bagi tersangka/terdakwa dan saksi) yang didasarkan pada etika dan tanggung jawab profesi yang tinggi. Adapun ketentuan izin atasan dalam memeriksa kasus korupsi wajib dihapuskan/ditiadakan.

Mengenai upaya hukum (banding, kasasi, atau peninjauan kembali/PK) untuk kasus korupsi perlu dibatasi. Apabila tidak dibatasi, pelaku korupsi akan banyak "bermain" dengan cara mengulur-ulur waktu dan berlindung di balik asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sayangnya, surat sakit, izin atasan, dan pembatasan upaya hukum tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 maupun UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karenanya, penyempurnaan kedua undang-undang itu perlu menyertakan juga aspek prosedural ini ([www.korantempo.com](http://www.korantempo.com)).

...

Ada pasien miskin yang tak mendapat pelayanan, sementara ada pasien mampu yang justru mendapat kartu Askeskin. Kontras itu diakui menjadi salah satu bentuk penyimpangan dalam program Askeskin. Proses verifikasi peserta yang tidak sempurna diduga kuat menjadi penyebabnya.

Boleh dikatakan, banyak kaum miskin di Tanah Air yang justru tak mendapat pelayanan Askeskin lantaran minimnya informasi. Persoalan lainnya adalah masyarakat miskin enggan mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Mereka merasa berat dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat dua kartu kependudukan tersebut. Padahal, dua kartu pengenal identitas diri itu penting buat mendapatkan surat keterangan tidak mampu yang bisa dipakai untuk memperoleh pengobatan gratis.

Sementara untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), ternyata harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.

Mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, puskesmas hingga ke Dinas Kesehatan setempat. Setelah proses panjang itu dilewati, barulah si pasien pemegang kartu Askeskin bisa berebut antrean dengan ribuan pasien miskin lain di rumah sakit.

Ibu Een, umpamanya. Tim Sigi mengikuti wanita itu ketika mengurus SKTM agar bisa mendapat pengobatan gratis tumor mata yang dideritanya. Terkadang, ia harus mendapat pelayanan ketus dari petugas. Di sebuah puskesmas, ia bahkan dipungut biaya administrasi dua ribu rupiah. Dan anehnya, tanpa selebar kuitansi pun dari petugas.

Untuk bisa sampai ke rumah sakit dengan kartu berobat bagi warga miskin seperti Ibu Een paling tidak memerlukan waktu dua hingga tiga hari. Ini belum termasuk antrean panjang dan kemungkinan dirujuk ke rumah sakit lain oleh petugas di rumah sakit pertama ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)).

...

Sementara itu penderita HIV/AIDS di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan meningkat tajam, khususnya penularan melalui jarum suntik dan narkoba, sehingga diperlukan upaya penanganan yang sungguh-sungguh agar penderita penyakit ini tidak lagi bertambah.

Menurut pemerhati masalah penyakit ini, Daniel, data statistik menunjukkan jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia kira-kira 4.000 orang, sedangkan Departemen Kesehatan menyebutkan jumlah penderitanya mencapai 130 ribu lebih. Sekalipun, ada dugaan kuat bahwa angka yang sesungguhnya lebih besar lagi ([www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)).

...

Pangkal masalah mahalnya harga obat mudah ditelusuri. Saat ini ada lebih dari 200 produsen obat besar dan kecil di Indonesia, sementara konsumsi tidak seberapa, bahkan kalah jauh dibandingkan Kuwait yang memiliki penduduk cuma tiga juta jiwa.

Hal ini kemudian menciptakan persaingan tidak sehat di antara perusahaan farmasi yang ada. Mereka berlomba-lomba merayu dan melobi dokter, rumah sakit serta apotek, agar obat mereka menjadi acuan utama dalam pemberian obat kepada pasien. Jika berbagai kiat melariskan produk itu masih dalam koridor etika kedokteran yang ada, tentu bisa menerima. Namun yang terjadi sebaliknya.

Sejumlah sales obat yang kerap berhubungan dengan dokter atau rumah sakit menyebutkan bahwa memberikan bonus atau hadiah kepada dokter sesuatu yang wajar bagi mereka. Jangan pula kaget kalau servis yang diberikan kini semakin dahsyat. Mulai dari tawaran potongan harga besar-besaran, hadiah mobil, komisi bulanan, berlibur ke luar negeri hingga menyuguhkan wanita penghibur.

Denny Wahyudi, seorang manajer sebuah produsen obat menilai semua kiat itu bisa diterima dari sisi bisnis, meski dari sudut pandang etika tidak benar karena sangat merugikan konsumen obat. "Tapi bagaimana lagi, orientasi dokter sekarang memang bisnis. Jarang sekali kita melihat dokter yang idealis dalam menjalankan misi mereka," paparnya ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)).

Kutipan berita tersebut memaparkan sebagian masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia, di antaranya penyalahgunaan "surat sakit" oleh terpidana kasus korupsi, birokrasi pelayanan kesehatan untuk rakyat kurang mampu yang berbelit-belit, meningkatnya angka penderita HIV di Indonesia, juga "permainan" dokter dan penjual obat dalam memperoleh keuntungan. Masalah "permainan" dokter dan penjual obat ini diparodikan *Tukang Obat* dengan menjadikannya sebagai alasan pencalonan menjadi Menteri Kesehatan RI.

Saya mencalonkan sekaligus mengangkat diri saya sebagai "Calon Menteri Kesehatan Republik Indonesia", karena saya tergugah oleh situasi kesehatan kita. Saya bukan dokter. Bukan paramedis. Saya hanyalah tukang jualan obat. Saya kira, inilah justru kelebihan saya. Karena bila nanti saya benar-benar jadi Menteri Kesehatan, saya jadi tahu secara persis seluk beluk bisnis jualan obat. Hingga saya bisa tahu secara persis bagaimana cara memosisikan diri untuk mengambil keuntungan dari perdagangan obat-obatan itu. Kita tahu, bisnis obat itu bisnis yang menggiurkan. Dan itulah daya tarik utama, kenapa saya ingin menjadi Menteri Kesehatan. Meski terus terang saja, boleh dibilang saya ini tak punya pengalaman dalam hal pengobatan atau pun penyembuhan. Paling banter, pengalaman saya di bidang "sembuh-menyembuhkan" hanya sebatas menyembuhkan orang kesurupan (Noor, 2006: 10-11).

Apabila digambarkan dalam sebuah tabel, keterkaitan naskah ACMKRI dengan masalah kesehatan di Indonesia tampak seperti di bawah ini.

ACMKRI	Masalah Kesehatan di Indonesia
Permainan koruptor dengan surat sakit	Permainan koruptor dengan surat sakit
Gizi buruk pada balita dan meningkatnya angka kematian ibu dan anak	Gizi buruk pada balita dan meningkatnya angka kematian ibu dan anak
Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS	Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS
Bisnis obat antara dokter dan perusahaan	Bisnis obat antara dokter dan perusahaan
Birokrasi berbelit-belit untuk pengobatan orang tidak mampu	Birokrasi berbelit-belit untuk pengobatan orang tidak mampu
Calon menteri kesehatan lulusan STM	Calon menteri kesehatan harus dokter

Tabel 1.  
Relasi ACMKRI dan Masalah Kesehatan di Indonesia

Dalam ACMKRI, masalah-masalah yang merupakan gambaran kondisi Indonesia tersebut disampaikan melalui dialog-dialog *Tukang Obat*. Dialog itu disampaikan sebagai bagian dari promosi obat-obatan dan juga dalam “pidato” pencalonannya sebagai Menteri Kesehatan RI. Seorang tukang obat keliling yang secara struktural tidak “memiliki tanggung jawab” terhadap masalah kesehatan justru lebih peduli. Masalah-masalah tersebut justru menjadi perhatian dan bahan pemikiran *Tukang Obat* yang notabene tidak pernah dianggap berperan dalam bidang ini. Hal itulah yang tampak sebagai parodi. Bahkan ia juga memberikan pesan-pesan tentang kesehatan melalui lagu “*Jagalah Hati*” yang telah disesuaikan liriknya.

*Kemudian bersenandung, menyanyikan lagu “Jagalah Hati” yang disesuaikan liriknya,*

**BK:**

*Jagalah hidup jangan kau sakiti  
Jagalah hidup tenteram hati ini  
Bila hidup kita sehat  
Semua terasa nikmat  
Hidup tak tergantung obat  
Senanglah dunia akhirat*

*Tapi bila tidak sehat  
Batin terasa sekarat  
Pikiran menjadi berat  
Kita jadi gampang nekat  
(Noor, 2006: 5-6).*

Lagu “Jagalah Hati” ini sangat populer melalui sosok Aa Gym, seorang dai terkenal dari Bandung. Penggunaan irama lagu yang sudah terkenal mempermudah pembaca dan penonton untuk “larut” dalam suasana lagu atau disebut dengan evokasi. Dalam posisi demikian, tokoh lebih mudah menyampaikan pesan. Lirik yang telah disesuaikan tersebut juga menggambarkan masalah-masalah perilaku nekat untuk melakukan kejahatan karena beban hidup yang berat dan menghimpit.

Munculnya tokoh Tukang Obat Keliling yang mencalonkan diri sebagai calon Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga merupakan salah satu bentuk parodi yang tampak dalam naskah ACMKRI. Di Indonesia, seorang calon Menteri Kesehatan setidaknya harus seorang dokter. Secara logika, tukang obat keliling yang lulusan STM bidang permesinan dan berlatar belakang tukang obat tidak mungkin menjadi Menteri Kesehatan. Munculnya tokoh ini terasa menjadi “olok-olok” dengan cara menyejajarkan Menteri Kesehatan dengan Tukang Obat yang

secara status jauh berbeda tetapi memiliki persamaan dalam satu hal, yaitu sama-sama tidak bisa mengatasi masalah kesehatan di Indonesia, artinya, keduanya tidak memiliki perbedaan secara kemampuan walaupun berbeda secara kedudukan.

Latar dalam ACMKRI menggambarkan suatu tempat keramaian yang biasa digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan, misalnya di pinggir jalan. Sedangkan suasana yang tergambar mengalami perubahan. Awalnya, suasana terasa tenang. Tukang Obat dapat menawarkan dagangannya dengan baik tanpa gangguan. Ia bahkan sempat “berpidato”. Akan tetapi, suasana kemudian menjadi gaduh dan panik ketika terdengar suara sirene dan deruman mobil dan bulldozer petugas yang akan melakukan penertiban.

Ketika BK muncul, kita langsung teringat pada sales obat atau tukang obat keliling. Membawa tas besar berisi berbagai macam obat. Kemudian ia segera menggelar obat-obat dagangannya itu, di atas meja yang sudah disediakan. Sembari duduk di kursi lipat yang juga telah disiapkan, BK mulai mencoba menarik perhatian para calon pembeli... (Noor, 2006:2).

Pada saat itulah terdengar raung sirene, dan disusul suara-suara panik. Mobil dan *bulldozer* menderum. Suara para pedagang berlarian ketika terjadi penertiban (Noor, 2006: 17).

Penggambaran latar yang demikian menunjukkan status sosial Tukang Obat yang berasal dari golongan bawah. Terlepas dari kepercayaan diri dan keberaniannya, tukang obat tetaplah “orang kecil” yang tidak memiliki keberanian menghadapi aparat dan penggusuran. Hal itu sekaligus menjadi parodi atas kondisi pemerintahan Indonesia yang lebih mementingkan ego masing-masing dan “harga diri” pemerintah daripada kebutuhan orang banyak, terutama rakyat kecil.

Berdasarkan proses penyejajaran di atas, diketahui bahwa masalah-masalah kesehatan dalam ACMKRI memiliki relasi positif dengan masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Masalah-masalah yang diungkapkan dalam ACMKRI adalah masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, relasi positif tersebut tidak berarti “membenarkan”, sebaliknya relasi positif itu merupakan bentuk parodi dengan cara mengungkapkan kembali masalah-masalah yang sudah terjadi tersebut melalui tokoh Tukang Obat yang mencalonkan diri sebagai Menteri Kesehatan. Dengan diungkapkannya masalah-masalah tersebut, ACMKRI menjadi semacam “peringat” bahwa berbagai masalah kesehatan tengah terjadi di Indonesia dan butuh segera diselesaikan. Dengan demikian, model dapat ditemukan yaitu kritik atas kondisi kesehatan.

## 2.2 Pelajaran Bahasa untuk Pemimpin Bangsa (PPUPB)

Naskah berjudul *Pelajaran Bahasa untuk Pemimpin Bangsa* menampilkan tokoh bernama Yus Badudui, seorang laki-laki berusia setengah baya yang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia di salah satu SD Inpres. Ia telah menjadi guru selama 30 tahun. Sering ia merasa hidupnya sangat susah, tapi ia tetap berusaha ikhlas. Karena merasa dirinya “orang kecil”, ia gampang merasa gugup ketika berhadapan dengan orang yang dianggapnya “lebih tinggi”. Penampilannya lugus dan sederhana, dengan gaya bicara yang santun dan sopan.

BK:

Maaf kalau saya terlalu santun dan sopan. Maklumlah, saya ini guru SD Inpres. Jadi terbiasa menunduk-nunduk, seperti kalau mau menerima gajian. Tapi, yah... beginilah saya. Guru SD yang tidak ternama dan tidak diperhatikan nasibnya. Jadi ya, maklum kalau saya begitu sungkan berdiri di sini. Gugup dan *nervous* begini.



Nama saya Yus. Biasa dipanggil Pak Yus. Lengkapnya Yus Badudui. Karena ada sedikit keturunan suku Baduy (Noor, 2006: 23-24).

**BK:**

Saya ini guru bahasa. Jadi guru saja sudah menyedihkan nasibnya, apalagi jadi guru bahasa. Sudah pasti lebih sangat-sangat-sangat menyedihkan nasibnya. Masih *mending* guru matematika atau IPA. Bisa dapat tambahan uang les. Lha kalau guru bahasa, siapa yang mau ikut les? Pelajaran bahasa dianggap tidak penting. “*Buat apa belajar bahasa? Tuh, lihat, anak-anak Inggris nggak usah belajar bahasa Inggris juga udah bisa ngomong Inggris...*” begitu katanya...

Ya sudahlah, *ndak* apa-apa. Saya nikmati saja nasib saya. Saya ini sudah terbiasa susah kok. Tahu nggak, saya ini jadi guru 30 tahun, tapi susahnya 50 tahun (Noor, 2006: 24-25).

Kesederhanaan Yus Badudui juga tampak melalui latar yang tergambar dalam PBUPB. Ruang yang tergambar dalam naskah ini adalah salah satu ruang kelas di SD Inpres. Ruang tersebut tampak sederhana, dilengkapi sebuah papan tulis sederhana yang berdiri dengan kaki kayu berbentuk segitiga. Di atas meja tersebut, terdapat sebuah gelas berisi air putih.

...  
Ia sedikit gugup karena datang terlambat, berbicara sembari tergesa menata tas dan buku catatan di meja... (Noor, 2006: 22).

...  
Sembari bicara begitu, BK menuliskan huruf EYD itu di papan tulis dengan kapur yang tersedia. Papan tulis itu sebagaimana yang biasa ada di sekolahan sederhana, yang berdiri dengan kaki kayu berbentuk segitiga. (Noor, 2006: 25).

Tokoh bernama Yus Badudui yang guru bahasa Indonesia mengingatkan pada J.S. Badudu yang dikenal sebagai pakar bahasa Indonesia ([www.wikipedia.co.id](http://www.wikipedia.co.id)). Keterkaitan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut.

<b>Yus Badudui</b>	<b>J.S. Badudu</b>
<b>Berusia setengah baya</b>	<b>Berusia 76 tahun</b>
<b>Guru Bahasa Indonesia di SD Inpres</b>	<b>Dikenal sebagai pakar Bahasa Indonesia dan guru besar di beberapa universitas</b>
<b>Golongan ekonomi menengah ke bawah</b>	<b>Golongan ekonomi menengah ke atas</b>
<b>Ikhlas dan menerima nasib menjalani profesi sebagai guru bahasa Indonesia</b>	<b>Sangat peduli terhadap pendidikan bahasa Indonesia</b>
<b>Mengemukakan konsep EYD yang berarti Eksploitasi Yang Disempurnakan</b>	<b>Membahas EYD yang berarti Ejaan Yang Disempurnakan, ejaan yang digunakan sebagai panduan berbahasa Indonesia</b>
<b>Mengemukakan konsep DM, di-me dalam kekuasaan. Misalnya, ditindas-menindas; daripada ditindas lebih enak menindas</b>	<b>Membahas konsep DM, pola frase yang paling dominan dalam bahasa Indonesia</b>

**Tabel 2.**  
**Relasi Yus Badudui dan J.S. Badudu**

Yus Badudui dan J.S. Badudu berusia setengah baya. Keduanya berkecukupan dalam bidang pengajaran bahasa Indonesia. Yus Badudui pengajar di SD Inpres sementara J.S. Badudu dikenal sebagai pakar dan guru besar di sejumlah universitas, juga sebagai pembawa acara Pembinaan Bahasa Indonesia pada tahun 1974-1979. Dalam hal ekonomi, posisi J.S. Badudu jauh lebih baik dibandingkan dengan Yus Badudui, mengingat profesi keduanya memang jauh berbeda. Akan tetapi, keduanya memiliki persamaan dalam hal kepedulian terhadap bangsa. Apabila J.S. Badudu “berjuang” melalui bahasa, Yus Badudui “berjuang” melalui kritik-kritik yang disampaikan dengan logika bahasa Indonesia (artikel tentang J. S. Badudu dapat dilihat pada lampiran 1).

EYD dalam bahasa Indonesia berarti Ejaan yang Disempurnakan. Menurut Finoza (2004:13) EYD mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan

ini merupakan upaya penyempurnaan ejaan sebelumnya. EYD kemudian “disepakati” sebagai ejaan yang benar untuk digunakan sebagai panduan berbahasa Indonesia. EYD merupakan salah satu kajian terpenting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam PBUPB, EYD mengalami penyimpangan atau pengrusakan arti. Dalam PBUPB, EYD diartikan sebagai Eksploitasi Yang Disempurnakan untuk merujuk perilaku pemimpin di Indonesia ketika sedang berkuasa. Sayangnya, prinsip “kesempurnaan” itu hanya digunakan dalam hal yang tidak tepat dan menimbulkan kesengsaraan rakyat.

**BK:**

Tahu EYD, kan? Nah, itu kan masih ingat. Coba kalau saya tanya logaritma...

Para pemimpin kita memakai prinsip EYD ketika berkuasa. Segala sesuatunya harus berdasarkan EYD: Eksploitasi Yang Disempurnakan. Jadi segala sesuatunya itu harus disempurnakan. Harus selalu terlihat sempurna. Ketika membuat kesalahan pun harus kelihatan sempurna agar tidak terlihat sebagai kesalahan.

Itulah yang membuat para pemimpin kita selalu sukses dan berhasil menindas rakyat, karena mereka memakai bermacam cara penindasan yang disempurnakan. Korupsi berhasil dijalankan dengan baik, karena mereka memakai prinsip-prinsip korupsi yang disempurnakan. Para politisi bisa terus-menerus berbohong, karena mereka terus meningkatkan kebohongan-kebohongan yang disempurnakan (Noor, 2006: 26).

Selain prinsip EYD, dalam PBUPB juga dikemukakan prinsip DM. Dalam bahasa Indonesia, DM berarti “Diterangkan-Menerangkan” yang merupakan pola frase bertingkat yang paling banyak digunakan dalam bahasa Indonesia, misalnya dalam frase *buku baru*, *rumah makan*, dan sebagainya (Chaer, 2000:304). Dalam PPUPB, DM juga mengalami penyimpangan arti. DM diartikan sebagai prinsip di-me dalam kekuasaan yang mengandung pengertian luas. Misalnya ditindas-

menindas, yang berarti “daripada ditindas lebih enak menindas”, dipaksa-memaksa, yang berarti “daripada dipaksa lebih baik memaksa”.

**BK:**

...

Jadi tidak benar kalau dikatakan para pemimpin kita tidak peduli dengan bahasa. Mereka justru sangat paham bahasa Indonesia, cuma salah menerapkannya. Hukum DM misalnya...

**BK:**

Pemimpin atau pejabat kita pada prinsipnya selalu memakai hukum DM ini. Diterangkan-Menerangkan. Ini namanya prinsip di dan me dalam kekuasaan. Pengertiannya luas. Bisa: Ditindas-Menindas. Digusur-Menggusur. Dipaksa-Memaksa. Ditindih-Menindih...

Prinsip di dan me inilah yang selalu diterapkan para pemimpin kita. Daripada di-paksa, lebih baik me-maksa. Daripada di-tindas lebih enak me-nindas.

Coba, Bapak-bapak, Ibu-ibu... mau pilih yang mana? Enakan ada di posisi di apa me?

Jadi prinsip DM dalam bahasa Indonesia inilah yang menjadi pola dasar di banyak bidang. Inilah salah satu sumbangan paling nyata bahasa Indonesia terhadap bangsa ini! Semua urusan dan persoalan tak lepas dari hukum DM ini. Kalau ada maling, ditangkap lebih dulu, baru melepaskan setelah dibuat bonyok-bonyok. Kalau terjadi kelangkaan BBM, ditimbun lebih dulu, baru menjual kembali setelah harga membumbung tinggi. Yang beda ya nasib guru macam saya: di-peras dulu nasibnya, baru me-nunda gajinya (Noor, 2006:27-28).

Oleh Yus Badudui, istilah EYD dan DM dalam bahasa Indonesia digunakan sebagai “alat” mengkritik kondisi bangsa Indonesia dengan cara “diplesetkan” artinya. Dalam kutipan di atas, diungkapkan masalah penindasan, pemaksaan, dan penggusuran yang dilakukan oleh pemimpin. Selain itu juga diungkapkan masalah main hakim sendiri dan penimbunan BBM.

Masalah-masalah tersebut merupakan cerminan kondisi bangsa Indonesia, misalnya masalah penggusuran. Di kota-kota besar, para pedagang kaki lima

sangat “akrab” dengan istilah tersebut. Penggusuran dilakukan dengan dalih untuk memperbaiki tata kota tapi kehidupan yang digusur tidak dipikirkan. Pemimpin memaksakan kehendak kepada mereka agar mengindahkan peraturan yang mereka buat sendiri, apabila menolak, mereka dipaksa menurut dengan cara kekerasan. Mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk menyuarakan keinginannya. Akibatnya dalam setiap operasi penggusuran, bentrokan antara pedagang dan aparat tidak terhindarkan. Dalam beberapa kasus lain, korban yang dianggap bersalah terkadang tidak terselamatkan. Perlakuan itu tidak sebanding dengan kesalahan yang diperbuat, misalnya maling ayam. Sementara “pencuri” trilyunan uang negara dibiarkan bebas, bahkan memiliki kedudukan dan dihormati.

Masalah penimbunan BBM juga kerap terjadi. Setiap kali terdengar desas-desus mengenai rencana kenaikan BBM, jauh sebelum hari kenaikan itu ditetapkan, BBM tiba-tiba menjadi langka. Setelah ditelusuri, ternyata selalu ada praktik penimbunan yang dilakukan oleh pedagang pengecer maupun pemilik pangkalan. Misalnya dalam kutipan berita di bawah ini.

Penimbunan BBM jenis solar yang dilakukan oleh SPBU Jl. Raya Trosobo Krian Sidoarjo tanpa ada ijin diungkap Reskrim Polda Jatim. Pengungkapan ini berdasarkan laporan masyarakat Nopoi. LP/51/VI/2008/Pidter tertanggal 2 Juni 2008, dan setelah ditindak lanjuti ternyata kebenaran penimbunan tidak ada ijin. Pemeriksaan saksi pun dilakukan terhadap PJ. Hehanus warga Jl. Gununganyar Kidul Surabaya, Muhayat, warga desa Sidorangu Watugodong Krian Sidoarjo dan Markus warga Ds. Trosobo Krian Sidoarjo. Sehingga dengan terbuktinya penimbunan tanpa ijin itu akhirnya Polda Jatim melakukan penindakan terhadap pemilik SPBU tersebut yaitu P. Widada dengan alamat Jl. Darmahusada Utara Surabaya. Penimbunan dilakukan SPBU tersebut dengan menambah 2 buah pompa dan dua tangki penampungan tanpa ada

ijin, serta menimbun lk 86 ton BBM selama 3 bulan ([www.mabespolri.go.id](http://www.mabespolri.go.id)).

Berbagai permasalahan tersebut diungkapkan oleh Yus Badudui dalam sebuah “acara” Pelajaran Bahasa untuk Pemimpin Bangsa melalui pembahasan tentang prinsip EYD dan DM yang telah diterapkan oleh pemimpin di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kesalahan pemimpin dalam menerapkan kedua prinsip tersebut. “Para Pemimpin Bangsa” dalam PBUPB dimunculkan melalui *aside* yang dilakukan oleh Yus Badudui. *Aside* adalah bagian naskah drama yang diucapkan seorang tokoh cerita dan ditujukan langsung kepada penonton. *Aside* juga mengandung pengertian apabila tokoh lebih dari satu, pembicaraan dilakukan langsung kepada penonton sementara tokoh lain yang ada di atas panggung tidak mendengar (Sumardjo, 1994: 139). Dalam naskah PBUPB, *aside* dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini.

BK:

Waduh, maaf...maaf...maklum, itu tadi kebiasaan di kelas. Menyapa anak-anak didik saya...Jadi, kalau ada di antara Saudara-saudara yang kebetulan anggota dewan, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak sedang menganggap Anda sebagai anak SD. Karena saudara-saudara ini memang bukan anak SD, kan? Tapi anak TK... (Noor, 2006: 23)

Kata sapaan “saudara-saudara” di atas ditujukan kepada penonton yang dalam hal ini “berperan” sebagai peserta “pembelajaran bahasa yang ditujukan untuk para pemimpin bangsa”. Pemimpin bangsa dalam naskah tersebut “diwakili” oleh para anggota dewan yang disebut sebagai anak TK.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, ada beberapa hal yang tampak diparodikan dalam PBUPB. Tokoh Yus Badudui yang seorang guru bahasa Indonesia di SD Inpres merupakan parodi atas J.S. Badudu yang dikenal sebagai pakar bahasa Indonesia. Parodi atas J.S. Badudu ini bukan merupakan bentuk kritik terhadap individu sang tokoh. Penggunaan nama J.S. Badudu dalam tokoh Yus Badudui untuk memperkuat karakter tokoh sebagai seorang guru bahasa Indonesia yang sedang memberikan pelajaran kepada para pemimpin bangsa. Penggunaan nama tersebut dilakukan untuk menimbulkan kesan bahwa pelajaran yang disampaikan oleh sang tokoh seolah-olah merupakan pikiran sang ahli bahasa yang terpercaya. Selain itu, tokoh Yus Badudui yang sederhana ini juga merupakan parodi nasib guru di Indonesia yang tidak juga membaik.

Penyebutan anggota dewan dengan sebutan anak TK juga merupakan parodi. Secara harafiah, anggota dewan tentu sama sekali bukan anak TK karena mereka sudah berusia dewasa. Sebutan anak TK tersebut merujuk pada perilaku mereka yang seperti perilaku anak TK, misalnya suka bertengkar karena hal-hal sepele, suka berebut, dan sebagainya.

Parodi juga tampak dalam penggunaan istilah EYD dan DM yang diplesetkan artinya untuk menggambarkan kondisi bangsa yang carut marut. Hal yang ditekankan dalam naskah ini bukan semata-mata persoalan bahasa, sebaliknya persoalan bahasa tersebut dijadikan sebagai sarana kritik terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang lebih krusial.

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa masalah-masalah kebijakan pemimpin (pemerintah) dalam PBUPB adalah masalah-masalah

kebijakan pemimpin di Indonesia. Akan tetapi, relasi antara PBUPB dan kondisi di Indonesia adalah relasi negatif. Hal itu dapat dilihat pada pemunculan tokoh Yus Badudui yang merupakan parodi atas J.S. Badudu. Walaupun memiliki beberapa persamaan, kedua tokoh tersebut berbeda dalam hal yang mendasar, yaitu pada pembelajaran bahasa. Inti dari parodi dalam naskah PBUPB terletak pada penyimpangan arti istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu EYD dan DM. Penyimpangan arti istilah-istilah tersebut merupakan parodi atas kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia yang tidak memihak rakyat kecil. Dengan demikian, satu model dapat ditemukan yaitu kritik atas kebijakan pemerintah yang tidak memihak kaum lemah.

### 2.3 Negeri Para Peselingkuh (NPP)

Naskah berjudul *Negeri Para Peselingkuh* menghadirkan tokoh seorang peselingkuh. Ia seorang laki-laki yang berasal dari golongan menengah ke atas. Penampilannya perlente dengan gaya yang meyakinkan sebagai orang berada..

BK—tokoh monolog kita tercinta ini—muncul ke panggung bergaya rapi jali, kemudian mulai menyapa yang hadir (Noor, 2006: 36).

Dalam naskah NPP, tokoh peselingkuh “bertugas” memberi refleksi perselingkuhan dalam suatu acara komunitas peselingkuh. Sebagai seorang peselingkuh, apa yang ia ungkapkan sebenarnya juga ia lakukan. Akan tetapi, ia bersikap seolah-olah tidak merasa bersalah dan berusaha menggiring penonton untuk lebih memperhatikan apa yang dia ucapkan. Dalam penyampaian refleksinya, ia membongkar perselingkuhan-perselingkuhan yang dilakukan oleh



orang lain, terutama yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Acara tersebut digunakannya sebagai ajang mengkritisi berbagai persoalan yang tengah terjadi, terutama berbagai perselingkuhan yang terjadi di Indonesia.

**BK:**

...

Tapi tolong, Anda jangan terlalu banyak berharap kepada saya. Ini perlu saya tegaskan, karena jangan-jangan Anda sangat berharap akan mendapatkan semacam petunjuk praktis dari saya “Bagaimana Cara Berselingkuh yang Baik dan Benar”. Saya bukan pakar dalam bidang ini. Jadi, tolong dimaklumi, apabila saya tidak bisa memberikan teori-teori yang canggih soal perselingkuhan.

Jadi, sesungguhnya panitia telah keliru memilih saya untuk memberikan refleksi perselingkuhan di acara ini. Karena seperti saya bilang tadi, saya ini bukan ahli atau pakar perselingkuhan, juga bukan termasuk aktivis perselingkuhan. Anda lihat sendiri kan... saya ini bukan tipe peselingkuh. Apa boleh buat, saya ini sudah terlanjur menjadi laki-laki yang setia. Yah, bagaimana ya... saya sendiri juga heran kok. Lha *wong* hidung belang macam saya kok ya jadi laki-laki setia. *Edan* toh itu?!

*Tiba-tiba mendekati ke arah penonton dan berbisik, seperti berhasia...*

**BK:**

Ssssttt... Kalau sesekali tersesat melakukan perselingkuhan kecil-kecilan sih ya kadang-kadanglah... Bener, cuma kadang-kadang..., tapi intens dan sering. Jangan bilang-bilang lho ya! Karena dalam hal perselingkuhan, saya ini termasuk penganut faham *Ahimsa*; sukanya diam-diam. Lebih suka langsung dipraktikkan, daripada hanya dibicarakan...(Noor, 2006:37-38).

**BK:**

Maaf, bila Anda makin bingung dengan refleksi saya yang memang membingungkan ini. Habis mau apa coba, *wong* keadaan negeri kita ini memang bener-bener membingungkan saking banyaknya perselingkuhan yang terjadi di mana-mana. Di kantor-kantor, di rumah sakit, stasiun... bahkan sampai kuburan, ada saja yang namanya selingkuh-selingkuhan.

Saya tak tahu, apakah ini kebobrokan ataukah kehebatan kita sebagai sebuah bangsa. Yakni bangsa yang suka berselingkuh. Para aparat berselingkuh dengan penjahat. Guru-guru berselingkuh dengan pedagang buku—atau kadang-kadang dengan muridnya. Pejabat berselingkuh dengan pengusaha agar dapat ngantongin keuntungan. Hakim berselingkuh dengan pengacara untuk memenangkan perkara. Sedang saya... cukuplah saya berselingkuh dengan Madonna (Noor, 2006:44).

Perselingkuhan yang diungkapkan oleh tokoh Peselingkuh dalam naskah NPP bukan perselingkuhan dalam arti seperti yang dipahami oleh banyak orang selama ini. Perselingkuhan yang dimaksud adalah adanya penyimpangan peran masing-masing profesi dalam relasinya dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa masalah yang diungkapkan dalam naskah NPP adalah perselingkuhan antara aparat dengan penjahat, perselingkuhan antara guru dengan pedagang buku, perselingkuhan antara pejabat dengan pengusaha, dan perselingkuhan antara hakim dan pengacara untuk memenangkan perkara.

Perselingkuhan guru dengan pedagang buku pun sudah tidak menjadi rahasia lagi. Hampir setiap tiba masa tahun ajaran baru, kasus-kasus demikian banyak diberitakan di media massa. Misalnya tampak dalam kutipan berita di bawah ini.

"Sekarang ini, buku 'swasta' yang seyogianya menjadi pelengkap malah jadi prioritas utama di sekolah, sedangkan buku subsidi pemerintah tidak dipakai di sekolah dan hanya ditumpuk di perpustakaan menjadi makanan rayap," kata Ketua Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Peduli Pendidikan Bangsa (P2B) Saidin Yusuf YP di Jakarta, Rabu (14/7).

Penjualan buku pelajaran di lingkungan sekolah oleh oknum guru sudah berlangsung sejak lama. Pemberian potongan harga yang tinggi oleh penerbit-penerbit swasta, yakni 30-50 persen, merupakan daya tarik sehingga buku penerbit swasta tersebut yang justru dipakai di sekolah. Ironisnya, buku pelengkap yang dibeli dari penerbit swasta berubah fungsi menjadi buku teks wajib yang

harus dibeli oleh siswa, sedangkan buku teks wajib yang disubsidi pemerintah tidak terpakai.

Oleh karena itulah, orangtua siswa merasa terbebani dan kewalahan membiayai kebutuhan buku anaknya di sekolah sehingga mengganggu proses belajar-mengajar anak-anak yang orangtuanya kurang mampu secara ekonomi.

Dicontohkan, seorang siswa SD harus mengeluarkan dana untuk membeli buku pelajaran di atas Rp 250.000 per semester, terdiri atas delapan judul buku pelajaran dan dua judul muatan lokal. Siswa SLTP harus mengeluarkan dana di atas Rp 400.000 per semester untuk membeli buku 10 judul buku pelajaran ditambah empat buku muatan lokal. Sementara siswa SLTA membutuhkan dana di atas Rp 500.000 per semester untuk 11 judul buku pelajaran ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa “kerja sama” guru dan penjual buku di sekolah sudah bukan hal baru lagi. Akan tetapi, pemerintah sangat lamban bertindak. Dalam perkembangannya sampai sekarang, baru pada pemerintahan SBY ditetapkan masa berlaku buku minimal selama lima tahun. Akan tetapi, ketetapan tersebut ternyata tidak seratus persen bisa menghapus praktik “perselingkuhan” guru dan penjual buku hingga saat ini.

Hubungan antara perselingkuhan yang dikemukakan dalam NPP dan perselingkuhan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

NPP	Indonesia
Perselingkuhan antara aparat dengan penjahat	Perselingkuhan antara aparat dengan penjahat
Perselingkuhan antara guru dengan pedagang buku	Perselingkuhan antara guru dengan pedagang buku
Perselingkuhan antara pejabat dengan pengusaha	Perselingkuhan antara pejabat dengan pengusaha
Perselingkuhan hakim dengan pengacara	Perselingkuhan hakim dengan pengacara
Pelaku perselingkuhan menceritakan perselingkuhannya kepada masyarakat	Pelaku perselingkuhan tidak menceritakan perselingkuhannya kepada masyarakat bahkan tidak mau mengakui walaupun telah terungkap

Tabel 3.

### Relasi Perselingkuhan dalam NPP dan Perselingkuhan di Indonesia

Parodi dalam naskah ini tampak pada pengungkapan berbagai perselingkuhan yang terjadi oleh seorang Peselingkuh yang notabene adalah pelaku berbagai macam perselingkuhan yang diungkapkan tersebut. Dalam kenyataannya, tidak ada seorang pun “peselingkuh” yang mengakui “perselingkuhannya”, apalagi membongkar dan menceritakannya kepada masyarakat. Sikap Peselingkuh yang demikian menimbulkan kelucuan yang penuh kegetiran. Selain itu, perilaku Peselingkuh yang lebih banyak membongkar perselingkuhan yang dilakukan orang lain tetapi menutup-nutupi perselingkuhannya sendiri juga merupakan parodi. Ia merujuk pada perilaku pejabat dan masyarakat yang lebih mudah menilai kesalahan orang lain tetapi bersikap cuek terhadap kesalahannya sendiri.

Selain itu, parodi juga tampak pada latar dalam naskah NPP yang disebutkan berada dalam suatu acara semacam refleksi perselingkuhan yang dihadiri para peselingkuh. Tidak digambarkan dengan jelas kondisi fisik tempat

yang digunakan. Hanya saja, tokoh dalam naskah ini didapuk sebagai pembicara atau pemberi refleksi. Jadi dapat digambarkan tokoh berada di atas panggung, berbicara di depan para peserta acara yang “diperankan” oleh penonton. “Peran” penonton ini dapat dilihat pada *aside* yang ditujukan kepada penonton yang “berperan” sebagai para penggemar perselingkuhan. Disebut demikian karena acara tersebut merupakan acara refleksi perselingkuhan. Hal itu tampak dalam kutipan berikut.

**BK:**

Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para penggemar perselingkuhan yang hadir malam hari ini...

Parodi tampak pada acara refleksi perselingkuhan yang diadakan secara terbuka dan untuk umum. Dalam konsep perselingkuhan, hubungan kedua pihak seharusnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi dalam NPP, perselingkuhan digambarkan sebagai perbuatan yang tidak lagi tabu. Hal itu bisa dilihat pada acara yang refleksi perselingkuhan yang dihadiri oleh banyak penggemar perselingkuhan. Gambaran tersebut merujuk pada kenyataan bahwa kolusi bukan lagi sesuatu yang dianggap tabu dan telah menjangkiti hampir semua orang dari berbagai profesi.

**BK:**

...

Maaf, kalau saya menyebut Anda sebagai “para penggemar perselingkuhan”. Tapi saya yakin, Anda tidak tersinggung dengan predikat semacam itu. Buktinya, Anda rela hadir di acara yang bertema perselingkuhan semacam ini.. (Noor, 2006: 37).

Sosok peselingkuh yang muncul sebagai perefleksi adalah parodi atas dirinya sendiri karena pada dasarnya apa yang dia bicarakan adalah apa yang dia

lakukan. Artinya, ketika dia berbicara dan mengajak orang lain, sesungguhnya ia berbicara kepada dirinya sendiri. Ketika dia membongkar keburukan orang lain, sebenarnya ia membongkar keburukannya sendiri. Hal ini menjadi parodi karena dalam kehidupan nyata sangat jarang ditemukan orang yang mau membongkar keburukannya sendiri. Kemunculan tokoh ini menjadi lelucon sekaligus kegetiran karena mengungkapkan kenyataan bahwa semua orang, asalkan mau melakukan refleksi diri pasti menyadari bahwa ia pernah terlibat dalam praktik kolusi, baik dalam skala besar maupun kecil. Tokoh ini menjadi parodi atas diri masing-masing pembaca dan penonton.

Berdasarkan proses penyejajaran di atas, diketahui bahwa perselingkuhan dalam NPP memiliki relasi positif dengan perselingkuhan di Indonesia. Perselingkuhan yang diungkapkan dalam NPP adalah perselingkuhan yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, sama halnya dengan naskah ACMKRI, relasi positif tersebut tidak berarti “membenarkan”, sebaliknya relasi positif itu merupakan bentuk parodi dengan cara mengungkapkan perselingkuhan yang terjadi melalui tokoh peselingkuh yang membongkar masalah perselingkuhan dalam sebuah acara refleksi bertema selingkuh. Dengan diungkapkannya perselingkuhan-perselingkuhan tersebut, NPP menjadi semacam “pengingat” kembali bahwa berbagai macam perselingkuhan dilakukan oleh berbagai oknum di Indonesia. perselingkuhan tersebut akan terus berkembang dan berakibat fatal apabila tidak ada upaya untuk menghentikannya. Upaya itu diharapkan lahir dari kesadaran tiap individu yang dimulai dengan cara melakukan introspeksi diri masing-masing dan

membenahi kesalahan-kesalahan. Dengan demikian, model dapat ditemukan yaitu ajakan introspeksi atas praktik-praktik perselingkuhan yang terjadi.

#### 2.4 Koruptor Kita Tercinta (KKT)

Tokoh dalam naskah KKT adalah Sang Koruptor, seorang koruptor yang sangat percaya diri. Sang Koruptor digambarkan sebagai sosok yang tenang, santai, dan persuasif. Ia memiliki kemampuan lebih dalam mengendalikan diri dan orang-orang di sekitarnya. Wajahnya selalu dihiasi senyum.

Ia sama sekali tidak menampakkan wajah takut. Dalam menghadapi sekelompok orang yang berdemo menuntut pengadilan terhadapnya, ia bersikap santai. Bahkan, ia hanya menanggapi tuntutan itu dengan cibiran, menganggap bahwa tuntutan itu tidak sungguh-sungguh, hanya ulah sekelompok orang yang mendapat bayaran untuk melakukan aksi tersebut.

Terhadap para petugas yang menangkapnya, ia juga sama sekali tidak takut. Ia bahkan berhasil mengendalikan para petugas tersebut dengan uang yang dimilikinya. Para petugas itu pun menjadi hormat dan tunduk.

Sampai kemudian Sang Koruptor yang dikawal dua petugas, sampai di tengah-tengah atau di bagian depan panggung. Mereka berhenti. BK terus tersenyum melambaikan tangan. Teriakan para demonstran terus terdengar. Kemudian Sang Koruptor mulai mencoba menenangkan keadaan..

**SANG KORUPTOR:**  
Tenang... Tenang...

**SANG KORUPTOR:**  
(*Bergaya persuasif*) Tenang... Saya bisa memahami perasaan saudara-saudara yang membenci saya. Anda memang tidak diharamkan *kok* untuk membenci koruptor seperti saya. Koruptor

seperti saya mestinya memang haram hukumnya. Tidak boleh didengar omongannya.

Tapi..., ya begitulah, saya ini sudah terlanjur jadi orang terhormat. Sudah terlanjur jadi seorang koruptor yang berbudi luhur. Karena itulah, saya yakin banyak pihak menganggap orang seperti saya ini bukan sesuatu yang haram, tapi tetapi termasuk golongan yang dihalalkan. Malah mungkin sebentar lagi akan ada fatwa: darah koruptor itu seratus persen halal hukumnya. Persis Indomie. Beli lima dapat gratis satu gelas.

*Lalu kepada dua petugas pengawal itu.*

**SANG KORUPTOR:**

Bisa saya minta waktu sebentar, untuk berbicara dengan para demonstran itu? Kalian tak usah khawatir... kalian istirahat saja dulu. Atau mungkin beli rokok?

*Mengeluarkan uang dan memberikannya pada dua petugas itu dengan gaya seorang ayah memberikan uang saku kepada anaknya.*

**SANG KORUPTOR:**

Ini, buat jajan kalian...Ayo, toh...Tak usah malu-malu. Ambil...Percayalah, saya tak akan melarikan diri...

Nah, sekarang kalian istirahat saja dulu...Biar saya *ngadepin* (menemui) para demonstran itu... (Bergaya dan sok) Emangnya takut... (Noor, 2006: 54-55).

Sebagai seorang koruptor yang “berhasil”, ia sangat kaya sehingga selalu merasa menjadi orang yang terhormat dan memperlakukan diri sendiri dengan cara elit. Karena merasa memiliki segalanya, ia sering mengandalkan suap sebagai senjata untuk menyelamatkan diri. Yang dicari hanya keuntungan untuk dirinya sendiri. Ia sangat bangga dengan apa yang dilakukannya.

Setelah dilakukan analisis, tokoh Sang Koruptor ini memiliki banyak persamaan dengan Soeharto (data tentang Soeharto dapat dilihat pada lampiran 2).



Walaupun demikian, beberapa perbedaan juga ditemukan. Persamaan dan perbedaan itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<b>Sang Koruptor</b>	<b>Soeharto</b>
Percaya diri	Tampak percaya diri
Persuasif	Persuasif
Berpenampilan Tenang	Berpenampilan Tenang
Selalu mengumbar senyum	Selalu mengumbar senyum
Dihormati/diseyani oleh aparat	Dihormati/diseyani oleh pemerintah
Menggunakan dialek dengan sufiks "ken" dan "daripada"	Menggunakan dialek dengan sufiks "ken" dan "daripada"
Mengaku sebagai orang Jawa	Berasal dari suku Jawa
Mendapat julukan "Koruptor Bapak Pembangunan"	Dikenal sebagai "Bapak Pembangunan"
Menyesali kesalahan dan berharap aparat mau menangkapnya	Menghindari pengadilan karena "sakit"
Mengakui bahwa dirinya koruptor	Tidak mau mengakui dirinya koruptor
Merasa aman di pengadilan	Tidak merasa aman di pengadilan
Diadili di pengadilan SD Negeri II	Diadili di Pengadilan Negeri
Menyampaikan pertanggungjawaban	Dicap tidak mau bertanggung jawab

Tabel 4.

#### Relasi Sang Koruptor dan Soeharto

Dalam KKT, Sang Koruptor digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, tenang, persuasif, dan selalu menanggapi masalah dengan senyuman. Demikian juga dengan sosok Soeharto. Dalam setiap kemunculannya di depan publik, ia selalu menampakkan raut yang tenang dan penuh senyum. Hujatan dan tuntutan dari berbagai pihak, lebih-lebih setelah ia lengser dari kursi presiden, seolah-olah tidak berpengaruh sama sekali.

Sang Koruptor dalam KTT sangat disegani oleh petugas, sementara Soeharto sangat disegani oleh pemerintahan sesudahnya. Dalam setiap kesempatan, beberapa tahun setelah era reformasi berjalan, Soeharto sering mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Apalagi ketika ia sakit dan

meninggal, pemerintah pun dengan serta merta menahbiskannya sebagai pahlawan nasional.

Keseganan terhadap Soeharto juga tampak melalui lambannya proses pengadilan. Soeharto “didaulat” sebagai koruptor terbesar di Indonesia. Akan tetapi, proses pengadilan terhadapnya tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya. Berkali-kali proses itu dilakukan, namun berkali-kali juga mengalami penundaan, sampai akhirnya pada tanggal 11 Oktober 1999, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Habibie menyatakan tuduhan korupsi terhadap Soeharto tak terbukti karena minimnya bukti. Kejagung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Soeharto. Tetapi pada tanggal 6 Desember 1999, Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali pemeriksaan kekayaan Soeharto dan Jaksa Agung baru, Marzuki Darusman mencabut SP3 Soeharto. Tapi kemudian pada tanggal 28 September 2000, majelis hakim menetapkan penuntutan perkara pidana Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan. Tidak ada jaminan Soeharto dapat dihadapkan ke persidangan karena alasan kesehatan. Majelis juga membebaskan Soeharto dari tahanan kota. Sementara proses pengadilan perdata yang diadakan beberapa tahun kemudian berujung pada vonis bebas dan tidak bersalah ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)).

Sang Koruptor digambarkan memanfaatkan sebagian hasil korupsinya untuk berderma: menyantuni anak-anak yatim piatu, memberikan sumbangan untuk tempat-tempat ibadah, sumbangan tujuh belasan, dan lain-lain. Ia juga menggunakan sebagian hartanya untuk beribadah haji.

**SANG KORUPTOR:**

...  
 Di negeri ini, saya malah memiliki karier yang bagus. Saya bisa punya sampingan sebagai dermawan yang menyantuni anak-anak yatim piatu, bisa ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, dimintai sumbangan tujuhbelasan, ziarah ke tanah suci,... (Noor, 2006: 72).

Ketika masih menjabat sebagai presiden, Soeharto banyak mendirikan yayasan-yayasan yang digunakan untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat kurang mampu, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, yayasan-yayasan ini menjadi masalah karena diduga sebagai salah satu sarana korupsi yang dilakukannya. Soeharto juga telah melakukan ibadah haji bersama keluarganya. Bahkan, rangkaian perjalanan haji itu disiarkan melalui televisi dalam sebuah liputan khusus.

Parodi dalam naskah ini tampak melalui tokoh Sang Koruptor yang memiliki beberapa persamaan dengan Soeharto. Juga melalui pemakaian idiolek. Idiolek merupakan ciri khas seseorang dalam bertutur, kecirikhasan ini diketahui dan diakui oleh orang lain (Kridalaksana, 2001:79). Kata “ken” dan “daripada” yang menjadi salah satu ciri khas Soeharto dalam berbahasa.

**SANG KORUPTOR:**

Nah, sekarang kalian maunya apa? Apa daripada saya mesti memberiken semacam daripada Pidato Pertanggungjawaban, begitu? (Noor, 2006: 57).

**SANG KORUPTOR:**

Sebagai koruptor yang baik, pertama-tama izinkanlah daripada saya mengucapken daripada puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat dan hidayahNya..., hingga sampai hari ini saya bisa terus melakukan korupsi secara murni dan konsekuen... (*mengomentari apa yang barusan diucapkannya sendiri*) Maaf..., ini efek samping akibat over dosis penataran P4 di masa lalu (Noor, 2006: 58-59).

Selain penggunaan idiolek “ken” dan “daripada”, parodi juga tampak dalam pengakuan Sang Koruptor sebagai orang Jawa yang dibuktikannya dengan kepandaiannya berbahasa Jawa halus.

**SANG KORUPTOR:**

Dengan tuluuuus dan rendah hati saya akui: saya memang koruptor. *Inggih, dalem meniko* koruptor... (Noor, 2006: 56)

Seperti diketahui, Soeharto berasal dari sebuah desa bernama Kemusuk yang terletak di wilayah Yogyakarta. Daerah Yogyakarta terkenal dengan tutur bahasa Jawa yang halus.

Selain itu, parodi juga tampak melalui latar tempat. Dalam KKT, latar tempat disebutkan berada di Pengadilan SD Negeri II dengan lambang timbangan yang berat sebelah.

Terlihat halaman kantor/gedung pengadilan. Di bagian belakang terlihat papan nama yang bertuliskan ‘GEDUNG PENGADILAN SD NEGERI II’, sebagaimana biasa terlihat di depan gedung kantor pemerintahan atau sekolah. Sementara di satu sisi panggung ada semacam podium, tempat biasanya pejabat pidato atau memberi konferensi pers. Di bagian depan podium itu terlihat logo timbangan keadilan yang dibuat berat sebelah (Noor, 2006: 52).

Latar “Gedung Pengadilan SD Negeri II” dengan lambang timbangan berat sebelah tersebut merupakan parodi atas Soeharto yang diadili di pengadilan negeri dengan lambang timbangan yang seimbang. Pengadilan SD Negeri II dalam KKT menunjukkan bahwa pengadilan itu seperti suasana yang ada di SD, penuh dengan permainan. Lambang timbangan berat sebelah untuk menggambarkan bahwa keadilan memihak pada kelompok atau individu tertentu. Kenyatannya, proses pengadilan terhadap Soeharto memang tampak seperti permainan. Berkali-kali

digelar, berkali-kali pula ditunda, dan akhirnya proses itu ditutup, dianggap selesai walaupun tanpa penyelesaian.

Parodi dalam naskah KKT juga tampak pada pidato pertanggungjawaban dan pengakuan Sang Koruptor sebagai pelaku korupsi, bahkan ia meminta agar pemerintah berani menangkap dan mengadilinya agar ia bisa berhenti korupsi. Pada dasarnya, Sang Koruptor menyadari kesalahannya dan ingin bertanggung jawab. Berbeda dengan Sang Koruptor, Soeharto sama sekali tidak mau mengaku telah melakukan korupsi, apalagi bertanggung jawab. Bahkan ia selalu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan vonis bebas dan lepas dari jerat hukum melalui perjuangan “barisan” pengacaranya.

Parodi juga tampak dalam sikap kritis Sang Koruptor terhadap pemerintahan di Indonesia yang membiarkan koruptor seperti dirinya bebas. Ia juga mengkritisi korupsi yang meraja lela di setiap sendi pemerintahan dan lapisan masyarakat.

**SANG KORUPTOR:**

Anda tahu, kenapa pemerintah tak mau menangkap para koruptor? Sebab, kalau semua koruptor ditangkapi, pastilah Anggaran Belanja Negara kita habis buat membangun buanyak penjara. Pernahkah Anda menghitung, betapa biaya untuk menangkap para koruptor itu jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM? Ini akan membebani keuangan negara! Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontra-produktif bagi keuangan negara.

Lagi pula, kalau semua koruptor dijebloskan ke penjara, lalu siapa yang akan menyelenggarakan negara? Sebab, menjebloskan semua koruptor ke dalam penjara, itu sama artinya dengan menangkap dan memenjarakan semua pejabat dan aparat di negeri ini...

Membahayakan, kan?! Bisa terjadi krisis pemerintahan, kan? Birokrasi macet. Semua departemen kosong. Kantor-kantor publik tak bisa memberi pelayanan. Jangankan ngurus KTP, WC umum saja mungkin nggak ada lagi yang ngurusi...(Noor, 2006:60).

Apa yang diungkapkan Sang Koruptor pada kutipan dialog di atas mencerminkan kondisi korupsi di Indonesia. Seperti diketahui, korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah memasuki tahap “akut” dan “kritis”. Ibarat kanker, penyakit korupsi ini telah memasuki stadium paling akhir dan hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan. Sang Koruptor menggambarkan, seandainya semua koruptor di negara ini ditangkap, negara ini tidak akan ada yang mengatur. Semua pasti masuk penjara sampai-sampai pemerintah harus membangun banyak penjara lagi dan menghabiskan anggaran belanja negara. Gambaran itu menunjukkan bahwa penyakit korupsi telah menyerang seluruh sendi pemerintahan di Indonesia.

Penyebutan “Koruptor Bapak Pembangunan” dan pemakaian kata sandang “sang” pada tokoh Sang Koruptor merupakan salah satu bentuk parodi. Dalam KKT, penyebutan tersebut tampak dalam kutipan di bawah ini.

Terdengar teriakan-teriakan para demonstran, teriakan-teriakan rakyat yang marah, hingga suasana menggemuruh penuh makian dan hujatan; “Gantung koruptor!” “Ganyang koruptor!” “Go to hell kamu koruptor!” “Kalian harus dihukum mati!” “Bersihkan negeri ini dari tikus-tikus korup!” Suasana gegap gempita. Tapi ada juga terdengar teriakan atau celetukan yang terdengar lucu dan parodik: “Hidup Koruptor Bapak Pembangunan” atau “Koruptor Aset Bangsa”, dll... Semua teriakan-teriakan itu saling sahut, saling timpa dan makin membahana seperti tinju yang menghantam langit (Noor, 2006: 52).

Parodi tampak melalui julukan “Koruptor Bapak Pembangunan” yang diberikan kepada Sang Koruptor. Selama ini, Soeharto dikenal atau “diperkenalkan” sebagai Bapak Pembangunan.

“Sang Koruptor” juga merupakan parodi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata sandang “sang” digunakan di depan nama orang, binatang, atau benda yang dianggap hidup dengan tujuan memberi penghormatan atau memuliakan. Kata ini diberikan kepada siapa saja yang layak untuk dihormati, misalnya sang raja, sang pahlawan, sang guru, dan sebutan-sebutan positif lainnya. Pelekatan kata sandang “sang” pada kata “koruptor” yang memiliki asumsi negatif menjadi semacam olok-olok bahwa koruptor mendapat penghargaan dan penghormatan di negeri ini.

Berdasarkan hasil penyejajaran Sang Koruptor dan Soeharto, naskah KKT ini memang tampak memparodikan Soeharto dalam relasi negatif. Akan tetapi apabila diamati lebih cermat, tampak bahwa Sang Koruptor juga merupakan parodi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, sifat-sifat koruptor di Indonesia sama, yaitu berusaha tampak tenang, berusaha mengamankan diri, menghindari hukum, berusaha tampak baik, dan tidak mau mengakui kesalahan. Mereka juga sama-sama memperoleh kedudukan yang terhormat. Semakin tinggi angka yang dikorupsi, semakin mudah mereka mendapatkan kehormatan. KKT merupakan cermin atas “dunia perkorupsian” Indonesia. Dengan demikian, model dapat ditemukan yaitu kritik atas masalah korupsi yang semakin berkembang.

## 2.5 Matinya Toekang Kritik (MTK)

Naskah *Matinya Toekang Kritik* termasuk *monoply*. Ada dua orang tokoh yang dihadirkan, yaitu R. M. Suhikayatno dan Bambang. Bentuk *monoply* tersebut dapat dilihat pada teks samping yang menjelaskan bahwa dua orang tokoh ini harus diperankan oleh orang yang sama.

R. M. Suhikayatno atau yang dipanggil dengan sebutan Denmas adalah seorang laki-laki tua yang usianya sudah berabad-abad lamanya. Denmas digambarkan sebagai tukang kritik hebat yang dianggap seperti legenda. Tidak ada yang tahu pasti kapan dia lahir. Ada yang percaya bahwa dia sudah ada sejak permulaan dunia. Kisah kelahirannya diceritakan sebanyak 1.501 versi. Menurut satu kisah, ia dilahirkan dari *bonggol* pisang. Sementara kisah yang lain menyebutkan bahwa ia lahir dari kabut waktu. Kisah hidupnya melegenda, seakan-akan ia hidup di tiap sejarah, di tiap tempat, dengan banyak nama. Hal itu tampak dalam kutipan berikut:

**BAMBANG :**

...

Dia itu terkenal banget sebagai tukang kritik nomer wahid. Banyak versi cerita seputar sosoknya. Kisah kelahirannya saja ada lebih 1.501 versi. Ada yang mengisahkan ia lahir dari *bonggol* pisang. Ada yang bilang ia muncul begitu saja dari kabut waktu. Tapi ada juga yang bilang: dia itu anak hasil kawin silang manusia dan genderuwo.

Kalau dilihat dari tampangnya ada benarnya juga sih cerita itu.. Serba tanggung, cakep enggak, buruk iya. Setengah manusia, setengah makhluk sengsara... Beda jauh 'kan sama saya? (Noor, 2006: 108-109)

...

Bahkan ada yang percaya : dia sudah ada sejak permulaan dunia (Noor, 2006: 109).



Denmas adalah orang yang mudah cemas dan gelisah memikirkan apa yang dianggapnya tidak benar sehingga ia selalu mengkritik. Apa saja dikritiknya, mulai hal yang kecil seperti penampilan, kerapian, sampai hal-hal yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya. Sebagai tukang kritik, Denmas memiliki pengetahuan yang sangat luas. Kritiknya selalu memiliki dasar dan tidak mengawur. Ia termasuk orang yang perfeksionis. Ia juga orang yang konsisten, baik, jujur, dan tulus. Kritik yang disampaikan semata-mata untuk kebaikan, tanpa ada tendensi lain. Ia tidak pernah tergoda oleh kedudukan. Seperti tampak dalam kutipan berikut:

**DENMAS:**

Saya ngomong gitu, bukan karena saya dengki nggak jadi presiden, lho. (*seperti orang jijik pada sesuatu*) Hiiihhh..., saya nggak mau jadi presiden.

Jangankan Presiden Indonesia... ditawarkan jadi Raja Hastina saja saya tidak mau kok. *Emoh!* Padahal Romo Semar sendiri lho yang nawarin. Katanya saya lebih pantas jadi Raja Hastina, ketimbang Yudhistira, si Pandawa yang paling tua itu.

Itulah *track record* saya... Saya memilih konsisten sebagai tukang kritik yang bermartabat. Itu yang saya pegang teguh sejak dulu (Noor, 2006: 90-91).

**BAMBANG:**

...

Saya nggak menghina lho... Bagaimana pun saya hormat kok sama beliau. Memang dia suka banget ngritik. Tapi pada dasarnya dia baik kok.

Kalau dirasa-rasa, terasa betul kok kebenaran dalam kritik-kritiknya. Kritiknya tulus. Jujur (Noor, 2006: 111).

...

Tuan saya ini nggak silau kedudukan. Dari dulu ya di situ terus duduknya. Nggak pindah-pindah. Ditawarin jadi Presiden Indonesia yang pertama juga nggak mau... (Noor, 2006: 112).

Denmas merupakan simbol kritik yang tidak pernah mati. Dari zaman ke zaman akan tetap hidup. Ia ada di tiap sejarah, di tiap tempat, di tiap ruang dan waktu, dengan banyak nama. Seperti tampak dalam kutipan di bawah ini.

**BAMBANG:**

...  
Bahkan ada yang percaya : dia sudah ada sejak permulaan dunia (Noor, 2006: 109).

...  
Sejak saya di sini, beliau ya begini-begini terus. Nggak tua-tua. Seperti nggak bisa mati. Dan kakek saya pernah bilang, (menirukan suara kakeknya) “Tukang kritik sejati seperti dia nggak bakalan mati. Dia itu legenda setiap zaman. Tahu tidak, di zaman Yunani... dia mengubah namanya jadi Socrates.

...  
Menurut sahibul hikayat, Raden Mas Suhikayatno ini memang dikenal memiliki banyak nama. Dia pernah dikenal sebagai Galileo. Di Prancis dia dipanggil Voltaire. Tapi begitu di Jawa dipanggil Empu Gandring. Lalu jadi Gandhi waktu di India (Noor, 2006: 110).

Dalam kutipan di atas, disebutkan bahwa Denmas di Yunani dikenal sebagai Socrates. Di Perancis, ia dikenal dengan nama Voltaire. Ia juga pernah dikenal sebagai Galileo. Ia mengubah nama menjadi Empu Gandring ketika di Jawa. Di India, ia dikenal sebagai Gandhi. Socrates, Voltaire, Galileo, Empu Gandring, dan Gandhi adalah nama-nama yang sangat dikenal.

Socrates adalah filsuf dari Athena, Yunani dan merupakan salah satu figur tradisi filosofis Barat yang paling penting. Pemikiran Socrates dikenal melalui catatan Plato yang terkenal, yaitu *Dialogue* yang isinya berupa percakapan antara dua orang pria tentang berbagai topik filsafat. Socrates percaya bahwa manusia ada untuk suatu tujuan, dan bahwa *salah* dan *benar* memainkan peranan yang penting dalam mendefinisikan hubungan seseorang dengan lingkungan dan

sesamanya. Socrates percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan diri, dan bahwa manusia pada dasarnya adalah jujur, dan bahwa kejahatan merupakan suatu upaya akibat salah pengarahannya yang membebani kondisi seseorang.

Kritik Socrates terhadap pemerintahan adalah pernyataannya bahwa pemerintahan yang ideal harus melibatkan orang-orang yang bijak, yang dipersiapkan dengan baik, dan mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Ia juga dikenang karena menjelaskan gagasan sistematis bagi pembelajaran mengenai keseimbangan alami lingkungan, yang kemudian akan mengarah pada perkembangan metode ilmu pengetahuan (*www.wikipedia.org.id*).

Voltaire dikenal sebagai penulis dan filsuf Perancis pada Era Pencerahan. Voltaire dikenal karena tulisan filsafatnya yang tajam, dukungan terhadap hak-hak manusia, dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak mendapatkan pengadilan yang patut. Ia adalah pendukung vokal terhadap reformasi sosial walaupun Perancis saat itu menerapkan aturan sensor ketat dan ancaman hukuman yang keras bagi pelanggarnya. Ia sering menggunakan karyanya untuk mengkritik dogma gereja dan institusi Perancis pada saat itu. Voltaire dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh pada zamannya (*www.wikipedia.org.id*).

Galileo adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia diajukan ke pengadilan gereja Italia pada 22 Juni 1633. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan keyakinan gereja bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Ia divonis dengan hukuman mati. Konfliknya dengan Gereja Katolik Roma adalah

sebuah contoh awal konflik antara otoritas agama dengan kebebasan berpikir (terutama dalam sains) pada masyarakat Barat ([www.wikipedia.org.id](http://www.wikipedia.org.id)).

Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah salah seorang paling penting yang terlibat dalam Gerakan Kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai.

Gandhi adalah seorang Hindu namun dia menyukai pemikiran-pemikiran dari agama-agama lain termasuk Islam dan Kristen. Dia percaya bahwa manusia dari segala agama harus mempunyai hak yang sama dan hidup bersama secara damai di dalam satu negara. Prinsip Gandhi, *satyagraha*, sering diterjemahkan sebagai "jalan yang benar" atau "jalan menuju kebenaran" telah menginspirasi berbagai generasi aktivis-aktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin Luther King, Jr. dan Nelson Mandela. Pada 30 Januari 1948, Gandhi dibunuh seorang lelaki Hindu yang marah kepada Gandhi karena ia dianggap terlalu memihak kepada Muslim ([www.wikipedia.org.id](http://www.wikipedia.org.id)).

Empu Gandring adalah tokoh dalam *Serat Pararaton* yang dikisahkan sebagai seorang pembuat senjata ampuh. Keris buatannya konon telah menewaskan Ken Arok pendiri Kerajaan Tumapel. Dikisahkan dalam *Pararaton* bahwa Ken Arok berniat mencari senjata ampuh untuk membunuh majikannya, yaitu Tunggal Ametung akuwu Tumapel. Ia ingin memiliki sebilah keris yang dapat membunuh hanya sekali tusuk. Bango Samparan pun memperkenalkan Ken Arok pada Empu Gandring. Untuk mewujudkan pesanan Ken Arok, Empu

Gandring meminta waktu setahun. Ken Arok tidak sabar. Ia berjanji akan datang lagi setelah lima bulan.

Lima bulan kemudian, Ken Arok benar-benar datang menemui Empu Gandring. Ia marah melihat keris pesannya baru setengah jadi. Karena marah, keris itu direbut dan digunakan untuk menikam dada Empu Gandring. Meskipun belum sempurna, namun keris itu mampu membelah lumpang batu milik Empu Gandring. Empu Gandring pun tewas terkena keris buatannya sendiri. Namun ia sempat mengutuk kelak keris tersebut akan merenggut nyawa tujuh keturunan Ken Arok, termasuk Ken Arok sendiri ([www.wikipedia.org.id](http://www.wikipedia.org.id)).

Tokoh-tokoh yang dijelaskan dalam uraian di atas adalah tokoh-tokoh yang memiliki keberanian untuk berpikir bebas dan berbeda, tidak "mengekor" pemikiran mayoritas. Mereka memegang teguh apa yang mereka yakini benar. Ancaman kematian sama sekali tidak mampu menyurutkan langkah mereka. Mereka tetap mempertahankan prinsip dan berani menghadapi apapun. Keberanian mereka akhirnya membawa perubahan besar dalam perkembangan dunia.

Sifat tokoh-tokoh tersebut merupakan sifat dasar kritikus yang sejati. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam MTK, tokoh-tokoh tersebut disebut sebagai jelmaan tokoh Denmas yang merupakan tukang kritik sejati.

Dalam naskah MTK, Denmas digambarkan ada di Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada latar tempat. Latar yang digambarkan berada di sebuah ruang, semacam ruang keluarga. Di dalamnya terdapat sebuah kursi goyang yang terbuat dari kayu seperti yang biasa digunakan untuk bersantai. Selain itu, ruang tersebut

juga dilengkapi sebuah meja bergaya kuno, dengan sepasang kursi tua. Perabot-perabot tersebut mengingatkan pada perabot yang biasa dimiliki oleh priyayi Jawa.

...

Sementara pada satu bagian panggung, mereka menyaksikan kursi goyang yang terus bergerak pelan seakan mengingatkan pada ayunan bandul jam. Bergoyang-goyang. Kursi itu temaram dalam cahaya... (Noor, 2006: 78).

Raden Mas Suhikayatno berjalan ke arah meja yang ditempatkan sedemikian rupa menurut kebutuhan tata setting dan artistik. Meja itu bergaya kuno, dengan sepasang kursi yang juga tua. Mengingatkan pada perabot seorang priyayi Jawa. Ada cangkir dan gelas di atas meja itu. Juga majalah dan koran yang tak rapi (Noor, 2006: 93).

Dalam naskah tersebut juga tergambar latar waktu yang mencerminkan tempat di Indonesia. Waktu terus bergerak mulai zaman perang, tahun 1945 saat Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan, masa pemerintahan Soekarno, dan masa pemerintahan Soeharto. Waktu-waktu tersebut digambarkan melalui gambar-gambar dan suara-suara yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu.

...

Semua seperti muncul dan menggulung-gulung dalam ingatan Raden Mas Suhikayatno: suara pesawat supersonic, badai menggemuruh bergulung-gulung, teriakan-teriakan, serentetan perang, suara-suara kemerosak gelombang radio. Di antara suara-suara itu terdengar suara Bung Karno membacakan Proklamasi... lalu menghilang. Muncul suara lain, suara iklan yang lebih modern, lalu kemerosak gelombang radio lagi. Suara-suara dan gambar yang terus mengalir. Suara Bung Karno pidato berapi-api. Lenyap lagi. Dentang lonceng. Jam berdering. Suara Presiden Soeharto berpidato di depan MPR. Gambar-gambar masa silam. Gambar bertumpuk-tumpuk terus menerus. Kemudian perlahan menghilang...

Selain itu digambarkan juga tahun 1998, tahun 2008, tahun 2009, tahun 2011, tahun 2028, tahun 2066, tahun 3001, tahun 3008, tahun 3013, tahun 3022, sampai tahun 3035. Kebanyakan, pergantian tahun tersebut ditandai dengan suara yang menyebutkan tahun pada saat itu, baik suara hologram maupun suara-suara mekanis.

Tiba-tiba terdengar suara, bernada menggema: "Ta-hun 1.9.9.8..."  
(Noor, 2006: 87).

**HOLOGRAM 2:**  
Bangun.. Ini sudah tahun 2028.

...  
**HOLOGRAM 1:**  
Tahun 2066 (Noor, 2006: 129).

**HOLOGRAM 1:**  
Ini tahun 2070... Kamu terselip dipojokkan sejarah. Tak ada lagi yang mengingatmu. Tak ada lagi yang membutuhkanmu (Noor, 2006: 131).

**TERDENGAR SUARA MEKANIS:**  
Tahun 3001 (Noor, 2006: 132).

**TERDENGAR SUARA MEKANIS:**  
Tahun 3008 (Noor, 2006: 132).

**TERDENGAR SUARA MEKANIS:**  
Tahun 3013 (Noor, 2006: 133).

**TERDENGAR SUARA MEKANIS:**  
Tahun 3022 (Noor, 2006: 133).

**TERDENGAR SUARA MEKANIS:**  
Tahun 3035 (Noor, 2006: 134).

Adegan paling banyak terjadi pada tahun 2011. tahun-tahun berikutnya hanya diketahui melalui suara yang menyebutkan tadi. Adegan-adegan terakhir terjadi pada tahun 3035, ketika keadaan Indonesia sudah sangat sempurna dan

tidak ada lagi kekurangan yang bisa dikritik. Bahkan, pembantu Denmas telah berubah menjadi robot.

Terdengar suara Raden Mas Suhikayatno bertanya: “Ini jam berapa... Ini tahun berapa...”

**BAMBANG:**

*(Sambil terus pura-pura sibuk menyapu)* Jam 4... Tahun 2011... (Noor, 2006: 113).

Suara Raden Mas Suhikayatno datar: “Capek... Ini tahun berapa?”

**BAMBANG:**

*(Sudah duduk bersimpuh di dekat kursi goyang itu)* Tahun 2011, Tuan... Saya pijit ya... (Noor, 2006: 117).

Karena berada di Indonesia, kritik yang disampaikan pun berkaitan dengan berbagai masalah yang telah dan tengah terjadi di Indonesia, misalnya tampak dalam kutipan di bawah ini.

**DENMAS:**

Eeeh, malah memaki! Saya kutuk jadi Presiden Indonesia, mampus kamu! *(seperti tiba-tiba sadar, dan mencoba menjelaskan, ke arah penonton)* Lho iya kan? Jadi Presiden Indonesia itu seperti dapat kutukan kok! Apa sih enaknya jadi Presiden Indonesia, coba? Di Indonesia, profesi presiden itu profesi yang sama sekali tidak menarik. Dari dulu kerjanya gitu-gituuuu melulu: selalu nyusahin rakyat. Kalau kalian termasuk golongan orang kreatif, tolong deh, nggak usah punya cita-cita jadi Presiden Indonesia. Malah nanti tidak reatif.

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Presiden Indonesia itu monoton kok. Dari tahun ke tahun, siapa pun yang jadi presiden, ya tugasnya tetep sama: meningkatkan angka...pengangguran; menambah jumlah devi...apa? devisit uang negara...; mencari pinjaman luar negeri, menaikkan harga BBM... Sama sekali nggak kreatif kan? Mbosenin (membosankan)...(Noor, 2006:89-90).

Kondisi yang diungkapkan oleh Denmas dalam MTK tidak berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Semakin waktu berjalan, meskipun Indonesia



telah mengalami pergantian pemimpin berkali-kali dan masing-masing pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi masalah yang terjadi tetap sama, bahkan semakin bertambah. Dari segi ekonomi, permasalahan dapat dilihat pada angka pengangguran dari tahun ke tahun yang bukannya semakin menurun, sebaliknya malah semakin meningkat. Anggaran uang negara pun mengalami defisit, dan yang paling sensitif adalah kenaikan harga BBM. Pada masa pemerintahan SBY yang belum genap empat tahun saja, harga BBM telah dua kali mengalami kenaikan. Perhatikan kutipan artikel di bawah ini.

...  
 Saat ini langkah untuk segera menaikkan harga BBM seakan menjadi sebuah langkah kebijakan paling rasional, paling tepat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan APBN. Opini tersebut terbentuk akibat gencarnya kampanye bahwa penyelamatan APBN akibat tingginya harga minyak dunia hanya dapat diselesaikan dengan menaikkan harga BBM.

Masih segar dalam ingatan kita berbagai upaya penciptaan opini untuk mendukung kenaikan harga BBM sebesar 126% pada bulan Oktober 2005. Saat terjadi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah SBY dan berbagai lembaga pendukung sibuk memberikan argumentasi bahwa dampak buruk yang terjadi hanya bisa diatasi dengan kenaikan harga BBM. Berbagai proposal pun diajukan untuk memuluskan dan mempercepat kenaikan harga BBM. Mulai dari alasan untuk menyelamatkan ekonomi, menjawab ketidakpastian pasar hingga keyakinan bahwa kenaikan harga BBM justru akan menjadi obat untuk mengurangi kemiskinan, dan lain-lain.

Segala argumentasi untuk mendukung kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 akhirnya terbukti ngawur. Angka kemiskinan justru meningkat dari 31,1 juta jiwa (2005) menjadi 39,3 juta jiwa (2006). Demikian pula inflasi mengalami kenaikan tajam sebesar 17,75% (2006). Di sisi industri, kenaikan harga BBM untuk kedua kalinya tahun 2005 tersebut telah mendorong percepatan deindustrialisasi. Bila pada tahun 2004 sektor manufaktur masih tumbuh 7,2% maka pada tahun 2007 hanya tumbuh sebesar 5,1%. Ini terjadi karena industri ditekan dari dua sisi yakni peningkatan biaya produksi dan merosotnya *demand* akibat menurunnya daya

beli masyarakat. Penambahan jumlah pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 10,3% (2005) dan 10,4% (2006) pun akhirnya tidak tereleakkan.

Saat ini desakan untuk segera menaikkan harga BBM kembali terjadi. Sebagaimana tahun 2005, kenaikan harga minyak mentah dunia tidak segera direspon dengan berbagai kebijakan penyelamatan ekonomi tetapi pemerintah SBY justru gencar menciptakan opini pembenaran kenaikan harga BBM. Awalnya pemerintah SBY sibuk menjelaskan bahwa dampak buruk kenaikan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lain. Kemudian disusul dengan pidato presiden SBY yang meminta rakyat memahami bila pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM.

Sebagaimana tahun 2005, sebagian anggota Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, terutama yang selama ini dikenal pro-kreditor dan lembaga internasional, bahkan juga mengusulkan untuk kembali meningkatkan utang. Alternatif ini menunjukkan tidak adanya kreatifitas dan tidak adanya upaya pemerintahan SBY untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia kepada lembaga keuangan internasional. Padahal dalam APBN tahun 2008 telah direncanakan utang baru sebesar Rp 48 triliun dan penerbitan SUN, obligasi, dan lain-lain sebesar Rp 117 triliun (Tim Indonesia Bangkit, [www.erasmuslim.com](http://www.erasmuslim.com)).

Dalam kutipan artikel di atas dikemukakan permasalahan ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintahan SBY dalam menaikkan harga BBM. Berdasarkan kutipan di atas, diketahui bahwa kenaikan BBM berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka inflasi, menurunnya angka pertumbuhan industri, dan bertambahnya utang luar negeri. Setiap kali diberlakukan kenaikan BBM, dampak yang ditimbulkan selalu sama. Akan tetapi pemerintah tetap tidak bergeming.

Dalam MTK, kebijakan presiden yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat itu diparodikan Denmas dengan cara menyebutnya sebagai tugas, kewajiban, dan

tanggung jawab presiden di Indonesia yang tidak kreatif. Dari masa ke masa, dari satu presiden ke presiden yang lain, kebijakannya selalu sama. Dalam teorinya, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab presiden seharusnya meningkatkan kemakmuran rakyat dan hal-hal bagus lainnya, bukan sebaliknya. Tapi kenyataannya, kebijakan presiden dari waktu ke waktu memang tidak berakibat seperti “yang seharusnya” sehingga seolah-olah yang terjadi itulah hasil pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab presiden, menggeser tugas, kewajiban, dan tanggung jawab presiden yang sebenarnya.

Respon pemerintah terhadap kritik diparodikan Denmas melalui perasaan sakit yang ia rasakan ketika kritiknya tidak didengarkan. Sebenarnya, Denmas juga merasa lelah kalau harus terus-terusan mengkritik. Akan tetapi keadaan yang tidak juga membaik membuatnya sakit kalau tidak terus mengkritik. Walaupun tidak ada seorang pun yang mau mendengarkannya, ia bertekad untuk terus mengkritik sampai kapan pun.

DENMAS:

...  
 Dikritik memang sakit... itu tak seberapa. Sebab orang yang suka mengkritik itu justru lebih merasa sakit, bila kritiknya nggak didengerin. (*Jeda*) Untung saya cukup sabar sebagai Tukang Kritik. Saya nggak pernah marah, meski disepelekan. Buat apa marah? Nggak ada gunanya..... (*Lalu berteriak memanggil pembantunya lagi, pelan*) Mbang... Bambang.... orang itu mesti yang sabar.... (*Lama-lama teriakannya makin tinggi dan bernada marah*) Diancuk! Mbang, mana surat itu!... Bambaang!! (*ke arah penonton, masih menggeram marah*) Kalian lihat sendiri kan, dia selalu menyepelekan saya.... tapi saya tetap sabar... (*kembali berteriak marah*) Kamu taruh mana surat itu?!

(*Sampai kemudian merasa disepelekan, dan mulai mengeluh kepada siapapun yang mendengarnya, mengeluh ke arah penonton*) Sakiittt ati saya. Sakit, sakit, sakittt kit kit kit.... Kadang saya pikir, buat apa saya teriak-teriak marah begitu. Buat

apa saya terus-terusan mengkritik.... Kadang saya merasa lelah juga kok jadi Tukang Kritik. Saya pingin berhenti mengkritik, saya sendiri yang malah sakit. Baru semenit tidak mengkritik, mulut saya langsung pegel-pegel. Sehari tidak mengkritik, langsung bisulan pantat saya (Noor, 2006: 95-96).

Denmas merupakan gambaran kritik yang tidak didengarkan dan disepelekan. Saat ini, kritik di Indonesia memang tampak tidak berguna karena tidak ada yang mau “mendengarkan”. Demonstrasi yang terjadi di mana-mana seolah hanya menjadi tontonan. Mereka diberi izin untuk berdemonstrasi, diterima perwakilannya untuk berbicara, tapi sesudah itu tidak ada kelanjutannya. Kritik terasa semakin sia-sia. Acara-acara televisi bermuatan kritik seperti Republik Mimpi memang sudah tidak lagi dicekal. Akan tetapi, muatan kritik dalam acara tersebut seolah-olah hanya lelucon belaka, hanya menjadi tontonan, menjadi hiburan, tanpa perlu diperhatikan.

Dalam MTK, sikap pemerintah yang demikian diparodikan melalui sosok Bambang yang tidak mau mendengarkan Denmas dan menyepelkannya. Bambang yang pembantu Denmas merupakan parodi atas SBY—Susilo Bambang Yudoyono—Presiden RI saat ini. Hal itu seperti yang disebutkan pengarang dalam kutipan berikut:

Bambang adalah tokoh pembantu dalam monolog ini. Nama Bambang dipakai, karena ketika naskah ini ditulis, nama presiden RI adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kelak, bila presiden berganti dan naskah ini dipentaskan, maka nama Bambang harus diganti dengan nama presiden yang sedang menjabat (Noor, 2006:83).

Parodi atas SBY melalui sosok Bambang juga diungkapkan oleh tokoh Denmas, bahkan oleh tokoh Bambang sendiri.

DENMAS:

(Menyemburkan minuman dari mulutnya, ngomel dan mengeluh)  
Astaga... Bambang! Ini kan teh dua hari yang lalu. (Berdahak seperti berusaha mengeluarkan sesuatu dari kerongkongannya)  
Saya sampai tersedak cicak! Bambang!!! Bambanggg... (Jeda)  
Bener-bener punya bakat jadi presiden dia: kagak dengar meski sudah diteriakin... Alias *budeg*! Kata orang, *budeg* itu memang penyakit permanen presiden (Noor, 2006:94).

BAMBANG:

...  
Saya emang nggak becus *atuh* jadi pembantu. Nama saya aja Bambang. Mana *teh* ada pembantu namanya Bambang. Saya *mah* pantesnya jadi presiden, *uiy*... Meski jerawatan gini! (Noor, 2006: 104).

Bambang adalah pembantu Denmas. Sebenarnya—seperti orang pada umumnya—Bambang merasa tidak pantas menjadi pembantu. Nama Bambang menurutnya lebih pantas menjadi nama presiden. Awalnya ia menganggap menjadi pembantu Denmas adalah kutukan keluarga yang diwarisinya dari moyangnya yang juga menjadi pembantu Denmas. Tapi kemudian ia bisa menerima dan menganggap dirinya sebagai golongan pembantu priyayi, kasta tertinggi di tingkatan pembantu. Hal itu ia simpulkan karena menurutnya ia adalah pemegang trah sejati seorang pembantu yang murni keturunan pembantu. Seperti tampak dalam kutipan berikut:

BAMBANG:

...  
Saya emang nggak becus *atuh* jadi pembantu. Nama saya aja Bambang. Mana *teh* ada pembantu namanya Bambang. Saya *mah* pantesnya jadi presiden, *uiy*... Meski jerawatan gini! (Noor, 2006: 104).

...  
Jadi, trah saya ini trah pembantu. Asli. Orisinil. Darah saya itu adalah darah murni seorang pembantu. Kalau di dunia sihir, saya ini disebut penyihir murni. Bukan *mugle*, seperti Harry Potter. Jadi

darah pembantu yang mengalir di tubuh saya ini termasuk jenis darah ningrat. Jenis pembantu priyayi. Ini kasta tertinggi di tingkatan pembantu. Kalau kasta paling rendah ya kasta pembantu jenis TKI itu... Disiksaaaa melulu... (Noor, 2006: 105-106).

Secara individu, tidak ada persamaan antara Bambang dan SBY selain nama. Parodi Bambang terhadap SBY adalah dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesia. Bambang digambarkan sebagai pembantu Denmas yang tukang kritik. Hubungan keduanya adalah hubungan majikan dan pembantu, hubungan atasan dan bawahan. Secara etika, pembantu memang harus mau melayani dan menghormati majikannya. SBY diparodikan sebagai Bambang ini dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya jabatan presiden adalah “pembantu rakyat”, pembantu banyak “suara” yang diwakili sosok tukang kritik. Ia adalah pembantu yang “diperintah konstitusi” untuk bekerja menyejahterakan rakyat yang menggaji dan membayarnya melalui bermacam-macam pajak.

Berdasarkan identifikasi parodi di atas, diketahui bahwa MTK merupakan parodi atas kritik yang akan selalu ada di setiap zaman dan di setiap tempat. Kritik akan “mati” yang berarti tidak berperan apabila tidak didengarkan. Hal itu merupakan parodi atas kondisi pemerintahan Indonesia yang tidak peduli atau bahkan antipati terhadap kritik. Dengan demikian, model dapat ditemukan yaitu kritik atas ketidakpedulian pemerintah terhadap kritik.

## 2.6 Tuan Politikus Sowan Raja Jin (TPSRJ)

Seperti halnya naskah *Matinya Toekang Kritik*, naskah berjudul *Tuan Politikus Sowan Raja Jin* ini termasuk *monoplay*. Dalam naskah TPSRJ, terdapat tiga orang tokoh yaitu Raja Jin, Politikus, dan Juru Kunci.

Tokoh Politikus ini adalah seorang laki-laki muda yang memiliki sifat tidak percaya diri dan mudah panik. Selain itu, ia memiliki sifat curang dan culas. Berbagai macam kejahatan sudah pernah dilakukannya.

RAJA JIN:

...

Kamu sudah melakukan hampir semua kecurangan dan keculasan. Dari korupsi sampai kolusi. Dari adu ayam sampai pelanggaran HAM. Dari kerusakan lingkungan sampai kekerasan perempuan...Semua sudah kamu lakukan. Paling..., yang belum kamu coba memakai narkoba. Meski saya tahu, diam-diam kamu sesekali pakai Viagra (Noor, 2006: 161).

Dalam usaha memperoleh apa yang diinginkan, politikus tidak berupaya menggunakan kemampuannya dan bekerja keras, tetapi lebih memilih menggunakan cara instan yang menurut sebagian orang tidak wajar, yaitu menggunakan cara mistis.

Walaupun disebut dengan nama politikus, ia dapat dikatakan belum memiliki nama di dunia perpolitikan. Hal itulah yang menyebabkannya datang ke sebuah makam tua yang dihuni Raja Jin untuk meminta berkah agar ia menjadi politikus yang “sukses” menurut ukurannya. Sukses baginya adalah masuk dalam Daftar Politikus Busuk yang dibuat oleh sekelompok orang. Baginya, masuk dalam daftar tersebut berarti menjadikannya terkenal dan itu memudahkan jalan baginya untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Sebenarnya, ia menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh politikus-politikus lain itu adalah

sesuatu yang salah, tetapi karena realita yang ia lihat bahwa sesuatu yang salah itu justru yang “menang”, ia menjadi tidak peduli dan mengikuti perbuatan politikus-politikus lain tersebut.

**POLITIKUS:**

Saya justru sedih, Pak... Karena itu artinya saya belum sukses menjadi politikus yang baik dan benar. Bukankah kesuksesan seorang politikus diukur dari tingkat keculasan dan kebusukannya? *Semangkin* pintar memutar-mutar kebohongan, *semangkin* canggih memanipulasi keadaan, *semangkin* tinggi lah status dan martabat politikus. Karena itulah, Pak..., tolong, tolong bagaimana caranya agar nama saya masuk dalam Daftar Politikus Busuk.

Saya kan sudah sering *nyekar* (ziarah ke makam) kemari. Sowan sama Kanjeng Sunan Raja Jin di sini... Apa masih kurang *ubo rampe* (sesaji) saya? Kalau saya harus nambah, saya ikhlas kok, Pak. Sebutkan saja berapa. Saya pasti siapkan dana. Asal nama saya masuk dalam Daftar Politikus Busuk. Saya percaya, bapak pasti bisa membantu saya...Tolong, ya Pak. Bener (Noor, 2006: 149).

...

Ini, sebagai dana awal... kalau perlu kembang setaman dan kemenyan, saya juga sudah siapkan. Yang penting usahakan saya menjadi politikus busuk. Kalau saya tidak terdaftar sebagai politisi busuk, bagaimana mungkin saya bisa menjadi calon anggota legislatif?

Karena itu, tolonglah, Pak... Saya memohon dengan amat sangat, masukkan saya dalam Daftar Politikus Busuk. Agar karier politik saya naik. Nama saya melejit. Jadi bahan pemberitaan... (Noor, 2006: 153).

Juru Kunci digambarkan sebagai seorang laki-laki yang sudah tampak tua. Ia berasal dari golongan ekonomi bawah. Satu-satunya pekerjaannya adalah menjadi juru kunci sebuah makam tua yang oleh banyak orang dipercayai dihuni oleh Raja Jin yang dapat mengabulkan apa yang mereka inginkan. Karena menjadi juru kunci adalah satu-satunya pekerjaan, ia sangat kebingungan ketika



makam yang ditunggunya mulai sepi karena banyak orang yang sudah tidak mempercayai tuah makam tersebut.

Dari satu arah muncul Juru Kunci makam itu. Agak tertatih, melangkah hati-hati. Ia terlihat tua. Memakai sorjan dan ikat kepala hitam. Ia berjalan mondar-mandir di seputar makam. Mengamati keadaan, lalu mengambil kotak sumbangan, membukanya. Melihat dan kecewa karena tak ada uang di dalam kotak sumbangan itu... (Noor, 2006: 144).

#### JURU KUNCI:

Sekarang beginilah suasana makam ini...Selalu sepiiii...Ini gara-gara aaa apa itu...(mengingat-ingat) eee, Gerakan Anti Politikus Busuk. Gara-gara Gerakan Anti Politikus Busuk itu, omzet saya langsung menurun drastis. Mangkel aku! Siapa itu para penggagasnya? Siapa? Teten? Basri? Siapa? Franky?

Saya santet baru tau rasa!

Lho, saya ini berhak marah. Sebab karena merekalah stabilitas ekonomi keluarga saya jadi terganggu. Makam jadi sepi. Nggak ada lagi orang yang datang kemari (Noor, 2006: 145).

Seperti juga tokoh-tokoh lain dalam naskah ini, Juru Kunci adalah seseorang yang kritis. Ia mengetahui persis kondisi sosial dan politik yang tengah terjadi. Hal itu tidak lepas dari “pergaulannya” dengan para politikus yang sering datang ke makam tua. Ia mengenal perilaku para politikus itu dengan baik, khususnya sifat politikus yang sangat percaya dengan hal-hal yang berbau mistis.

Tokoh Raja Jin digambarkan sebagai sosok yang sudah berusia tua. Ia sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, ia adalah pemimpin para politikus busuk. Walaupun sudah *lengser*, sebagai mantan pemimpin, Raja Jin masih sangat perhatian dan mendukung generasi penerusnya sesama politikus busuk. Ia bersedia membantu siapa saja yang berupaya meningkatkan kebusukan.

Sudah bertahun-tahun ia menjadi penguasa beringin tua, tapi pada akhirnya ia memilih tinggal di istana barunya, yaitu Istana Cendana.

**RAJA JIN:**

...

Itu wajar. Kamu masih muda. Beda dengan saya yang sudah *sepuh* begini. Makanya saya memilih *lengser mandito* (turun tahta), jadi Jin, ketimbang meneruskan karier saya sebagai pemimpin politikus busuk. Biarlah para politikus itu berhimpun sendiri dalam satu partai yang mengembangkan paradigma kebusukan baru. Partai baru dengan kebusukan baru.

Karena itu, kamu ndak usah daripada marah-marah begitu ya... Pulanglah. Doa restu dan kebusukanku menyertai kamu...

Jangan khawatir, meski saya sudah lengser di sini, sebenarnya daripada saya tetep selalu urun rembug dalam setiap upaya meningkatkan kebusukan.

Sekarang pulanglah... (Noor, 2006: 161-162).

**RAJA JIN:**

Oh ya... mungkin saya akan pindah dari tempat ini. Di sini *sumuk* (panas) dan nggak terawat. Tempat ini tidak baik buat encok saya. Jadi, *mbesok-mbesok*, kalau kamu pingin ketemu saya, datang saja ke *tetirah* baru saya... Ke istana baru saya. Istana Cendana (Noor, 2006: 162-163).

Apabila disejajarkan, sosok Raja Jin dalam TPSRJ memiliki keterkaitan dengan Soeharto.

Raja Jin	Soeharto
Sepuh/tua	Berusia 82 tahun (ketika naskah ini ditulis)
Lengser mandito/turun tahta dari jabatan pemimpin politikus busuk	Lengser/turun dari kursi presiden RI/penguasa Orde Baru
Orang Jawa	Orang Jawa
Penghuni pohon beringin tua yang mulai sepi	Sesepuh partai Golkar yang memiliki lambang pohon beringin. Partai yang sudah berusia tua. Semenjak reformasi sudah berkurang pendukungnya dibandingkan masa Orde Baru
Tinggal di Istana Cendana	Berkediaman di jalan Cendana
Menggunakan dialek sufiks "ken" dan kata "daripada"	Menggunakan dialek sufiks "ken" dan kata "daripada"
Mengandung aura mistis	Dikenal dengan mistisisme Jawa yang dianutnya
Menerima <i>ubo rampe</i> (sesaji) berupa dana	Dikabarkan masih menerima "upeti" dari pejabat sekarang walaupun secara sembunyi-sembunyi

Tabel 5.  
Relasi Raja Jin dan Soeharto

Pada saat naskah ini ditulis, Soeharto sudah berusia sekitar 82 tahun, usia yang sudah tergolong tua. Ia juga telah lengser dari jabatan presiden yang telah dilakoninya selama 32 tahun. Selama ini, ia dikenal sebagai pemimpin Orde Baru, sebuah rezim yang pada era reformasi (berani) disebut sebagai rezim penuh kebusukan yang dipenuhi oknum yang juga busuk.

Parodi atas Soeharto melalui tokoh Raja Jin juga tampak melalui penggunaan idiolek dan dialek Jawa. Penggunaan dialek Jawa oleh Raja Jin sekaligus menunjukkan bahwa ia berasal dari Jawa, sama dengan Soeharto. Dalam

naskah TPSRJ, dialek Jawa ditemukan dalam dialog Raja Jin ketika berdialog dengan Politikus.

RAJA JIN:

...

Itu wajar. Kamu masih muda. Beda dengan saya yang sudah *sepuh* begini. Makanya saya memilih *lengser mandito* (turun tahta), jadi Jin, ketimbang meneruskan karier saya sebagai pemimpin politikus busuk. Biarlah para politikus itu berhimpun sendiri dalam satu partai yang mengembangkan paradigma kebusukan baru. Partai baru dengan kebusukan baru.

RAJA JIN:

Oh ya... mungkin saya akan pindah dari tempat ini. Di sini *sumuk* (panas) dan nggak terawat. Tempat ini tidak baik buat encok saya. Jadi, *mbesok-mbesok*, kalau kamu pingin ketemu saya, datang saja ke *tetirah* baru saya... Ke istana baru saya. Istana Cendana (Noor, 2006: 162-163).

Penggunaan idiolek tampak melalui dialog antara Politikus dan Raja Jin.

POLITIKUS:

Saya justru sedih, Pak... Karena itu artinya saya belum sukses menjadi politikus yang baik dan benar. Bukankah kesuksesan seorang politikus diukur dari tingkat keculasan dan kebusukannya. *Semangkin* pintar memutar-mutar kebohongan, *semangkin* canggih memanipulasi keadaan, *semangkin* tinggilah status dan martabat politikus (Noor, 2006:149).

RAJA JIN:

...

Jangan khawatir, meski saya sudah *lengser* di sini, sebenarnya daripada saya tetep selalu urun rembug dalam setiap upaya meningkatkan kebusukan (Noor, 2006:162).

Sufiks “ken”, penggunaan kata “daripada” yang dapat dikatakan tidak tepat, dan kata “semangkin” untuk maksud “semakin” pernah sangat populer pada era Orde Baru. Hal itu tidak terlepas dari “pemilik” idiolek tersebut yaitu Soeharto yang notabene adalah penguasa tunggal Orde Baru. Hal-hal di atas kemudian

menjadi ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari sosok Soeharto. Kekuasaan Soeharto yang “seolah-olah” mutlak membuat siapa saja—terutama kroni-kroninya—“berlomba-lomba” untuk mendapat “perhatian” dari sang penguasa, sehingga pada era tersebut, banyak ditemui pejabat-pejabat pemerintah yang “mengekor” Soeharto dengan menggunakan kata-kata tersebut.

Latar tempat dalam cerita ini berada di suatu tempat yang sepi. Di sana terdapat sebuah pohon beringin yang sudah berusia tua. Di sekitar pohon tersebut tampak sisa dupa persembahan dan tebaran bunga setaman. Di salah satu sisi pohon beringin tersebut tampak sebuah makam tua. Konon, pohon beringin tersebut dihuni oleh Raja Jin yang dapat mengabulkan permintaan siapa saja yang berziarah ke sana. Sebelumnya, banyak orang yang datang ke sana untuk memperoleh berkah dari Raja Jin, terutama dari kalangan politikus. Beringin tua dan makam itu tidak pernah sepi pengunjung, terutama pada saat-saat menjelang pemilu dan penyusunan kabinet. Akan tetapi pada beberapa hari terakhir, yakni sejak adanya Gerakan Anti Politikus Busuk, makam itu menjadi sepi karena tidak ada lagi orang yang mau datang ke sana.

Latar pohon beringin tua sebagai tempat bersemayam Raja Jin merupakan parodi. Pohon beringin adalah lambang partai Golkar, partai yang merupakan kendaraan politik Soeharto. Selain itu, parodi juga tampak melalui pemunculan tokoh politikus yang menjadi “anak buah” Raja Jin untuk menggambarkan “anak buah” Soeharto yang sampai sekarang masih berkuasa di bidang politik.

Pohon Beringin juga merupakan parodi atas kondisi Golkar yang tidak “seramai” masa Orde Baru. Hal itu diparodikan melalui pohon beringin tua yang

mulai sepi, tidak seperti sebelumnya. Pada masa Orde Baru, Golkar adalah satu-satunya partai pilihan bagi siapa saja yang ingin berkuasa. Seiring dengan runtuhnya Orde Baru, Golkar mulai banyak ditinggalkan oleh anggotanya yang banyak mendirikan partai sendiri. Walaupun demikian, bukan berarti Golkar benar-benar “sepi”. Oknum-oknum Orde Baru yang dalam TPSRJ digambarkan melalui tokoh Politikus yang merupakan “anak buah” Raja Jin masih banyak yang “bercokol” di sana, bahkan di pemerintahan (lihat lampiran 3).

Dalam TPSRJ, Raja Jin digambarkan harus diberi *ubo rampe* atau sesaji oleh siapa saja yang ingin mendapatkan berkah darinya. Sementara Soeharto dikabarkan masih menerima “upeti” dari pemerintahan yang menggantikan kedudukannya. Sosok Raja Jin sangat dihormati oleh Politikus. Hal itu dapat dilihat dari caranya memanggil Raja Jin dengan sebutan Kanjeng Sunan dan dialek yang digunakan ketika berbicara dengan Raja Jin. Kesan hormat Politikus itu tampak pada kutipan di bawah ini.

**RAJA JIN:**

Oalah ogleng ogleng celeng degleng... Dari baunya saya sudah tahu... Kamu pasti politikus busuk. Politikus penghasil *burket!*

*Terdengar suara Politikus menjawab:* “Saya Kanjeng Sunan Raja Jin....”

**RAJA JIN:**

Terus terang saya kecewa dengan kamu Nakmas Politikus... Kamu benar-benar masih dungu dan bebal.

*Kembali suara Politikus menjawab:* “Saya Kanjeng Sunan Raja Jin...” (Noor, 2006:159).

Di Indonesia, Soeharto masih sangat dihormati oleh pemerintah. Bahkan saking hormatnya, pemerintah sampai-sampai lupa dengan kejahatan yang sudah

dilakukannya sehingga “lupa” pula untuk mengadilinya. Ketika Soeharto akhirnya meninggal, ia diagung-agungkan sebagai pahlawan. Hal-hal yang “diakui” sebagai jasa Soeharto kembali didengung-dengungkan seperti pada era Orde Baru. Masyarakat pun dibuat terbius dengan segala cerita kepahlawanan itu.

Parodi juga tampak melalui usaha keras tokoh Politikus agar namanya dimasukkan dalam Daftar Politikus Busuk dengan alasan supaya semakin terkenal dan dapat terpilih menjadi calon legislatif.

Daftar Politikus Busuk adalah daftar nama-nama yang disusun oleh sekelompok orang yang mencanangkan Gerakan Nasional Tidak Pilih Politikus Busuk (GNTPPB) atau yang lebih populer dengan sebutan Gerakan Anti Politikus Busuk. GNTPPB dideklarasikan pada 29 Desember 2003 di Jakarta oleh Faisal Fasri, Teten Masduki, Franky Sahilatua, dan lain-lain. Gerakan moral ini bertujuan untuk menghadang masuknya (kembali) para politisi yang dianggap punya “dosa-dosa” antara lain sebagai pelaku korupsi, pelanggar HAM (hak asasi manusia), pelaku kejahatan lingkungan, pelaku kejahatan seksual, atau pelaku kekerasan terhadap perempuan, serta pernah tersangkut kasus narkoba. Melalui gerakan moral ini, rakyat diajak untuk “melek” dan diharapkan pada saat pemungutan suara untuk tidak memberikan suaranya kepada mereka yang termasuk dalam kategori tersebut. GNTPPB kemudian mengeluarkan daftar nama-nama yang masuk dalam kategori tersebut ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Kenyataannya, nama-nama politikus yang masuk dalam daftar tersebut adalah nama-nama yang sangat populer dalam kancah perpolitikan nasional.

Bahkan, sebagian besar dari mereka adalah calon legislatif dengan nomor urut satu di masing-masing dapil mereka.

Analogi tokoh Politikus dalam naskah TPSRJ inilah yang tampak sebagai parodi. Ketika melihat nama-nama dalam daftar politikus busuk yang didominasi oleh nama-nama politikus terkenal dan calon legislatif, ia berkesimpulan bahwa untuk menjadi terkenal dan menjadi calon legislatif, ia harus masuk dalam daftar politikus tersebut. Alasan itulah yang membawanya datang menemui Raja Jin untuk meminta berkah agar namanya bisa masuk dalam daftar tersebut dan keinginannya menjadi politikus busuk yang “sukses” bisa terkabul.

Berdasarkan proses penyejajaran di atas, diketahui bahwa Raja Jin dalam TPSRJ memiliki relasi positif dengan Soeharto. Relasi positif tersebut merupakan bentuk parodi dengan cara mengungkapkan kembali sosok Soeharto yang fenomenal melalui tokoh Raja Jin. Dengan ditampilkannya tokoh Raja Jin dan Politikus dengan berbagai permasalahannya, TPSRJ menjadi semacam “peringat” bahwa masa Orde Baru yang dianggap telah berakhir ternyata masih berkuasa. Dengan demikian, model dapat ditemukan yaitu kritik atas ketidakwaspadaan terhadap bahaya Orde Baru.

## **2.7 Buket Hitam (BH)**

Asih dan Munir adalah tokoh dalam naskah *Buket Hitam*. Menariknya, Munir merupakan tokoh yang paling banyak dibicarakan dalam naskah ini, ia juga tokoh yang mengalami peristiwa, akan tetapi Munir tidak digambarkan muncul



dan mendapatkan peran. Ia muncul melalui pembicaraan Asih, tokoh yang merupakan istri Munir.

Munir digambarkan sebagai laki-laki berusia 40-an tahun. Berwajah tampan dan simpatik. Dilihat secara ekonomi, Munir termasuk golongan pas-pasan. Ia adalah seorang aktivis. Orang yang cerdas dan pandai. Lulusan sebuah perguruan tinggi.

**ASIH:**

Ehh, jangan salah paham. Saya bukan lagi mengeluh jadi istri aktivis. Saya sayang kok ama Bang Munir. Cinta. Bang Munir itu orangnya pintar! Yah, namanya juga aktivis, kan ya harus pintar. Setidaknya seorang aktivis itu pintar dalam dua hal. Pertama, pintar ngomong. Kedua, pintar bikin proposal... (Noor, 2006: 192).

Ia seorang aktivis sejati yang mati-matian membela kebenaran. Idealis. Dalam memperjuangkan kebenaran, ia tidak gentar terhadap apa pun. Ia adalah orang yang sangat pemberani menghadapi berbagai risiko. Selalu kritis dan berusaha membela kaum tertindas untuk mendapatkan haknya. Munir yang seorang aktivis digambarkan selalu mendapat teror berkaitan dengan aktivitasnya. Pada akhirnya, Munir diceritakan meninggal karena serangan orang yang datang ke rumahnya. Munir digambarkan sebagai orang yang kritis dan idealis. Oleh karena itu, ia selalu menjadi incaran aparat.

Makin lama teriakan Asih makin pelan, terdengar semacam rintihan tak berdaya. Mencakar dan menyayat. Hingga cahaya perlahan menggelap. Terdengar lagu kesenduan mengambang. Lagu *requiem* kematian yang hitam. Sampai kemudian perlahan-lahan cahaya kembali menyorot. Terutama ke bagian *buffet*, di mana di atasnya tampak foto mendiang suami Asih. *Buffet* itu serupa altar persembahan untuk arwah. Ada lilin menyala di sana (Noor, 2006: 213).

Tokoh ini mengingatkan pada tokoh Munir S.H., salah seorang pejuang HAM Indonesia yang dikenal sangat pemberani dan idealis (lihat lampiran 4). Keseriusan dalam bidang hukum dan persoalan sosial di sekitarnya diwujudkan dalam bentuk pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus, mendirikan/bergabung dengan berbagai organisasi, bahkan juga membantu pemerintah dalam tim investigasi dan tim penyusunan Rancangan Undang-Undang. Selain itu, ia juga aktif menulis di media cetak dan elektronik dengan tema-tema seputar HAM, hukum, reformasi militer dan kepolisian, (transisi) politik dan perburuhan. Saat menjabat Koordinator KontraS namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu ([www.kontras.com](http://www.kontras.com)).

Pada akhirnya Munir dibunuh di era demokrasi dan keterbukaan serta harapan akan hadirnya sebuah Indonesia yang dia cita-citakan mulai berkembang. Ia dibunuh saat sedang berada di atas pesawat Garuda dalam perjalanannya menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi. Ia dibunuh dengan racun arsenik yang telah dicampurkan ke dalam makanannya ([www.wikipedia.org.id](http://www.wikipedia.org.id)).

Munir dalam naskah BH digambarkan sebagai seorang laki-laki yang sangat penyayang dan perhatian terhadap istri, keluarga, dan semua orang.

ASIH:

...

Nah, ini kelebihan Bang Munir. Dia tuh penuh perhatian. Nggak cuma penuh perhatian ama orang-orang yang tertindas, tapi juga penuh perhatian ama istrinya. Sama saya (Noor, 2006: 193).

ASIH:

Beruntung banget lho saya kawin ama Bang Munir. Nggak pernah kasar ama saya... (Noor, 2006: 194).

Sementara secara pribadi, Munir S.H. dikenal sebagai sosok yang suka bercanda dan sangat mencintai istri dan kedua anaknya. Ia seorang ayah dan suami yang baik dan sangat dicintai keluarganya. Ia memperistri Suciwati, seorang wanita pemberani yang kelak melanjutkan kiprah suaminya dalam perjuangan memperoleh keadilan ([www.wikipedia.org.id](http://www.wikipedia.org.id)).

Suciwati adalah seorang wanita yang berasal dari golongan sosial menengah ke bawah. Ia bekerja menjadi buruh pabrik. Walaupun demikian, ia sangat pemberani, cerdas, kritis, dan pantang menyerah. Tokoh Suciwati ini diparodikan dalam naskah BH melalui tokoh Asih, istri Munir. Asih adalah seorang wanita yang polos dan sederhana dan berpendidikan SMA. Pendidikannya yang hanya SMA membuatnya merasa tidak menjadi orang yang pandai. Akan tetapi, sejak menjadi istri Munir, ia mau belajar karena ia tidak mau kalah pandai dengan Munir.

ASIH:

...

Maklumin dong, saya kan nggak sepinter Bang Munir. Tapi Bang Munir nggak ngrendahin kok. Dia bilang “Kartini juga dulunya *kagak* pinter-pinter amat, cuma karena rajin belajar dan mau ngebaca buku, makanya jadi pinter.” Karena itu, Bang Munir pingin saya juga rajin ngebaca. Tuh, dia beliin saya banyak buku. Biar saya nggak cuma baca *Pos Kota*. Nggak cuma ngebaca ‘Nah Ini Dia’.

Makanya, meski kelihatan o’on (Bloon, bodoh) gini, saya juga ngerti kok soal kekerasan (Noor, 2006: 202).

Penampilannya yang polos dan sederhana ternyata menyimpan jiwa yang kritis dan pemberani. Ia juga orang yang teguh pendirian. Ia melakukan apa yang dianggapnya benar, walaupun orang lain menentanginya. Pengetahuannya pun

semakin luas. Hal itu menimbulkan sikap kritisnya terhadap berbagai hal walaupun kritik-kritiknya disampaikan dengan gaya yang polos dan ceplas-ceplos.

**ASIH:**

Untunglah Bang Munir jadi aktivis. Jadi *kagak* ada yang bisa dikorupsi. Aktivis mah *kagak* bisa korupsi... Kecuali terpaksa. Kecuali jadi aktivis sekaligus merangkap jadi anggota KPU kali ya... (Noor, 2006: 196).

**ASIH:**

Saya sebenarnya sering nyuruh Bang Munir cari kerjaan lain. Jangan jadi aktivis terus kayak gitu. Cari kerja apa kek. Serah deh kerja apa saja. Asal jangan jadi pegawai negeri. Bukannya apa-apa. Saya ogah kalau disuruh ikut Dharma Wanita. Nggak enak ikut Dharma Wanita, ntar kalau mau nyumbang dan ngasih bantuan ke panti asuhan aja, mesti diliput koran (Noor, 2006: 199).

Asih sangat mencintai suaminya. Ketika sang suami tidak berada di rumah, ia selalu diliputi kecemasan dan kekhawatiran. Hal itu disebabkan ia menyadari bahaya yang mengancam suaminya setiap saat. Ia pun berusaha melindungi suaminya.

**ASIH:**

...

Makanya saya selalu bersyukur, karena dapat jodoh seperti Bang Munir. Semoga aja dia selalu selamat. Habis, saya suka ngeri sendiri sih. Sering was-was, Bang Munir kena apa-apa (Noor, 2006: 198).

**ASIH:**

Kalian tadi denger ketukan itu? Entahlah... mungkin cuma saya saja yang cemas. Saya sering tergeragap kaget kalau mendengar ketukan yang kayak begitu. Mungkin sebenarnya nggak ada suara apa-apa. Tapi saya bener-bener seperti mendengar suara ketukan... saya jadi takut setiap kali mendengar ketukan. Takut itu kabar buruk. Gimana kalau tiba-tiba Bang Munir diculik. Hilang. Atau diracun pakai arsenik... (Noor, 2006: 198-199).

Sementara kecintaan Suciwati terhadap suaminya dibuktikan melalui usaha mati-matiannya untuk membongkar kasus kematian sang suami. Segala cara ia tempuh. Walaupun usahanya selalu menghadapi jalan buntu, ia tidak pernah menyerah dan putus asa.

Parodi atas sosok Munir juga tampak melalui penggambaran latar. Latar dalam cerita ini adalah rumah Asih, tepatnya di ruang tamu sederhana yang dilengkapi meja kursi yang juga sederhana dan tua tapi tetap terawat. Ruang tamu itu sekaligus menjadi ruang keluarga. Di dinding ruang tersebut, terdapat beberapa poster pergerakan. Ada potret seorang laki-laki yang merupakan pemilik rumah tersebut. Juga ada foto perkawinan yang dibingkai dengan pigura sederhana.

Ruang tamu rumah sederhana, dengan meja kursi yang sederhana-tua tapi terawat. Ruang tamu itu nampaknya menjadi ruang keluarga juga. Ada bantal di kursi panjang, mengesankan sering dipakai tiduran sembari baca-baca atau nonton televisi. Ada buku dan koran serta majalah yang tergeletak tak rapi di atas meja. Sementara televisi 14” model lama, terlihat di atas *buffet* yang sekaligus digunakan sebagai rak buku (Noor, 2006: 186).

*Di dinding nampak beberapa poster pergerakan. Ada potret seorang lelaki—pemilik rumah itu—yang nanti akan diketahui bernama Munir, suami Asih—tokoh dalam monolog ini. Juga ada foto perkawinan dengan bingkai kayu yang tak mewah. Sementara di kapstok dengan cermin oval, terlihat baju dan celana laki-laki yang tergantung. Meja telepon ada di sisi lainnya (Noor, 2006: 187).*

...

Kalau mau “bermain-main imaji”, foto yang terpasang ini boleh juga berupa foto Munir (almarhum) itu, yang secara visual memang khas dan gampang dikenal (Noor, 2006:187).

Penggambaran sebuah ruang tamu yang sederhana merupakan gambaran rumah Munir dan Suciwati yang sederhana. Gambaran rumah tersebut juga menggambarkan kehidupan mereka yang juga sederhana. Sedangkan poster-poster

pergerakan yang terempel di dinding ruangan tersebut menggambarkan sang pemilik rumah yang tokoh pergerakan.

Munir dikenal memiliki kepekaan dan kepedulian tinggi terhadap orang-orang yang menjadi korban penindasan “sistem”. Untuk itu, ia tidak segan-segan melakukan pembelaan walaupun risikonya sangat berat karena berhadapan dengan kekuatan paling besar di negeri ini. Akibatnya, Munir akhirnya menjadi korban keberingasan “kekuatan besar” yang sampai sekarang masih berusaha ditutup-tutupi itu.

Keterkaitan Munir dengan tokoh Munir dalam BH dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Munir dalam naskah <i>Buket Hitam</i>	Munir, S.H.
Aktivis	Aktivis
Kritis, idealis, peduli, pemberani	Kritis, idealis, peduli, pemberani
Sangat mencintai keluarga	Sangat mencintai keluarga
Beristrikan seorang wanita yang polos tapi kritis dan pemberani	Beristrikan seorang wanita yang kritis, pemberani, dan mengikuti jejak suami
Dibunuh dalam peristiwa serangan orang tak dikenal di rumahnya	Dibunuh dalam konspirasi intelejen tingkat tinggi di atas pesawat Garuda

Tabel 6.  
Relasi Munir dalam naskah BH dan Munir S.H.

Tokoh Munir dalam BH adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh tentara. Tentara merupakan gambaran perwakilan kekuasaan yang bertugas “mengamankan” negara, termasuk dari “ancaman” para aktivis yang dianggap bisa membahayakan stabilitas keamanan (kekuasaan) negara. Kekerasan yang dilakukan oleh tentara diparodikan dalam BH melalui puisi yang dibacakan Asih di bawah ini.

ACEH

Lihatlah kekerasan di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, kini dikurangi Timor-Timur. Sambung-menyambung menjadi tragedi. Dari Tanjungpriuk sampai Situbondo. Dari Ambon sampai Poso. Buah karya... Tentara kita (Noor, 2006: 203).

Kekerasan di Indonesia yang dilakukan oleh tentara terjadi di banyak tempat. Misalnya peristiwa memiriskan yang terjadi di Tanjungpriok, Jakarta pada tanggal 12 September 1984, dalam peristiwa tersebut, tercatat 40 orang tewas di tangan petugas. Dalam Kerusuhan Situbondo, 10 Oktober 1996, dilaporkan lima orang tewas. Peristiwa Waduk Nipah di Sampang menewaskan tiga orang, dan yang terbaru insiden Alastlogo yang menelan korban empat orang tewas dan delapan lainnya terkena luka tembak, termasuk seorang anak berusia 4 tahun. Dalam skala besar, masih ada kasus Poso, Ambon, Timor Timur, dan Aceh yang sampai sekarang belum ada kejelasannya.

Kekerasan dan ancaman yang menimpa para aktivis diparodikan melalui peristiwa yang dialami tokoh Munir yang aktivis dan istrinya, Asih, yang tampak polos dan lugu. Asih merupakan simbol rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa tetapi harus ikut merasakan pahitnya menjadi korban.

Pemunculan kembali nama Munir membuat semua orang mengingat tragedi pembunuhan tersebut. Hal itu menjadi parodi karena memuat semangat olok-olok pada pemerintah dengan menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan pemerintah, masyarakat tidak akan pernah melupakan peristiwa tersebut. Kalaupun sejenak lupa, sekali saja nama Munir disebut, ingatan terhadap peristiwa represif itu akan kembali. Dengan demikian, satu model dapat ditemukan yaitu kritik atas sikap represif pemerintah terhadap kritik.

Berdasarkan identifikasi parodi yang telah dilakukan terhadap tujuh naskah yang terkumpul dalam MTK, dapat ditemukan beberapa hal. *Pertama*, dilihat secara sosiologis tokoh-tokoh tersebut berasal dari berbagai kelompok sosial. Tokoh-tokoh seperti Tukang Obat, Guru Bahasa, Asih, Juru Kunci, Bambang, dan Prajurit berasal dari kelompok sosial menengah ke bawah, sedangkan tokoh Tukang Selingkuh, Sang Koruptor, Raden Mas Suhikayatno, Politikus, dan Jenderal berasal dari kelompok sosial atas. *Kedua*, tokoh-tokoh yang berasal dari dua kelompok sosial yang berbeda tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan secara tidak langsung. Kedua kelompok tersebut seolah-olah mewakili “pelaku” dan “korban”. Yang dimaksud sebagai “pelaku” adalah tokoh-tokoh kelompok sosial atas—kecuali R.M. Suhikayatno—yang dalam naskah digambarkan sebagai “pelaku kejahatan” yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan “jatuhnya korban” yaitu tokoh dari kelompok sosial bawah. *Ketiga*, meskipun berasal dari kelompok sosial yang berbeda, tokoh-tokoh tersebut memiliki persamaan, yaitu sifat kritis. Tokoh-tokoh dalam seluruh naskah tersebut mengetahui dengan pasti permasalahan yang sedang terjadi dan yang sedang mereka alami. Apa yang mereka anggap tidak tepat, mereka tidak segan-segan mengkritiknya, hanya saja cara mereka mengkritik memang berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang masing-masing.

Pada tokoh-tokoh individual, latar dan dialog berperan penting dalam mempertegas karakter tokoh. Latar sekaligus menjadi salah satu bentuk parodi melalui pergantian dan penyimpangan arti. Sedangkan parodi dalam dialog dapat dilihat melalui gaya yang digunakan. Dilihat dari gaya dialog, banyak ditemukan



adanya pemakaian dialek dan idiolek. Penggunaan berbagai macam dialek dan idiolek membantu pengidentifikasian tokoh dan juga “memanjakan” penonton dengan efek lucu yang ditimbulkan oleh peniruan. Penggunaan dialek dan idiolek juga berguna untuk proses identifikasi parodi karena dua hal tersebut memperkuat karakter-karakter tokoh yang diparodikan.

Pada tokoh-tokoh tipologis, selain sebagai “penguat” karakter parodik, dialog juga mengungkapkan berbagai permasalahan-permasalahan kontekstual yang diparodikan dalam naskah-naskah tersebut. Selain itu, dalam ujaran tokoh banyak ditemukan penggunaan *Aside*. Selain menjadi alat ungkap parodi, dalam pementasan naskah-naskah MTK, *Aside* berperan penting untuk menjaga perhatian penonton terhadap pentas. Selain itu, penonton juga “diajak” menjadi bagian pentas supaya penonton dapat merasakan dan memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.

Berdasarkan identifikasi parodi tersebut juga ditemukan bahwa naskah-naskah tersebut adalah parodi atas politik. Realitas politik yang diparodikan dalam naskah MTK adalah berbagai permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia, terutama sejak era reformasi. Berbagai permasalahan sosial politik yang datang silih berganti dan bertumpuk-tumpuk, kondisi Indonesia yang makin terpuruk, nasib rakyat kecil yang tidak segera membaik, politikus yang hanya berorientasi pangkat dan kedudukan, dan pemerintahan yang semakin amburadul diparodikan dalam teks MTK. Permasalahan tersebut terbagi dalam lima hal pokok yaitu korupsi, kolusi, kebijakan pemerintah, respon pemerintah terhadap kritik, dan perilaku politikus.

## **BAB III**

# **PARODI ATAS REALITAS POLITIK DALAM *MATINYA TOEKANG KRITIK***

**BAB III**

**PARODI ATAS REALITAS POLITIK INDONESIA**

**PADA ERA REFORMASI DALAM *MATINYA TOEKANG KRITIK***

Pada bab sebelumnya telah dilakukan identifikasi parodi yang tampak dalam struktur teks MTK. Berdasarkan identifikasi tersebut, diketahui bahwa teks MTK berkaitan erat dengan realitas politik. Realitas politik yang dimaksud adalah realitas politik dalam teks yang berkaitan dengan situasi politik yang telah dan tengah terjadi di Indonesia, khususnya sejak era reformasi.

Keterkaitan antara teks dan konteks dalam bentuk parodi memang telah ditemukan. Akan tetapi, penemuan tersebut belum mampu menyingkap makna yang ada di balik parodi. Sebelum dilakukan pemaknaan, pada bab ini akan dijelaskan parodi atas realitas politik yang tampak dalam MTK. Pemahaman terhadap realitas politik yang diparodikan dalam MTK akan mempermudah proses penemuan makna.

**3.1 Parodi atas Realitas Politik Indonesia pada Era Reformasi dalam *Matinya Toekang Kritik***

Era reformasi telah dicanangkan selama sepuluh tahun. Pada awalnya, runtuhnya rezim Soeharto-Orba dari panggung kekuasaan negeri ini diharapkan dapat mendatangkan perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Pascareformasi, pemerintahan telah berkali-kali mengalami pergantian. Tapi sepertinya pergantian pemerintahan tidak berbanding lurus dengan perubahan



nasib rakyat Indonesia. Semakin hari, keadaan dirasa semakin jauh dari harapan. Berbagai permasalahan sosial politik datang silih berganti, bertumpuk-tumpuk, dan kondisi Indonesia makin terpuruk.

Keadaan inilah yang tampaknya menjadi stimulus bagi Agus Noor untuk merespon dengan kumpulan drama MTK. Hal itu terbukti dengan dikemukakannya realitas sosial dan politik Indonesia dalam naskah tersebut. Akan tetapi, ia tidak memindahkan konteks ke dalam teks begitu saja. Ia mengungkapkan realitas tersebut dalam bentuk parodi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat lima hal pokok—dalam kaitannya dengan realitas politik—yang diparodikan dalam MTK, yaitu korupsi, kolusi, kebijakan pemerintah, respon pemerintah terhadap kritik, dan perilaku politikus. Lima hal pokok tersebut merupakan kelompok besar masalah-masalah yang diparodikan dalam MTK.

### **3.1.1 Parodi atas Praktik Korupsi**

Korupsi merupakan permasalahan yang paling banyak diungkapkan pengarang dalam kumpulan naskah ini. Sebagian besar naskah mengangkat atau setidaknya menyinggung masalah tersebut, yaitu dalam naskah ACMKRI, PBUPB, NPP, KKT, MTK, dan BH. Dari keseluruhan naskah tersebut, masalah korupsi paling dominan dalam naskah KKT. Sementara dalam naskah lainnya, masalah tersebut hanya menempati sebagian naskah.

Dalam naskah ACMKRI, masalah korupsi diparodikan melalui pidato *Tukang Obat* tentang profesi dokter pada saat ini. Dalam pidato tersebut

disebutkan bahwa profesi dokter pada masa sekarang sudah berubah. Apabila sebelumnya diketahui bahwa tugas seorang dokter adalah mengurus orang sakit, pada saat ini profesi dokter berubah menjadi mengurus orang yang sehat tetapi ingin dinyatakan sakit. Pernyataan tersebut merujuk pada para tersangka dan terpidana kasus korupsi yang berusaha menghindari jerat hukum dengan alasan sakit. Kenyataannya, cara itu memang sangat berhasil.

**BK:**

Soalnya, kalau sakit, sekarang ini serba susah dan repot. Susah mesti keluar biaya. Repot mesti nyari dokter. Karena sekarang ini yang namanya dokter lagi pada sibuk. Soalnya para dokter sekarang ini tidak hanya mengurus orang sakit. Tapi juga mereka yang sebenarnya sehat, tapi ingin mendapat 'status sakit'.

Dulu, yang datang ke dokter itu kan biasanya orang yang lagi sakit. Sekarang ini, orang yang sehat juga banyak kok yang datang ke dokter, dan malah ingin dinyatakan sakit! Mereka datang ke dokter bukan supaya sembuh, tapi supaya dinyatakan sakit. *Gendheng* (gila) kan? Orang sehat kok pingin dinyatakan sakit. Yaa, tapi ini cuma terjadi pada beberapa orang sih, terutama mereka-mereka yang lagi kesandung kasus korupsi. Biasanya mereka langsung ingin dinyatakan sakit oleh dokter, biar dapat mangkir di persidangan dan mendapatkan "status penanggungan penahanan" (Noor, 2006:3-4).

Pada dasarnya, profesi dokter sampai saat ini tidak berubah, yaitu memiliki tugas utama mengurus orang-orang yang sakit. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan banyak sekali orang yang datang ke dokter hanya untuk mendapatkan surat sakit demi menghindari jerat hukum. Karena banyaknya "pasien" yang demikian, dokter terlihat menjadi sangat sibuk sampai-sampai diibaratkan tidak sempat mengurus orang yang benar-benar sakit. Hal itu menimbulkan kesan bahwa dokter telah beralih profesi, atau lebih tepatnya beralih

fungsi. Alih profesi dokter itulah yang tampak sebagai parodi atas penanganan kasus korupsi di Indonesia yang tidak serius.

Selain profesi dokter, parodi terhadap korupsi dalam ACMKRI juga tampak melalui pengibaratan yang dilakukan oleh Tukang Obat. Tukang Obat mengibaratkan korupsi seperti panu, membuat malu tetapi hanya ditutupi dengan baju baru. Pernyataan itu merujuk pada penanganan kasus korupsi yang seperti “dagelan” hukum. Proses pengadilan diadakan sebagai kamuflase, sebagai permainan, seolah-olah ada. Padahal proses tersebut diadakan hanya untuk menutup-nutupi hal yang sebenarnya, bukan memberantasnya. Hal ini dapat dilihat pada hasil akhir atau putusan pengadilan berupa vonis bebas untuk pelaku korupsi.

BK:

...

Belum lagi demam berdarah, virus HIV/AIDS, serta epidemi korupsi yang makin meningkat prosentasenya. Anda tahu, di negeri ini, korupsi sudah seperti penyakit panu: membuat kita malu, tetapi kita hanya menutupinya dengan memakai baju baru (Noor, 2006:14).

Selain itu, parodi dalam naskah ACMKRI tampak pada ungkapan Tukang Obat bahwa kondisi Indonesia yang demikian membuatnya merasa sangat terharu. Kata “terharu” dapat mengandung pengertian perasaan rawan hati atau kasihan atau iba. Konotasi yang ditimbulkan kata tersebut adalah konotasi positif berupa rasa perhatian. Pada konteks naskah tersebut, Tukang Obat yang notabene adalah korban dari kondisi yang carut marut tersebut merasa bersimpati seolah-olah dia bukan bagian dari orang-orang yang harus dikasihani tersebut. Selain itu, kata “haru” juga memiliki konotasi positif, bahkan cenderung mengandung makna

bahagia. Padahal masalah korupsi jelas-jelas bukan sesuatu yang positif, apalagi membahagiakan. Penggunaan kata tersebut menimbulkan kesan mengolok-olok, semacam menyebut “pandai” kepada anak yang nilai ulangnya 4.

Dalam naskah PBUPB, parodi tampak pada konsep EYD yang dikemukakan oleh Yus Badudui, yaitu Eksploitasi Yang Disempurnakan. Konsep tersebut mengandung pengertian segala sesuatu harus disempurnakan. Konsep itulah yang membuat korupsi dapat berjalan dengan baik karena pelaku menerapkan prinsip-prinsip korupsi yang disempurnakan.

BK:

...

Itulah yang membuat para pemimpin kita selalu sukses dan berhasil menindas rakyat, karena mereka memakai bermacam cara penindasan yang disempurnakan. Korupsi berhasil dijalankan dengan baik, karena mereka memakai prinsip-prinsip korupsi yang disempurnakan. Para politisi bisa terus-menerus berbohong, karena mereka terus meningkatkan kebohongan-kebohongan yang disempurnakan (Noor, 2006: 26).

Pada dasarnya, tidak diketahui dengan jelas bagaimana kriteria prinsip-prinsip korupsi yang disempurnakan. Pernyataan tersebut merujuk pada korupsi yang terjadi di Indonesia, korupsi di Indonesia dikategorikan “sempurna” karena dapat berkembang dengan sangat baik, di hampir semua sendi-sendi kehidupan pemerintah dan masyarakat. Kondisinya yang sempurna membuatnya sulit dicarikan tandingan di tempat lain dan sulit untuk dihapuskan. Hal ini berkaitan dengan “prestasi” Indonesia sebagai negara terkorup kelima sedunia ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)).

Parodi terhadap masalah korupsi juga dikemukakan dalam naskah MTK. Masalah ini diparodikan melalui tokoh Denmas. Diceritakan bahwa Denmas

berada di masa “suatu saat nanti”, yaitu pada tahun 3035. Kondisi Indonesia pada masa tersebut digambarkan sudah sangat sempurna, seperti keinginan setiap orang. Kondisi tersebut membuat Denmas merasa kehilangan peran karena sudah tidak ada hal yang bisa dikritik lagi. Denmas pun merasa bosan.

**DENMAS:**

Ayo dong kalian bikin apa kek biar saya ada kerjaan... Biar saya bisa ngritik lagi gitu... Bikin apa saja deh! Apa saja juga boleh... Mau Ya? Ya? Tolong para hakim dan jaksa, pengacara, ayo kalian semua membudidayakan lagi kebusukan... Jual beli perkara kayak dulu itu... Ayo para koruptor, bangkit dari kubur... kembali korupsi ramai-ramai... Para politikus, ayo kalian rebutan kursi lagi...(Noor, 2006:138).

Dalam kutipan teks di atas, Denmas memanggil-manggil para koruptor yang sudah berada di kubur agar bangkit untuk melakukan korupsi lagi agar ia bisa mengkritiknya lagi. Ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum “suatu saat nanti” itu, koruptor sangat sering mendapat kritik dari Denmas. Jadi ketika sudah tidak ada lagi korupsi, Denmas merasa kehilangan salah satu objek kritiknya. Padahal di saat yang sama, objek yang selama ini menjadi bahan kritiknya juga sudah tidak ada. Parodi dalam teks ini tampak pada penggambaran kesempurnaan kondisi Indonesia pada masa “suatu saat nanti” tersebut. Kondisi yang demikian termasuk utopia karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa sempurna. Kesempurnaan yang digambarkan merupakan “gambaran” kondisi Indonesia yang sama sekali tidak sempurna, jauh dari mimpi semua orang.

Parodi terhadap korupsi dalam naskah KTT menempati porsi yang paling besar. Parodi dilakukan atas pelaku korupsi, penanganan kasus korupsi, dan perlakuan terhadap koruptor. Pelaku korupsi dalam KTT adalah Sang Koruptor.



Berdasarkan identifikasi yang dilakukan dalam bab sebelumnya, diketahui bahwa Sang Koruptor adalah parodi Soeharto. Seperti diketahui, Soeharto dikenal sebagai “pelopor” tindak korupsi di Indonesia ketika memerintah orde baru. Parodi tampak pada sikap “jantan” Sang Koruptor yang mengakui kesalahannya dan memohon-mohon kepada pemerintah agar mau menangkapnya dan menjebloskannya dalam penjara. Ia juga mengimbau teman-temannya sesama koruptor agar mau menyerahkan diri.

**SANG KORUPTOR:**

Dengan tuluuus dan rendah hati saya akui: saya memang koruptor. *Inggih, dalem meniko* koruptor... (Noor, 2006: 56).

**SANG KORUPTOR:**

...  
Tolonglah saya, biar tidak terus-menerus kecanduan seperti ini...  
Ayo tolong... Hukum saya dengan sebenar-benarnya..

Ayo hukum saya... Tangkap saya... Tangkap... Tangkap! Tangkap!  
Tangkap saya...(Noor, 2006:74).

**SANG KORUPTOR:**

...  
Marilah kita bersama-sama menggalang GERHIPNAS: ‘Gerakan Hisap Menghisap Nasional’ secara lebih simultan. Kita tak usah lagi menutup diri. Sembunyi atau melarikan diri! Tolong saudara-saudaraku..., sebagai koruptor kalian jangan merendahkan diri jadi buronan! Bukankah buronan itu hanva pantas buat penjahat kelas *Buser* atau *Patrol*?

Jadi, ndak usahlah kalian lari. Melarikan diri. Ayo, semua kumpul saja ke mari...(Noor, 2006:74).

Kutipan-kutipan di atas menjadi parodi karena kenyataannya tak seorang pun koruptor di Indonesia yang mau mengaku sebagai koruptor, apalagi menyerahkan diri. Yang sudah terbukti bersalah saja tetap mengelak dan tidak mau bertanggung jawab.

Sikap koruptor yang selalu berusaha tampil sempurna dengan senyum dan menampakkan wajah tak bersalah diparodikan dalam teks melalui gagasan pemberian penghargaan seperti dalam dunia hiburan.

**SANG KORUPTOR:**

...  
Itulah sebabnya, di negeri ini, seorang yang sudah resmi menyandang predikat koruptor pun, masih saja berpenampilan tenang, penuh senyum, mirip rohaniawan seperti saya... (Noor, 2006:64).

...  
Coba saja Anda perhatikan mereka yang saat ini sedang kesandung kasus korupsi. Baik mereka yang sudah resmi jadi terdakwa, atau yang masih berstatus calon terdakwa. Mereka tetap bergaya anggun, melambaikan tangan sambil terus mengumbar senyuman paling menawan. Persis artis yang baru mendapat penghargaan...  
Ada baiknya juga lho, kalau koran atau majalah atau televisi—memberikan penghargaan buat para koruptor kita itu. Yah, semacam penghargaan tahunan begitu. Penghargaan bagi “Koruptor dengan Senyum Paling Menawan” atau “*Smiling Corruptor of the Year*”...

Gagasan pemberian penghargaan terhadap koruptor tersebut merupakan parodi atas kekecewaan terhadap sikap koruptor yang menampilkan wajah tidak bersalah. Secara etika, seseorang yang bersalah tapi bersikap seolah-olah tidak bersalah terasa lebih menjengkelkan. Wujud kejengkelan tersebut diparodikan dengan cara memberi penghargaan.

Penanganan kasus korupsi oleh pemerintah diparodikan dalam naskah KTT melalui kritik yang disampaikan oleh Sang Koruptor.

**SANG KORUPTOR:**

Anda tahu, kenapa pemerintah tak mau menangkap para koruptor? Sebab, kalau semua koruptor ditangkap, pastilah Anggaran Belanja Negara kita habis buat membangun buanyak penjara. Pernahkah Anda menghitung, betapa biaya untuk menangkap para koruptor itu jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM? Ini akan

membebani keuangan negara! Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontra-produktif bagi keuangan negara.

Lagi pula, kalau semua koruptor dijebloskan ke penjara, lalu siapa yang akan menyelenggarakan negara? Sebab, menjebloskan semua koruptor ke dalam penjara, itu sama artinya dengan menangkap dan memenjarakan semua pejabat dan aparat di negeri ini...

Membahayakan, kan?! Bisa terjadi krisis pemerintahan, kan? Birokrasi macet. Semua departemen kosong. Kantor-kantor publik tak bisa memberi pelayanan. Jangankan ngurus KTP, WC umum saja mungkin nggak ada lagi yang ngurusi...(Noor, 2006:60).

Sang Koruptor yang seharusnya senang tidak ditangkap justru membongkar alasan pemerintah yang tidak menangkap dirinya. Saat mengemukakan alasan pemerintah tersebut, ia juga menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang melakukan korupsi. Kritik yang seharusnya lebih pantas ditujukan kepada dirinya sendiri. Ia mengungkapkan kritik tersebut dengan nada tidak bersalah, seolah-olah ia bukan pelaku seperti yang ia tuduhkan pada orang lain.

Penanganan terhadap kasus korupsi di Indonesia juga diparodikan melalui latar "PENGADILAN SD NEGERI II" dengan logo timbangan yang berat sebelah.

Terlihat halaman kantor/gedung pengadilan. Di bagian belakang terlihat papan nama yang bertuliskan 'GEDUNG PENGADILAN SD NEGERI II', sebagaimana biasa terlihat di depan gedung kantor pemerintahan atau sekolahan. Sementara di satu sisi panggung ada semacam podium, tempat biasanya pejabat pidato atau memberi konferensi pers. Di bagian depan podium itu terlihat logo timbangan keadilan yang dibuat berat sebelah (Noor, 2006: 52).

Kata SD (Sekolah Dasar) mengacu pada "anak-anak". Anak-anak identik dengan permainan. Hal itu mengacu pada realitas proses pengadilan terhadap

koruptor yang seperti permainan. Oleh karena itu, proses pengadilan tersebut tidak menghasilkan apa-apa selain perasaan puas bagi yang “menang”, dan sebaliknya bagi yang “kalah”, seperti halnya dalam sebuah permainan. Logo timbangan yang berat sebelah memparodikan keberpihakan pengadilan terhadap koruptor. Dalam hal ini, asas keadilan tidak berlaku.

Perlakuan pemerintah terhadap koruptor diparodikan melalui pemakaian kata sandang “sang” pada tokoh “Sang Koruptor”. Kata “sang” yang bermakna memuliakan dilekatkan pada kata koruptor yang “tidak mulia”. Hal ini merupakan parodi atas kenyataan bahwa koruptor diperlakukan dengan sangat baik oleh pemerintah. Dibandingkan dengan maling ayam misalnya, perlakuan terhadap koruptor memang jauh lebih baik. Bahkan ada kesan penghormatan yang mengakibatkan keseganan untuk melakukan proses pengadilan seperti yang seharusnya. Kondisi tersebut dinyatakan dalam kalimat “semakin tinggi jumlah uang yang dimalingnya, justru semakin tinggi kedudukan dan derajatnya”.

Peristiwa korupsi di lingkungan KPU diparodikan dalam naskah BH.

ASIH:

Untunglah Bang Munir jadi aktivis. Jadi kagak ada yang bisa dikorupsi. Aktivis mah kagak bisa korupsi... Kecuali terpaksa. Kecuali jadi aktivis sekaligus merangkap jadi anggota KPU kali ya...(Noor, 2006:196).

Parodi terhadap pengungkapan korupsi di KPU tampak pada dialog. Dalam dialog tersebut, intonasi akhir terkesan gamang, antara pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan tersebut timbul karena sejatinya seorang aktivis tidak akan bisa melakukan korupsi karena aktivis tidak berorientasi keuntungan materi. Lagipula perjuangan aktivis selama “dicitrakan” tidak berhubungan dengan uang.

Ketika ada seorang aktivis yang bisa melakukan korupsi kemungkinan besar adalah aktivis yang merangkap sebagai anggota KPU, mengingat peristiwa tersebut pernah benar-benar terjadi. Nada pertanyaan dalam kalimat tersebut seolah mengejek dengan mempertanyakan kadar “keaktivisan” yang dimiliki pelaku, sedangkan nada pernyataan merupakan informasi karena peristiwa itu telah terjadi dan merupakan fakta yang tidak perlu dipertanyakan.

### **3.1.2 Parodi atas Praktik Kolusi**

Kolusi dalam MTK dikemukakan melalui naskah NPP, ACMKRI, dan KKT. Dibandingkan naskah ACMKRI, masalah kolusi lebih dominan tampak dalam naskah NPP.

Dalam NPP, praktik kolusi diparodikan dengan istilah “perselingkuhan”. Kata perselingkuhan dalam masyarakat dipahami sebagai hubungan terlarang yang dilakukan oleh dua orang yang bukan pasangan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam NPP, perselingkuhan dimaknai sebagai penyimpangan masing-masing profesi dalam relasinya dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Makna kata perselingkuhan yang dikemukakan di atas merupakan makna kata kolusi. Dengan demikian, penggunaan kata perselingkuhan termasuk parodi untuk menggambarkan bahwa kolusi dan selingkuh memiliki satu makna dasar, yaitu persekongkolan untuk memperoleh keuntungan.

Kolusi juga diparodikan dalam NPP melalui adanya acara refleksi perselingkuhan yang diadakan secara terbuka dan untuk umum. Dalam konsep perselingkuhan, hubungan kedua pihak seharusnya dilakukan secara sembunyi-

sembunyi. Akan tetapi dalam NPP, perselingkuhan digambarkan sebagai perbuatan yang tidak lagi tabu. Hal itu bisa dilihat pada acara yang refleksi perselingkuhan yang dihadiri oleh banyak penggemar perselingkuhan. Gambaran tersebut merujuk pada kenyataan bahwa kolusi bukan lagi sesuatu yang dianggap tabu dan telah menjangkiti hampir semua orang dari berbagai profesi.

BK:

...

Maaf, kalau saya menyebut Anda sebagai “para penggemar perselingkuhan”. Tapi saya yakin, Anda tidak tersinggung dengan predikat semacam itu. Buktinya, Anda rela hadir di acara yang bertema perselingkuhan semacam ini.. (Noor, 2006: 37).

Kolusi yang diungkapkan dalam NPP adalah kolusi antara aparat dan penjahat, kolusi antara guru dan pedagang buku, kolusi antara pejabat dan pengusaha, dan kolusi antara hakim dan pengacara. Masalah-masalah tersebut pada saat ini hampir menjadi sesuatu yang jamak, menjadi hal yang biasa terjadi, dan bukan lagi sesuatu yang mengherankan. Kasus-kasus kolusi hampir setiap hari menjadi menu santapan dalam berita-berita di media.

BK:

Maaf, bila Anda makin bingung dengan refleksi saya yang memang membingungkan ini. Habis mau apa coba, *wong* keadaan negeri kita ini memang benar-bener membingungkan saking banyaknya perselingkuhan yang terjadi di mana-mana. Di kantor-kantor, di rumah sakit, di rumah sakit, stasiun... bahkan sampai kuburan, ada saja yang namanya selingkuh-selingkuhan.

Saya tak tahu, apakah ini kebobrokan ataukah kehebatan kita sebagai sebuah bangsa. Yakni bangsa yang suka berselingkuh. Para aparat berselingkuh dengan penjahat. Guru-guru berselingkuh dengan pedagang buku—atau kadang-kadang dengan muridnya. Pejabat berselingkuh dengan pengusaha agar dapat ngantongin keuntungan. Hakim berselingkuh dengan pengacara untuk memenangkan perkara. Sedang saya...cukuplah saya berselingkuh dengan Madonna (Noor, 2006:44).

Kolusi juga diparodikan melalui kemunculan tokoh peselingkuh sebagai penyampai pidato refleksi perselingkuhan yang mencakup hal-hal di atas. Sosok peselingkuh yang muncul sebagai perefleksi adalah parodi atas dirinya sendiri karena pada dasarnya apa yang dia bicarakan adalah apa yang dia lakukan. Artinya, ketika dia berbicara dan mengajak orang lain, sesungguhnya ia berbicara kepada dirinya sendiri. Ketika dia membongkar keburukan orang lain, sebenarnya ia membongkar keburukannya sendiri. Hal ini menjadi parodi karena dalam kehidupan nyata sangat jarang ditemukan orang yang mau membongkar keburukannya sendiri. Kemunculan tokoh ini menjadi lelucon sekaligus kegetiran karena mengungkapkan kenyataan bahwa semua orang, asalkan mau melakukan refleksi diri pasti menyadari bahwa ia pernah terlibat dalam praktik kolusi, baik dalam skala besar maupun kecil. Tokoh ini menjadi parodi atas diri masing-masing pembaca dan penonton.

Kolusi yang hampir dianggap sebagai perbuatan yang lumrah diparodikan melalui pemahaman terhadap sifat naluriah yang merupakan dorongan bawah sadar manusia untuk meraih yang lebih banyak.

BK:

...

Saya akui, soal selingkuh-menyelingkuh memang selalu menarik. Pertama, karena pada dasarnya, kita ini termasuk sejenis makhluk yang memang menyukai perselingkuhan, itu naluriah kok. Itu dorongan bawah sadar manusia untuk meraih sesuatu yang lebih banyak...(Noor, 2006:39).

Pernyataan tersebut menjadi semacam dalih untuk membenarkan praktik perselingkuhan yang dalam hal ini mengacu pada praktik kolusi. Sikap pembenaran atau pemakluman tersebut menjadi parodi yang merujuk pada

kenyataan bahwa banyaknya kolusi yang terjadi menimbulkan kesan seakan-akan kolusi adalah sesuatu yang benar sehingga banyak orang yang melakukannya.

Parodi dalam naskah NPP juga terletak pada pemakaian kata kreativitas untuk menyebut keadaan di Indonesia yang lebih sering menutup-nutupi hasil kolusi. Kata kreativitas yang berkonotasi positif digunakan untuk menyebut tindakan “kreatif” dalam hal yang tidak terpuji. Hal itu menjadi parodi karena menyebut “baik” untuk sesuatu yang sudah diketahui “tidak baik”. Selain disebut dengan kata kreatif, budaya tutup-menutupi kolusi juga disebut dengan kata “kecanggihan”. Unsur parodiknya sama dengan yang telah dijelaskan pada kata “kreatif”. Hal itu merujuk pada sikap kita yang tampak bangga dan “baik-baik saja” melihat kolusi terus berkembang.

**BK:**

Kreativitas tutup-menutupi itulah yang kini menjadi karakter kehebatan kita. Inilah *character building* kita sebagai bangsa yang gemar berselingkuh. Kita jadi gemar menutup-nutupi kasus-kasus dan kebusukan hasil bermacam perselingkuhan. Dan ini ternyata telah menjadi kecanggihan kita hari ini. Kecanggihan membudidayakan kemunfikan sebagai cara untuk menutup-nutupi perselingkuhan di segala bidang (Noor, 2006:45).

Parodi atas praktik kolusi juga terdapat dalam naskah ACMKRI. Dalam naskah ini kolusi yang diparodikan adalah kolusi antara dokter dengan pembuat obat yang banyak terjadi di Indonesia, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal yang tampak sebagai parodi terletak pada alasan Tukang Obat mencalonkan diri menjadi Menteri Kesehatan, yaitu agar bisa mengambil keuntungan dalam bisnis obat. Alasan yang dikemukakan Tukang Obat menjadi parodi karena walaupun bisa jadi alasan tersebut merupakan alasan para menteri



kesehatan yang sebenarnya, tapi selama ini tidak ada yang berani mengatakannya. Kenyatannya, walaupun menteri itu tidak mau mengatakannya, mereka mau mempraktikkannya.

Saya mencalonkan sekaligus mengangkat diri saya sebagai “Calon Menteri Kesehatan Republik Indonesia”, karena saya tergugah oleh situasi kesehatan kita. Saya bukan dokter. Bukan paramedis. Saya hanyalah tukang jualan obat. Saya kira, inilah justru kelebihan saya. Karena bila nanti saya benar-benar jadi Menteri Kesehatan, saya jadi tahu secara persis seluk beluk bisnis jualan obat. Hingga saya bisa tahu secara persis bagaimana cara memosisikan diri untuk mengambil keuntungan dari perdagangan obat-obatan itu. Kita tahu, bisnis obat itu bisnis yang menggiurkan. Dan itulah daya tarik utama, kenapa saya ingin menjadi Menteri Kesehatan. Meski terus terang saja, boleh dibilang saya ini tak punya pengalaman dalam hal pengobatan atau pun penyembuhan. Paling banter, pengalaman saya di bidang “sembuh-menyembuhkan” hanya sebatas menyembuhkan orang kesurupan (Noor, 2006: 10-11).

Dalam naskah KKT, kolusi diparodikan melalui tindakan Sang Koruptor membagi-bagikan uang kepada petugas kepolisian yang sedang menjaganya. Parodi tampak pada pembagian yang dilakukan di depan umum, di depan para demonstran.

**SANG KORUPTOR:**

Bisa saya minta waktu sebentar, untuk berbicara dengan para demonstran itu? Kalian tak usah khawatir... kalian istirahat saja dulu. Atau mungkin beli rokok?

*Mengeluarkan uang dan memberikannya pada dua petugas itu dengan gaya seorang ayah memberikan uang saku kepada anaknya.*

**SANG KORUPTOR:**

Ini, buat jajan kalian...Ayo, toh...Tak usah malu-malu. Ambil...Percayalah, saya tak akan melarikan diri...

Nah, sekarang kalian istirahat saja dulu...Biar saya *ngadepin* (menemui) para demonstran itu... (Bergaya dan sok) Emangnya takut... (Noor, 2006: 54-55).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya kolusi adalah praktik sembunyi-sembunyi sehingga selalu diusahakan untuk disembunyikan dari orang lain. Tindakan Sang Koruptor berkolusi tersebut merupakan parodi yang merujuk pada kenyataan bahwa walaupun selalu diusahakan untuk sembunyi-sembunyi, praktik kolusi merupakan hal yang sudah dianggap “umum” dan “lumrah”, juga sudah menjadi konsumsi publik.

Parodi atas kolusi dalam KKT juga tampak pada ucapan Sang Koruptor yang menganggap kolusi sebagai salah satu bentuk zakat kepada hakim dan jaksa yang duafa.

**SANG KORUPTOR:**

Nggak ada ruginya lho kita memberi sedikit keuntungan buat hakim atau jaksa. Toh itu juga bukan uang kita. Yah, anggap saja kita lagi memberi sedikit zakat kepada hakim dan jaksa kita yang masih duafa. Kan kita malah dapat pahala (Noor, 2006:70).

Kata duafa berarti kelemahan seseorang dalam bidang ekonomi atau lebih konkretnya “orang tidak mampu”. Jaksa dan hakim bagaimanapun juga keadaannya tidak termasuk dalam kategori ini. Parodi tersebut merujuk pada perilaku jaksa dan hakim yang “meminta-minta” ketika menangani sebuah perkara. Perilaku “meminta-minta” tersebut hanya jamak dilakukan oleh kaum duafa, bukan para jajaran penegak hukum seperti mereka. Kata zakat juga merupakan olok-olok seolah apa yang dilakukan oleh Sang Koruptor adalah bentuk kebaikan yang bisa mendatangkan pahala.

### 3.1.3 Parodi atas Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang diparodikan dalam MTK meliputi kebijakan menaikkan harga BBM, penggusuran PKL, utang luar negeri, dan birokrasi.

Parodi atas kebijakan penggusuran PKL diungkapkan dalam naskah ACMKRI. Tokoh Tukang Obat menyebut penggusuran sebagai cermin kondisi Indonesia yang belum sehat.

Pada saat itulah terdengar raung sirene dan disusul suar-suarpnik. Mobil dan buldozer menderum. Suara para pedagang berlarian ketika terjadi penertiban. BK dengan panik segera mengemasi obat-obat dagangannya, sebagaimana pedagang kali lima yang ketakutan karena ada penggusuran. Kemudian ia menenteng tas dan bersiap pergi.

Tapi sejenak ia berdiri dan berbicara ke arah yang hadir, sambil celingukan ketakutan.

BK:

Rupanya keadaan memang benar-bener belum sehat. Tapi semoga saudara-saudara cukup sehat untuk merenungkan pidato saya...(Noor, 2006:18).

Pernyataan Tukang Obat yang menyebut kondisi Indonesia belum sehat karena masih ada penggusuran tersebut merupakan bentuk parodi. Sehat dalam hal ini tidak merujuk pada kondisi fisik tetapi merujuk pada kondisi mental. Ketidaksehatan mental tersebut terlihat pada sikap ego pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan. Kata tidak sehat juga mengacu pada tidak berfungsinya “telinga” pemerintah sehingga tidak mendengar jeritan hati rakyat.

Dalam naskah MTK, kebijakan pemerintah yang diparodikan adalah kebijakan menaikkan harga BBM dan melakukan pinjaman ke luar negeri.

**DENMAS:**

Eeh, malah memaki! Saya kutuk jadi Presiden Indonesia, mampus kamu! (*seperti tiba-tiba sadar, dan mencoba menelaskan, ke arah penonton*) Lho iya kan? Jadi Presiden Indonesia itu seperti dapat kutukan kok! Apa sih enakya jadi Presiden Indonesia, coba? Di Indonesia, profesi presiden itu profesi yang sama sekali tidak menarik. Dari dulu kerjanya gitu-gituuu melulu: selalu nyusahin rakyat. Kalau kalian termasuk golongan orang kreatif, tolong deh, nggak usah punya cita-cita jadi Presiden Indonesia. Malah nanti tidak kreatif.

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Presiden Indonesia itu monoton kok. Dari tahun ke tahun, siapa pun yang jadi presiden, ya tugasnya tetep sama: meningkatkan angka...pengangguran; menambah jumlah devi...apa? devisa uang negara...; mencari pinjaman luar negeri, menaikkan harga BBM... Sama sekali nggak kreatif kan? Mbosenin (membosankan)...(Noor, 2006:89-90)

Parodi atas kebijakan presiden dalam menaikkan harga BBM dan melakukan pinjaman ke luar negeri yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat terletak pada penyebutan Denmas. Denmas menyebut kebijakan tersebut sebagai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab presiden di Indonesia yang tidak kreatif. Dari masa ke masa, dari satu presiden ke presiden yang lain, kebijakannya selalu sama. Dalam teorinya, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab presiden seharusnya meningkatkan kemakmuran rakyat dan hal-hal bagus lainnya, bukan sebaliknya. Tapi kenyataannya, kebijakan presiden dari waktu ke waktu memang tidak berakibat seperti "yang seharusnya" sehingga seolah-olah yang terjadi itulah hasil pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab presiden, menggeser tugas, kewajiban, dan tanggung jawab presiden yang sebenarnya.

Parodi juga tampak dalam kutukan Denmas. Denmas mengutuk Bambang agar menjadi presiden Indonesia. Ia menyebut profesi presiden sebagai kutukan karena menurutnya profesi presiden sangat membosankan dan tidak kreatif. Hal

ini merupakan parodi karena kenyataannya profesi presiden sangat diharapkan oleh banyak pihak. Profesi presiden dianggap sebagai berkah, bukan kutukan. Pernyataan membosankan dan tidak kreatif merujuk pada kebijakan-kebijakan presiden dari tahun ke tahun yang tidak pernah memihak rakyat kecil. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah justru lebih banyak yang menyengsarakan rakyat.

### 3.1.4 Parodi atas Respon Pemerintah Terhadap Kritik

Respon pemerintah terhadap kritik digambarkan dalam dua bentuk, yaitu cuek dan represif. Respon pemerintah yang cuek dan tidak peduli terhadap berbagai kritik diparodikan dalam naskah MTK.

DENMAS:

...

Dikritik memang sakit... itu tak seberapa. Sebab orang yang suka mengkritik itu justru lebih merasa sakit, bila kritiknya nggak didengerin. *(Jeda)* Untung saya cukup sabar sebagai Tukang Kritik. Saya nggak pernah marah, meski disepelekan. Buat apa marah? Nggak ada gunanya..... *(Lalu berteriak memanggil pembantunya lagi, pelan)* Mbang... Bambang.... orang itu mesti yang sabar.... *(Lama-lama teriakannya makin tinggi dan bernada marah)* Diancuk! Mbang, mana surat itu!... Bambang!! *(ke arah penonton, masih menggeram marah)* Kalian lihat sendiri kan, dia selalu menyepelekan saya.... tapi saya tetap sabar... *(kembali berteriak marah)* Kamu taruh mana surat itu?!

DENMAS:

*(Menyemburkan minuman dari mulutnya, ngomel dan mengeluh)* Astaga... Bambang! Ini kan teh dua hari yang lalu. *(Berdahak seperti berusaha mengeluarkan sesuatu dari kerongkongannya)* Saya sampai tersedak cicak! Bambang!!! Bambanggg... *(Jeda)* Bener-bener punya bakat jadi presiden dia: kagak dengar meski sudah diteriakin... Alias *budeg!* Kata orang, budeg itu memang penyakit permanen presiden (Noor, 2006:94).

Sikap pemerintah yang cuek terhadap kritik diparodikan Denmas melalui perasaan sakit yang ia rasakan ketika kritiknya tidak didengarkan. Denmas merupakan gambaran kritik yang tidak didengarkan dan disepelekan. Saat ini, kritik di Indonesia memang tampak tidak berguna karena tidak ada yang mau “mendengarkan”. Demonstrasi yang terjadi di mana-mana seolah hanya menjadi tontonan. Mereka diberi izin untuk berdemonstrasi, diterima perwakilannya untuk berbicara, tapi sesudah itu tidak ada kelanjutannya. Kritik terasa semakin sia-sia. Dalam MTK, sikap pemerintah yang demikian diparodikan melalui sosok Bambang yang tidak mau mendengarkan Denmas dan menyepelkannya.

Sikap represif aparat terhadap aktivis diparodikan dalam naskah BH, yaitu melalui pemakaian nama tokoh Munir. Munir adalah aktivis HAM yang menjadi korban pembunuhan dalam sebuah perjalanan ke Belanda. Pembunuhan ini diduga dilakukan oleh BIN. Pemunculan kembali nama Munir membuat semua orang mengingat tragedi pembunuhan tersebut. Hal itu menjadi parodi karena memuat semangat olok-olok pada pemerintah dengan menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan pemerintah, masyarakat tidak akan pernah melupakan peristiwa tersebut. Kalaupun sejenak lupa, sekali saja nama Munir disebut, ingatan terhadap peristiwa itu akan kembali. Jadi, pemerintah akan sia-sia saja jika mengharapkan masyarakat akan melupakannya, apalagi hanya dengan diadakannya “dagelan” pengadilan terhadap tersangka kasus Munir.

Ancaman terhadap tokoh Munir dalam BH merupakan parodi atas kesewenang-wenangan aparat keamanan dalam memperlakukan seseorang yang dianggap mengganggu keamanan negara. Pada masa awal-awal bergulirnya

reformasi, kata-kata “mengganggu keamanan” digunakan sebagai alasan untuk menangkap dan menculik aktivis.

### 3.1.5 Parodi atas Perilaku Politikus

Ada beberapa perilaku politikus yang diparodikan dalam MTK, yaitu kepercayaan politikus terhadap hal-hal yang bersifat mistis, perilaku politikus yang berebut jabatan dan kedudukan, dan perilaku politikus yang ingkar janji. Perilaku politikus yang lebih mempercayai hal-hal mistis daripada kemampuannya sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkan diparodikan dalam naskah TPSRJ.

#### JURU KUNCI:

...

Biasanya, tiap hari rata-rata *mmm* sepuluh atau dua puluh bungkus politikus, datang kemari. Biasalah, cari berkah. Kalian kan ya sudah tahu toh, kualitas para politikus kita itu. Lebih percaya mistik, ketimbang berbuat baik.

...

Biasanya menjelang pemilu atau penyusunan kabinet, bnyak tokoh dari pusat yang *sowan* ke mari. (Noor, 2006:146).

Politikus yang ingin menjadi pejabat datang ke kuburan untuk mendapat berkah dari Raja Jin agar keinginannya terkabul. Hal ini merupakan parodi atas mentalitas politikus yang lebih senang memilih jalan pintas untuk memperoleh apa yang diinginkan daripada bekerja keras. Jalan pintas tersebut tidak hanya diartikan pergi ke kuburan, tetapi juga hal-hal lain misalnya KKN.

Perilaku politikus yang selalu memperebutkan jabatan dan kedudukan, juga lupa pada janji-janjinya diparodikan dalam naskah ACMKRI.

**BK.**

...  
Juga para politisi kita. Sebagai politisi mestinya harus sehat—tapi ternyata banyak yang mengalami gangguan neurosis stadium tiga: hingga gampang bertengkar rebutan kursi. Para pemimpin yang mestinya sehat, juga malah terkena amnesia: selalu lupa dengan janji-janji yang diucapkannya (Noor, 2006:12).

Parodi terhadap perilaku politikus terdapat pada gangguan kesehatan yang dialami politisi, yaitu neurosis dan amnesia. Neurosis adalah istilah umum yang merujuk pada ketidakseimbangan mental yang menyebabkan stress, tapi neurosis tidak mempengaruhi pemikiran rasional. Dalam teks disebutkan bahwa sebagai akibat terkena gangguan neurosis, para politisi menjadi gampang bertengkar rebutan kursi. Pada dasarnya, gangguan neurosis tidak mengakibatkan orang gampang bertengkar, apalagi dalam hal berebut kedudukan. Hal itulah yang tampak sebagai parodi. Sedangkan gangguan amnesia yang merupakan kondisi terganggunya daya ingat diparodikan sebagai penyebab politikus lupa pada janji yang mereka ucapkan.

Setelah dilakukan analisis terhadap lima hal pokok yang diparodikan dalam MTK, ditemukan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang paling banyak dibahas dan diparodikan. Hal ini menjadi indikasi bahwa korupsi merupakan masalah terbesar bangsa ini. Pada akhirnya diketahui bahwa bukan hanya korupsi, tetapi juga masalah-masalah lain yang dikemukakan di atas pada dasarnya berakar pada satu masalah yaitu ketidakberesan politik.



### **3.2 Model dan Matriks dalam *Matinya Toekang Kritik***

Model dalam MTK adalah kritik atas kondisi kesehatan, kritik atas kebijakan pemerintah yang tidak memihak kaum lemah, introspeksi atas praktik-praktik perselingkuhan yang terjadi, kritik atas masalah korupsi yang semakin berkembang, kritik atas ketidakpedulian pemerintah terhadap kritik, kritik atas ketidakwaspadaan terhadap bahaya Orde Baru, dan kritik atas sikap represif pemerintah terhadap kritik. Dengan demikian, matriks dalam MTK adalah introspeksi dan kritik atas realitas politik yang kacau.

### **3.3 Parodi Sebagai Ekspresi Estetis, Kritis, dan Reflektif**

Berdasarkan analisis terhadap parodi atas realitas politik yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa hampir keseluruhan naskah dalam kumpulan drama MTK mengungkapkan realitas politik Indonesia pada era reformasi. Parodi yang digunakan menyentuh keseluruhan realitas yang ditampilkan dalam teks.

Parodi di masyarakat dipahami sebagai lelucon. Kesalahan-kesalahan sengaja dilakukan agar menimbulkan efek lucu dan orang lain akan tertawa. Lelucon dalam parodi berangkat dari sesuatu yang telah mapan. Parodi membongkar wilayah kemapanan tersebut untuk mengungkapkan semacam semangat meledek, mengolok-olok, dan bermain-main. Parodi biasanya dipakai untuk membandingkan sebuah keadaan dengan mempermainkan keadaan itu sendiri. Menurut Wijoto (2001:43), dalam parodi sasaran dijatuhkan melalui perangkat kepemilikan sendiri. Semisal pertarungan silat, parodi persis ilmu

“lampah lumpuh” dalam serial “tutur tinular”, yaitu meminjam tenaga lawan untuk menjatuhkan diri sendiri.

Dari sisi estetis, sifat bermain-main dalam parodi memunculkan perasaan senang, sesuatu yang memang dicari dalam permainan. Permainan tersebut dilakukan terhadap apa yang sudah dikenal oleh pembaca maupun penonton. Hal itu menimbulkan efek lucu sehingga pembaca maupun penonton tidak merasa bosan, merasa dekat, dan merasa menjadi bagian dalam permainan tersebut. Kondisi demikian membuat pesan yang ingin disampaikan oleh naskah lebih mudah diterima.

Dalam kumpulan MTK, permainan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal, salah satunya tampak pada peniruan idiolek Soeharto. Seperti dalam kutipan di bawah ini.

**SANG KORUPTOR:**

Nah, sekarang kalian maunya apa? Apa daripada saya mesti memberiken semacam daripada Pidato Pertanggungjawaban, begitu? (Noor, 2006: 57)

**SANG KORUPTOR:**

Sebagai koruptor yang baik, pertama-tama izinkanlah daripada saya mengucapken daripada puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat dan hidayahNya..., hingga sampai hari ini saya bisa terus melakukan korupsi secara murni dan konsekuen... (*mengomentari apa yang barusan diucapkannya sendiri*) Maaf..., ini efek samping akibat over dosis penataran P4 di masa lalu (Noor, 2006: 58-59).

Penggunaan idiolek Soeharto tersebut menimbulkan efek kelucuan karena penonton langsung tahu konteks yang diparodikan. Dalam hal ini, parodi memang terikat dengan konteks. Dalam artian, hanya penonton yang memahami konteks yang bisa merasakan dialek tersebut sebagai lelucon.

Lelucon merupakan daya tarik tersendiri bagi manusia. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa tertawa bisa menimbulkan perasaan senang dan bahagia. Pada hakikatnya, manusia selalu ingin mencari kebahagiaan dan kesenangan. Ketika seseorang berada dalam kondisi bahagia, ia dapat menerima segala sesuatu dengan baik.

Selain sebagai hiburan, parodi dalam MTK juga memuat unsur kritik. Walaupun demikian, kritik yang ditimbulkan oleh parodi tidak dapat lepas dari unsur lelucon. Sebagai sebuah kritik, parodi merupakan “jalan pintas paling aman”. Pihak yang dikritik melalui parodi jarang bisa marah, sebaliknya bisa jadi ia menjadi tersenyum, atau bahkan terpingkal-pingkal. Ada dualisme posisi yang dialami oleh pihak yang terkritik melalui parodi. Di satu sisi, pihak terkritik merasa tersanjung karena pola operasional komunikasinya dipergunakan, sementara di sisi lain ia merasa sedikit tersinggung karena kesalahannya dibongkar. Disebabkan dualisme posisi itulah, pihak terkritik sulit menentukan sikap, dan sikap paling spontan dari kebingungan adalah tersenyum.

Parodi atas realitas dalam MTK merupakan parodi Jawa atau yang disebut sebagai *guyon parikeno*. *Guyon parikeno* adalah semacam sindiran halus, ejekan pada diri sendiri sebagai bagian untuk merefleksikan keadaan.

Dengan demikian, makna yang terkandung pada pemakaian parodi dalam MTK berkaitan dengan sikap dalam menghadapi masalah-masalah sosial dan politik yang sedang terjadi. MTK adalah teks yang merespon kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Respon yang dihadirkan dalam MTK adalah estetis, kritis, dan reflektif.

Estetis tampak dalam upaya menjadikan persoalan-persoalan berat menjadi semacam permainan. Permainan bukan berarti menganggap masalah-masalah tersebut tidak serius, sebaliknya permainan dapat membuat orang tertarik untuk terlibat. Keterlibatan dalam suatu hal yang dianggap menarik akan membuat orang merasa ringan menghadapinya. Dalam keadaan demikian, pikiran menjadi lebih jernih dan dapat merespon segala sesuatunya dengan baik. Selain itu, parodi dalam MTK bisa memberikan sudut pandang yang berbeda kepada pembaca perihal suatu persoalan. Setidaknya, MTK bisa memberikan satu perspektif dalam memandang problem sosial. Unsur bermain-main dengan parodi bisa menjadi cara dalam mengolah atau menghadapi keadaan yang menekan sehingga tidak menjadi tegang, tetapi menjadi rileks dan santai. Dalam kondisi demikian, semua orang akan bisa berpikir lebih baik dalam usaha keluar dari berbagai permasalahan yang menghimpit.

Kritik merupakan salah satu bentuk respon. Dalam MTK, kritik yang disampaikan melalui parodi dapat meminimalkan konfrontasi. Kritik pada dasarnya memuat semangat untuk memperbaiki, bukan semangat untuk menjatuhkan. Oleh karena itu, cara terbaik agar kritik sampai pada tujuannya harus dipikirkan. Parodi merupakan salah satu alternatif penyampaian kritik yang demikian. Lelucon dan humor dalam parodi memungkinkan siapa saja yang dikritik tidak merasa dipermalukan, sebaliknya kesadarannya disentuh dengan cara lebih halus. Dengan demikian, harapan agar kritik lebih didengar kemungkinan bisa terwujud.

Kritik dalam parodi juga memuat ejekan dan olok-olok terhadap diri sendiri. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk refleksi sehingga kritik tidak hanya ditujukan kepada orang lain, tetapi juga sebagai sarana introspeksi. Dengan demikian, MTK bisa menjadi media untuk melakukan refleksi bersama. Realitas yang ditampilkan membuat MTK bisa menjadi media untuk bercermin, bukan hanya oleh penonton atau pembaca, tetapi juga oleh pelaku atau penulis.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa MTK merupakan salah satu alternatif sikap terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Yang paling penting, MTK merupakan komedi kritis yang disampaikan dengan harapan dapat menjadi refleksi bagi semua orang yang setidaknya bisa menjadi bahan perenungan.

## **BAB IV**

# **KESIMPULAN**

## BAB IV

### SIMPULAN

Berdasarkan analisis pada dua bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa simpulan mengenai kumpulan drama MTK. MTK merupakan salah satu teks yang memparodikan konteks politik Indonesia di era reformasi. Simpulan tersebut diperoleh berdasarkan identifikasi terhadap keterkaitan antara unsur teks MTK dan konteks yang menjadi acuan MTK. Keterkaitan tersebut tampak melalui tokoh, latar, dan dialog.

Tokoh-tokoh yang diparodikan dalam MTK adalah tokoh individual dan tokoh tipologis. Dilihat dari segi sosiologis, tokoh-tokoh tersebut berasal dari berbagai kelompok sosial. Walaupun demikian, secara garis besar kedua kelompok tersebut mewakili “pelaku” dan “korban”. Yang dimaksud “pelaku” adalah tokoh-tokoh kelompok sosial atas—kecuali R.M. Suhikayatno—yang dalam naskah digambarkan sebagai “pelaku kejahatan” yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan “jatuhnya korban” yaitu tokoh yang berasal dari kelompok sosial bawah. Secara tidak langsung, masing-masing tokoh dalam MTK berhubungan satu sama lain. Keberagaman tokoh ini mewakili sudut pandang permasalahan yang dapat dilihat dari sisi pelaku dan sisi korban.

Meskipun berasal dari kelompok sosial yang berbeda, tokoh-tokoh tersebut memiliki persamaan, yaitu sifat kritis. Tokoh-tokoh dalam kumpulan drama MTK mengetahui dengan pasti permasalahan yang sedang terjadi dan yang sedang mereka alami. Hal-hal yang mereka anggap tidak tepat tidak segera



mereka kritik, hanya saja cara mereka mengkritik memang berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang masing-masing. Persamaan sikap kritis yang dimiliki tokoh-tokoh ini merupakan bentuk parodi yang mengacu pada kenyataan bahwa sebenarnya semua orang pasti mengetahui apa yang benar dan apa yang salah asalkan mau jujur pada hati nurani.

Pada tokoh-tokoh individual, latar dan dialog berperan penting dalam mempertegas karakter tokoh. Latar sekaligus menjadi salah satu bentuk parodi melalui pergantian dan penyimpangan arti. Sedangkan parodi dalam dialog dapat dilihat melalui gaya yang digunakan. Dilihat dari gaya dialog, banyak ditemukan adanya pemakaian dialek dan idiolek. Penggunaan berbagai macam dialek dan idiolek membantu pengidentifikasian tokoh dan juga “memanjakan” penonton dengan efek lucu yang ditimbulkan oleh peniruan. Penggunaan dialek dan idiolek juga berguna untuk proses identifikasi parodi karena dua hal tersebut memperkuat karakter-karakter tokoh yang diparodikan.

Pada tokoh-tokoh tipologis, selain sebagai “penguat” karakter parodik, dialog juga mengungkapkan berbagai permasalahan-permasalahan kontekstual yang diparodikan dalam naskah-naskah tersebut. Selain itu, dalam ujaran tokoh banyak ditemukan penggunaan *Aside*. Selain menjadi alat ungkap parodi, dalam pementasan naskah-naskah MTK, *Aside* berperan penting untuk menjaga perhatian penonton terhadap pentas. Selain itu, penonton juga “diajak” menjadi bagian pentas supaya penonton dapat merasakan dan memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.



Berdasarkan identifikasi parodi tersebut juga ditemukan bahwa naskah-naskah tersebut adalah parodi atas realitas politik. Realitas politik yang diparodikan dalam naskah MTK adalah berbagai permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia, terutama sejak era reformasi. Berbagai permasalahan sosial politik yang datang silih berganti dan bertumpuk-tumpuk, kondisi Indonesia yang makin terpuruk, nasib rakyat kecil yang tidak segera membaik, politikus yang hanya berorientasi pangkat dan kedudukan, dan pemerintahan yang semakin amburadul diparodikan dalam teks MTK. Permasalahan tersebut terbagi dalam lima hal pokok yaitu korupsi, kolusi, kebijakan pemerintah, respon pemerintah terhadap kritik, dan perilaku politikus.

Berdasarkan analisis terhadap lima hal pokok di atas, ditemukan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang paling banyak diangkat dalam MTK. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah terbesar bangsa Indonesia. Namun pada dasarnya, segala permasalahan yang sedang terjadi merupakan akibat dari kebobrokan politik di Indonesia. Kebobrokan politik tersebut tidak lagi bersifat struktural, tetapi mental. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ada persoalan mental yang harus dibenahi.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan model dan matriks dalam MTK. Model dalam MTK adalah kritik atas kondisi kesehatan, kritik atas kebijakan pemerintah yang tidak memihak kaum lemah, introspeksi atas praktik-praktik perselingkuhan yang terjadi, kritik atas masalah korupsi yang semakin berkembang, kritik atas ketidakpedulian pemerintah terhadap kritik, kritik atas ketidakwaspadaan terhadap bahaya Orde Baru, dan kritik atas sikap represif

pemerintah terhadap kritik. Dengan demikian, matriks dalam MTK adalah introspeksi dan kritik atas realitas politik yang kacau.

Pemakaian parodi dalam MTK merupakan sarana ekspresi yang estetis, tapi tetap kritis, sekaligus reflektif. Estetis dalam arti ada bentuk-bentuk yang mengacu pada keindahan teks sehingga teks MTK tidak bersifat seperti ceramah, tetapi bisa membawa semua orang untuk bersama-sama terlibat di dalamnya. Kritis mengandung pengertian bahwa naskah ini bukan semata-mata bacaan yang hanya akan berhenti di meja atau di tempat tidur setelah dibaca, naskah ini merupakan suara-suara yang harus didengarkan. Reflektif berarti suara yang ada dalam teks tidak hanya untuk didengarkan saja, tetapi juga untuk menjadi bahan perenungan semua pihak untuk selanjutnya diharapkan dapat membawa perubahan seperti yang diharapkan.

# DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR PUSTAKA**

- Baldick, Christ. 1990. *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*. Oxford: Oxford University Press
- Chaer, Abdul. 2000. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Finoza, Lamuddin. 2004. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diksi Insan Mulia
- Hidayati, Nurul. 3004. "Biografi Munir: Musuh Pelanggar HAM Telah Tiada". <http://www.detiknews.com>. 24 Februari 2008
- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Luxemburg, Jan Van, dkk. 1992. *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Noor, Agus. 2006. *Matinya Toekang Kritik*. Yogyakarta: Lamalera
- Permana, Achiar M. "Monolog Interaktif Si Toekang Kritik". <http://www.korantempo.com>. 21 September 2006
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipersemiotika*. Bandung: Jalasutra
- Purwaraharja, Lephen. "Catatan Budaya; Monolog 'Matinya Toekang Kritik'". <http://www.kuaetnika.com>. 19 Februari 2006
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Riffaterre, Michael. 1978. *Semiotics of Poetry*. Bloomington and London: Indiana University Press
- Santosa, Mas Achmad. 2004. *KPK, "Pengadilan Korupsi dan Kontrol Publik"*. <http://wap.korantempo.com>. 29 Agustus 2007
- Soemanto, Bakdi. 2002. *Godot di Amerika dan Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo

Sumardjo, Jakob dan Saini. K. M. 1994. *Apresiasi Kesusastraan*. PT Gramedia Pustaka Utama

Syarifudin. "Butet Akan Ungkap 'Matinya Toekang Kritik'."  
<http://www.kompas.com>. 15 Januari 2006

Tambajong, Japi. 1981. *Dasar-dasar Dramaturgi*. Bandung: Pustaka Prima

Wijoto, Ribut. 2001. *Penyingkapan Kode Bahasa Estetik Puisi dengan Kaitan Kenyataan Antroposentrisme Berbelah dalam Antologi Arsitektur Hujan Karya Afrizal Malna*. Skripsi Jurusan Sastra Indonesia. Fakultas Sastra Universitas Airlangga

<http://www.bkkbn.go.id>. "Isye Tetap Tegar meskipun Sebagai Penderita HIV/AIDS". 27 Mei 2008

<http://www.jawapos.co.id>. "Reformasi Jangan Kalah Nyali". 19 April 2008

<http://www.kompas.com>. "Menakar Efektivitas GNTPPB, Refleksi untuk Masa Depan". 4 Juni 2008

<http://www.kpk.go.id>. "Menabuh Genderang Perangi Korupsi". 13 Juni 2008

<http://www.liputan6.com>. "Ke mana Dana Sakit Si Miskin?". 27 Mei 2008

<http://www.mabespolri.go.id>. "Penimbunan BBM LK 86 Ton". 9 April 2008

<http://www.tempointeraktif.com>. "Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto". 4 Juni 2008

<http://www.wikipedia.org.id>. "Galileo Galilei". 27 Mei 2008

<http://www.wikipedia.org.id>. "Jusuf Syarif Badudu". 27 Mei 2008

<http://www.wikipedia.org.id>. "Mahatma Gandhi". 27 Mei 2008

<http://www.wikipedia.org.id>. "Munir Said Talib". 27 Mei 2008

<http://www.wikipedia.org.id>. "Mpu Gandring". 27 Mei 2008

<http://www.wikipedia.org.id>. "Soeharto". 27 Mei 2008

<http://www.wikipedia.org.id>. "Socrates". 27 Mei 2008

<http://www.wikipedia.org.id>. "Voltaire". 27 Mei 2008

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1.

#### Jusuf Sjarif Badudu

Jusuf Sjarif Badudu yang lebih dikenal dengan nama J. S. Badudu, atau terkadang Jus Badudu adalah seorang pakar Bahasa Indonesia. Beliau adalah seorang Guru Besar Linguistik pada Universitas Padjadjaran dan dikenal luas di masyarakat sebagai pembawa acara Pembinaan Bahasa Indonesia (1974-1979)

Jusuf Sjarif Badudu lahir di Gorontalo pada tanggal 19 Maret 1926. Dalam usia tiga belas tahun (1939) Badudu manamatkan Sekolah Rakyat di Ampana, Sulawesi Tenggara. Kemudian, ia mengikuti kursus Volksonderwijser/CVO di Luwuk, Sulawesi Tenggara (1941). Tahun 1949 ia menyelesaikan pendidikan Normaal School di Tertena, Sulawesi Tenggara. Ia melanjutkan sekolah di Kweekschool/SGA, Makassar, Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 1951. Tahun 1955 ia menyelesaikan pendidikan B.1 Bahasa Indonesia di Bandung dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung (1963). Tahun 1971—1973 Badudu melanjutkan pendidikan pada Postgraduate Linguistics di Leidse Rijksuniversiteit Leiden, Belanda. Tahun 1975 ia memperoleh gelar Doktor Ilmu Sastra dengan pengkhususan linguistik di Universitas Indonesia, Jakarta, melalui disertasi yang berjudul Morfologi Kata Kerja Bahasa Gorontalo.

Sebagai orang yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia, Badudu telah mengabdikan diri sebagai guru sejak usia 15 tahun 5 bulan. Ia menjadi guru sekolah dasar di Ampana, Sulawesi Tengah hingga tahun 1951. Pada tahun 1951—1955 ia menjadi guru SMP di Poso, Sulawesi Tengah, dan pada tahun 1955—1964 menjadi guru SMA di Bandung. Ia juga pernah menyumbangkan tenaga sebagai dosen di Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1965—1991.

Tahun 1982—sekarang, Badudu menjadi guru besar linguistik pada Program Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Pendidikan Indonesia (dulu IKIP Bandung). Ia juga menjadi guru besar di Universitas Pakuan Bogor pada tahun 1991—sekarang dan di Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1994—sekarang (tidak aktif memberikan kuliah, tugas diserahkan kepada asisten). Ia juga pernah, selama tiga tahun, menatar guru-guru sekolah dasar di enam provinsi (Sumatra Barat, D. I. Aceh, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan D.I. Yogyakarta) dalam proyek PEQIP (Preliminary Education Quality Improvement Project), sebuah lembaga bantuan Jerman yang bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional). Tahun 1995—1997, ia mengunjungi setiap provinsi itu 2 kali dalam setahun.

Tokoh bahasa ini juga dikenal sebagai pembawa acara Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI Pusat Jakarta (1977—1979). Dalam acara ini pula J.S. Badudu melontarkan kritik terhadap keberbahasaan Presiden R.I. saat itu Soeharto. Beliau juga sebagai penatar bahasa Indonesia untuk berbagai lapisan masyarakat, seperti mahasiswa, dosen, guru, wartawan, pegawai pemerintah, dan polisi. Ia juga sering menyajikan makalah di luar negeri, seperti Belanda, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Jepang.

Dalam usia 76 tahun saat ini Badudu tidak hanya aktif sebagai guru, dosen, penatar bahasa Indonesia, tetapi juga aktif sebagai penulis artikel tentang bahasa Indonesia di surat kabar dan majalah. Sejak tahun 1977 hingga sekarang, ia menjadi penulis atau pengisi rubrik tentang pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di majalah Intisari Jakarta.

Sebagai guru dan dosen bahasa Indonesia selama 49 tahun, Badudu pernah menerima bintang jasa Pemerintah RI, yaitu Satyalencana 25 tahun Pengabdian dan Bintang Mahaputra yang diserahkan sendiri oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tanggal 15 Agustus 2001 di Istana Negara. Bintang jasa itu diberikan pemerintah sebagai penghargaan atas jasanya membina bahasa Indonesia selama bertahun-tahun bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: <http://www.wikipedia.org.id>



## Lampiran 2.

### **Soeharto**

Jenderal Besar Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto, lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni, 1921. Soeharto adalah Presiden Indonesia yang kedua, menggantikan Soekarno, dari 1967 sampai 1998.

Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa.

Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.

Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Soeharto juga membatasi kebebasan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rejim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah US\$15 milyar sampai US\$35 milyar. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.

Soeharto menikah dengan Siti Hartinah ("Tien") dan dikaruniai enam anak, yaitu Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiék).

### **Meredam Oposisi**

Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama

dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen.

Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.

Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.

Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru.

Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru.

### **Puncak Orde Baru**

Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai *Mafia Berkeley* di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalam IGGI yang disponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia,

khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem *trickle down effect* (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.

Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh banggunya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.

Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.

### **Beberapa Catatan Atas Tindakan Represif Orde Baru**

Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis. Walaupun begitu, Soeharto terlibat persahabatan yang akrab dengan Lee Kuan Yew yang pernah menjadi Perdana Menteri Singapura yang beretnis Tionghoa.

Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.

Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam.

Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "*electoral college*". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Soviet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999.

#### **Soeharto dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen pada Tahun 1998.**

Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan.

Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.

Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai "*Peristiwa Kudatuli*" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).

### **Soeharto Turun Takhta**

Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, para pendukung revolusi mendapatkan hadiahnya: Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi.

Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.

Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.

Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto.

### **Kasus Dugaan Korupsi**

Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.

**Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.[1]**

**Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.**

Lampiran 3.

### **Reformasi Jangan Kalah Nyali**

Pemerintah telah memperlakukan mendiang Pak Harto dengan layak. Bahkan, bisa dikatakan istimewa. Sebab, selain menggelar prosesi pemakaman istimewa, pemerintah juga memutuskan untuk menjadikan kematian Pak Harto sebagai hari berkabung nasional selama tujuh hari.

Selain pemerintah, masyarakat pun memberikan perlakuan istimewa. Sepanjang jalan yang dilalui iring-iringan mobil jenazah Pak Harto, penuh sesak dengan orang yang ingin memberikan penghormatan. Pelayat pun berdatangan, baik dari kalangan bawah maupun atas.

Bukan hal yang aneh bila semua itu terjadi. Meminjam istilah budayawan KH Mustofa Bisri, Pak Harto memang meninggal di zamannya (Jawa Pos, 29 Januari 2008). Lain dengan Bung Karno yang meninggal bukan di zamannya, melainkan di zaman Pak Harto.

Memang, sudah 10 tahun Pak Harto dilengserkan dari tampuk kekuasaan. Namun, para pemimpin di era reformasi yang menggantikannya tidak "sehebat" Pak Harto dulu ketika menggantikan Bung Karno. Pemimpin di era reformasi tidak bisa serta-merta menanggalkan semua hal yang berbau Pak Harto.

Bayang-bayang Pak Harto masih begitu jelas terlihat. Beberapa elite politik yang kini memegang tampuk kekuasaan adalah orang-orang yang dulu besar dan tumbuh bersama Pak Harto. Mereka kini hanya ganti baju. Isi dan jiwanya masih sangat Soeharto.

Memang, era reformasi juga telah memberikan peluang bagi kelompok non-Soeharto untuk ikut berkuasa. Namun, sangat sedikit di antara mereka yang "kuat iman". Banyak di antara mereka yang kini justru menjadi kelompok Soeharto baru.

Jadi, hakikatnya, era sekarang ini memang masih era Pak Harto. Yakni, era di mana kekuasaan tidak diabdikan untuk rakyat, korupsi masih menjadi tradisi, serta hukum belum sepenuhnya bisa ditegakkan.

Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita akui. Dan tidak tertutup kemungkinan, kematian Pak Harto Ahad lalu akan menjadi titik awal bangkitnya kembali Soeharto-Soeharto baru. Mereka yang selama ini tiarap, setelah melihat antusiasme masyarakat dalam memberikan penghormatan terakhir kepada Pak Harto, akan kembali mempunyai nyali untuk menunjukkan jati dirinya sebagai Soeharto.

Bukan itu saja. Mereka yang bukan Soeharto pun bisa berbuat "nekat". Demi keuntungan politik sesaat, mereka bisa berbalik badan menjadi Soeharto.

Dengan harapan, pengagum Pak Harto yang ternyata masih banyak bisa dimanfaatkan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, DPD, hingga memenangkan pemilihan presiden.

Bagi kelompok yang meyakini bahwa era Pak Harto harus dikoreksi dan diganti, momentum kematian Pak Harto itu harus dijadikan titik awal untuk melakukan konsolidasi. Jangan sampai kalah nyali sehingga membiarkan para Soehartois bangkit lagi dan menerapkan gaya kepemimpinan Soeharto yang tidak demokratis dan otoriter.

Tentu bukan persoalan mudah, mengubah cara berpikir masyarakat yang masih Soehartois untuk menjadi reformis. Namun, yakinlah seiring dengan perjalanan waktu, hal itu bisa terkikis dan tergantikan. Dengan catatan, beberapa perubahan sistem politik yang merupakan buah reformasi bisa dijaga keutuhannya.

Yakni, jabatan presiden tetap dibatasi hanya dua kali; presiden, gubernur, dan bupati dipilih secara langsung; serta partai politik yang berhak mengikuti pemilu tidak dibatasi. Dan pers pun tetap dibiarkan untuk melakukan fungsinya sebagai pilar demokrasi. (\*)

Sumber: *www.jawapos.co.id*



#### Lampiran 4.

#### Biografi Munir: Musuh Pelanggar HAM Telah Tiada Oleh Nurul Hidayati

Siapa tak tahu Munir? Sulit dibantah sangat sedikit sekali orang yang tidak tahu siapa pria berambut bule itu. Namanya identik dengan perjuangan hak asasi manusia (HAM), isu sensitif di era modern ini.

Munir mulai moncer tahun 1998-an. Kala itu dia banyak disorot media massa karena keberaniannya mengadvokasi kasus penculikan aktivis. Nyaris saban hari Munir yang membawa bendera Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) itu menghiasi berita di televisi. Sosoknya tak lepas dari sifat cerdas dan berani.

Saking beraninya membeberkan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara, banyak kalangan bertanya-tanya, siapa di belakang pria berbadan kecil itu? Tapi hingga kini tidak ada jawaban pasti. Munir hanya menyebut bahwa pendorongnya adalah justru istri tercintanya.

Siapa Munir sebenarnya? Pria keturunan Arab ini lahir di Malang, pada Rabu, 8 Desember 1965. Gelar sarjana hukumnya diraih di Universitas Brawijaya (Malang) pada 1989. Pada 1989, Munir masuk ke LBH Malang sebagai sukarelawan, lalu memutuskan total sebagai orang LBH.

Pada tahun 1995, Munir mendapat promosi menjabat sebagai Direktur LBH Semarang selama tiga bulan. Lalu ditarik ke YLBHI, Jakarta, merangkap sebagai Koordinator Kontras pada 1998. Menikah dengan Suciwati, Munir dikaruniai seorang anak bernama Sultan Alif Allende (5) dan Difa (2).

Ditengarai karena kevakalannya, rumah Munir di Jl Diponegoro 169 kawasan wisata Kotatiff Batu Malang, (kampung halamannya) diteror bom, Senin (20/8/2001). Dan berkat kevakalannya juga, Munir mendapatkan sejumlah penghargaan, antara lain Yap Thian Hien Award dari Yayasan Pusat HAM dan penghargaan dari UNESCO (Badan PBB untuk Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Kebudayaan) karena dinilai berjasa memperjuangkan HAM di Indonesia. Lengser dari Kontras, Munir mendirikan lembaga HAM sejenis bernama Indonesian Human Rights Monitor alias Imparsial. Di tengah kesibukannya memperjuangkan HAM, Munir juga bersimpati pada perjuangan Amien Rais, yang mencapreskan diri pada Mei lalu. Tak ayal, Munir pun sempat menjadi salah satu bintang iklan kampanye Amien Rais versi testimoni.

Belakangan, Munir banyak bicara soal RUU TNI yang tengah digodok DPR dan pemerintah. Sembari menyorotinya, Munir mempersiapkan keberangkatannya

untuk sekolah S-2 bidang Hukum Humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Dan Senin malam (6/9/2004), Munir terbang ke Negeri Kincir Angin untuk mengejar cita-cita. Namun tiga jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, atau pada Selasa pagi (7/9/2004), Yang Maha Pengasih mengambilnya.

Selamat jalan, Cak Munir!

Sumber: [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com)